



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

LKJIP 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

 (0751) 478555

 www.padangpariamankab.go.id

KATA PENGANTAR



H. JOHN KENEDY AZIS, SH, MH
BUPATI PADANG PARIAMAN

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah tahun anggaran berakhir.

LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang memuat aspek akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan serta capaian kinerja dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2024. LKjIP juga merupakan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kami berharap bahwa LKjIP ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan program dan kegiatan selanjutnya, serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan dan program pembangunan ke depan.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik sebagai informasi maupun sebagai evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Parit Malintang, 20 Maret 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

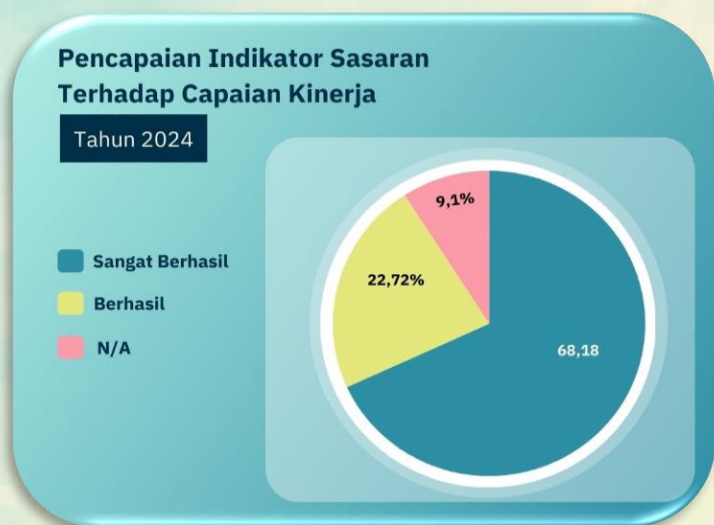
IKHTISAR EKSEKUTIF

Seiring dengan telah berakhirnya pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024. Penyusunan LKjIP menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong tata Kelola Pemerintahan yang baik Dimana Instansi Pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan Publik. LKjIP Kabupaten Padang Pariaman merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 38/KEP/BPP/2024 Tanggal 18 Januari 2024 Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024-2025. telah ditetapkan 14 (empat belas) Sasaran Strategis dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dapat disimpulkan bahwa 15 (enam belas) indikator (68,18%) dikategorikan Sangat Berhasil, 5 (lima) indikator (22,72%) dikategorikan Berhasil dan 1 (satu) indikator (9,1%) tidak/belum ada data tersedia (N/A). Disamping itu, terdapat beberapa Indikator Kinerja yang mengalami peningkatan capaian dari kategori “Berhasil” ke kategori “Sangat Berhasil” yaitu : Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten (100,07%), Indeks SPBE (127,17%) dan Angka Usia Harapan Hidup (100,30%).



Dari total persentase capaian indikator diatas maka didapatkan rata-rata capaian kinerja keseluruhan dari 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja pada tahun 2024 yakni sebesar 174,79% dengan kategori capaian “Sangat Berhasil”.

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat capaian realisasi untuk beberapa indikator yang belum memenuhi target kinerja, hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa hambatan dan kendala. Untuk itu sebagai upaya perbaikan kedepan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan langkah konkrit melalui analisis dan evaluasi baik internal dan eksternal agar dapat dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan upaya akselerasi untuk pencapaian tahun berikutnya, dan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan, sehingga resiko kegagalan dapat ditekan dan dicarikan solusi untuk mengatasinya.

Langkah-langkah kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengevaluasi perencanaan kinerja agar lebih berkualitas dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) serta berupaya menggunakan indikator kinerja yang SMART yang mampu menggambarkan lebih spesifik dari kinerja yang ingin dicapai, sejalan dengan jadwal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode yang baru pada tahun 2025.
2. Terus menjaga semangat untuk berinovasi terutama dalam peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat.
3. Melaksanakan program-program dan kegiatan prioritas dalam pencapaian sasaran strategis daerah;
4. Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pelaporan data kinerja yang terintegrasi (SIMAK Kinerja) yang selaras dengan target-target daerah dalam dokumen perencanaan daerah dan di manfaatkan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Padang Pariaman.

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Reviu bertujuan untuk memberikan Keyakinan terbatas lapopran kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**INSPEKTUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**



HENDRA ASWARA, S.STP,MM.CGCAE
Pembina TK I NIP 19810926 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
PERNYATAAN TELAH DI REVIU.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum.....	2
1.2.1 Kondisi Geografis.....	2
1.2.1 Demografis.....	4
1.2.1 Produk Domestik Regional	6
1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi	8
1.3 Struktur Organisasi.....	8
1.4 Sumber Daya Manusia.....	12
1.5 Isu Strategis Dan Permasalahan Pembangunan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
2.1 Latar Belakang	21
2.1.1 Visi.....	21
2.1.2 Misi.....	22
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	22
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	25
2.3 Perjanjian Kinerja	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
3.1 Pengukuran Kinerja.....	36
3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama	37
3.3 Akuntabilitas Keuangan	194
3.4 Prestasi dan Penghargaan.....	196
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	203
4.1 Kesimpulan	203
4.2 Rencana Perbaikan	204
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1	: Luas Wilayah Per Kecamatan, Jumlah Nagari dan Korong di Kabupaten Padang Pariaman	3
1.2	: Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024	4
1.3	: Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 – 2024	5
1.4	: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	12
1.5	: Prioritas Permasalahan Pembangunan Daerah	17
2.1	: Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026	22
2.2	: Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026	26
2.3	: Perjanjian Kinerja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	32
3.1	: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Penanggung Jawab	35
3.2	: Pengukuran Dengan Skala Ordinal	37
3.3	: Realisasi Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 dan Penyesuaian Pohon Kinerja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	38
3.4	: Lembaga Pendidikan Alqur'an Penghasil Hafizh/Hafizhah Menurut Kecamatan	41
3.5	: Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	42
3.6	: Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan Tahun 2024	42
3.7	: Hafiz/Hafizah Yang Lolos Gema Insani 2024	44
3.8	: Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Indikator Kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah 2024	45
3.9	: Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2024	47
3.10	: Perbandingan Realisasi Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2023 dan Tahun 2024	48
3.11	: Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2021-2024 dengan Target RPJMD	48

3.12	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2024	52
3.13	:	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tahun 2024	53
3.14	:	Potensi Konflik Sosial di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	54
3.15	:	Perbandingan Realisasi Capaian IKU Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024	54
3.16	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase IKU Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tahun 2024	58
3.17	:	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Warisan Cagar Budaya yang di Lestarkan Tahun 2024	59
3.18	:	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Warisan Cagar Budaya yang di Lestarkan Tahun 2023 dengan Tahun 2024	60
3.19	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Persentase Warisan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2024	64
3.20	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarkan Tahun 2024	65
3.21	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarkan Tahun 2023 dengan Tahun 2024	65
3.22	:	Perbandingan Realisasi IKU "Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarkan" Tahun 2021-2024 dengan Target RPJMD	66
3.23	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Tahun 2024	69
3.24	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang Tahun 2024	70
3.25	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang Tahun 2023 dengan Tahun 2024	71
3.26	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang Tahun 2024	74
3.27	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2024	75
3.28	:	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2023 dan Tahun 2024	75
3.29	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2024	78
3.30	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2023 dan Tahun 2024	79
3.31	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Persentase Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2024	81

3.32	:	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PDRB Per Kapita Tahun 2024	82
3.33	:	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja PDRB Per Kapita Tahun 2023 dan Tahun 2024	83
3.34	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024	89
3.35	:	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pengeluaran Per Kapita Tahun 2024	90
3.36	:	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Pengeluaran Per Kapita Tahun 2023 dan Tahun 2024	90
3.37	:	Perbandingan Target dan Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	93
3.38	:	Perbandingan Target dan Realisasi Rata - Rata Lama Sekolah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan 2024	94
3.39	:	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2023 s.d 2024	95
3.40	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2024	107
3.41	:	Target dan Realisasi Kinerja Opini BPK terhadap LKPD Tahun 2024	108
3.42	:	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Opini BPK terhadap LKPD Tahun 2023 dan Tahun 2024	109
3.43	:	Perbandingan Realisasi IKU Opini BPK terhadap LKPD Tahun 2021-2024 dengan Target RPJMD	110
3.44	:	Program dan Kegiatan Pendukung IKU Opini BPK terhadap LKPD Tahun 2024	111
3.45	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Opini BPK Atas LKPD Tahun 2024	113
3.46	:	Penghargaan dalam Pengelolaan Keuangan yang Diperoleh Pada Tahun 2024	114
3.47	:	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Tahun 2024	116
3.48	:	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Tahun 2023 dan 2024	116
3.49	:	Nilai Aspek Evaluasi SAKIP Tahun 2023 dan 2024	117
3.50	:	Perbandingan Realisasi IKU Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2021-2024 dengan Target RPJMD	117
3.51	:	Hasil Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2024	118
3.52	:	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2024	122
3.53	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2024	123
3.54	:	Target dan Realisasi Nilai Indeks Merit System Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	125
3.55	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Merit System Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan Tahun 2024	125
3.56	:	Nilai Sistem Merit Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	126

3.57	:	Perbandingan Realisasi IKU Indeks Merit System Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah	126
3.58	:	Target dan Realisasi Nilai Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	129
3.59	:	Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan Tahun 2024	129
3.60	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai Indeks SPBE Tahun 2024	136
3.61	:	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024	139
3.62	:	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan Tahun 2024	139
3.63	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2024	141
3.64	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024	144
3.65	:	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024	145
3.66	:	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan Tahun 2024	145
3.67	:	Perbandingan Realisasi Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2021-2024 dengan Target RPJMD	146
3.68	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024	148
3.69	:	Perbandingan Target dan Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	151
3.70	:	Perbandingan Target dan Realisasi UHH Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan Tahun 2024	151
3.71	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Kinerja UHH Tahun 2024	160
3.72	:	Perbandingan Target dan Realisasi Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	161
3.73	:	Perbandingan Target dan Realisasi Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan Tahun 2024	162
3.74	:	Perbandingan Target dengan Realisasi Prevalensi Stunting Tahun 2021-2024	162
3.75	:	Efisiensi Sumber Daya Indikator Kinerja Prevelensi Stunting	168
3.76	:	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2024	169
3.77	:	Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan Tahun 2024	170
3.78	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2024	178
3.79	:	Realisasi Investasi Menurut Sektor di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	179
3.80	:	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pertumbuhan Investasi Tahun 2024	180

3.81	:	Perbandingan Realisasi Persentase Pertumbuhan Investasi di Daerah Tahun 2023 dengan Tahun 2024	180
3.82	:	Perbandingan Realisasi IKU Persentase Pertumbuhan Investasi di Daerah Tahun 2021-2024 dengan Target RPJMD	181
3.83	:	Efisiensi Sumberdaya Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Investasi Tahun 2024	185
3.84	:	Persentase Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB Tahun 2023 dan Tahun 2024	187
3.85	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB Tahun 2024	187
3.86	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB Tahun 2023 dan Tahun 2024	188
3.87	:	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah	189
3.88	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	194
3.89	:	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024	194
3.90	:	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024	195
3.91	:	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024	195
3.92	:	Prestasi dan Penghargaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023-2024	196

DAFTAR GAMBAR

1.1	:	Peta Administrasi Kabupaten Padang Pariaman	4
1.2	:	Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman	10
2.1	:	Visi, Misi, dan Tujuan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026	24
3.1	:	Proses Belajar Mengajar di Lembaga Pendidikan Al-Qur'an	43
3.2	:	Pemberian Beasiswa/Reward kepada Hafizh/Hafizhah	45
3.3	:	Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Padang Pariaman Tahun 2024 di Aula FKUB Kabupaten Padang Pariaman	50
3.4	:	FGD Forkopimda	56
3.5	:	Rapat Koodinasi dengan OPD terkait	56
3.6	:	Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Padang Pariaman	57
3.7	:	Warisan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2024	63
3.8	:	Batagak Kudo-Kudo	68
3.9	:	Katumbak	68
3.10	:	Rehabilitasi Jalan	73
3.11	:	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	77
3.12	:	Pembahasan Lintas Sektor Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang di Kementerian ATR/BPN	81
3.13	:	Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Terkait	86
3.14	:	Pemantauan Harga Kebutuhan Sembilan Bahan Pokok Ke Pasar	87
3.15	:	Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	87
3.16	:	Zoom Meeting Rapat Koordinasi Tentang Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024	88
3.17	:	Kegiatan Bazar di Sejumlah Pasar	88
3.18	:	<i>High Level Meeting</i> (HLM) Mengenai Upaya Pengendalian Inflasi Menjelang Natal dan Tahun Baru 2024	88
3.19	:	Proses Jual Beli Masyarakat Pada Salah Satu Pasar di Kabupaten Padang Pariaman	92
3.20	:	Kegiatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	97
3.21	:	Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Non Formal	98
3.22	:	Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik	99
3.23	:	Inovasi Gerakan Militer	99
3.24	:	Inovasi Upaya Prima	100

3.25	:	Inovasi SIRATU BACA	100
3.26	:	Inovasi Cetar Membahana	100
3.27	:	Inovasi Belafrend	101
3.28	:	Inovasi Siswa Bersih dari Narkoba (BERSINAR)	101
3.29	:	Inovasi Proppela	102
3.30	:	Inovasi Simpatik	102
3.31	:	Inovasi Lekat	102
3.32		Peningkatan Akses Pendidikan	103
3.33		Inovasi Rampak	105
3.34	:	Inovasi SIMPELS	105
3.35	:	Inovasi Jumpa Berlian	105
3.36	:	Opini WTP atas LKPD Tahun 2024	114
3.37	:	Peringkat Kedua Pemerintah Daerah dengan Kinerja Pengelolaan Dana Desa terbaik dari KPPN Padang	114
3.38	:	Penghargaan Terbaik VI dalam Ketepatan Penyetoran Iuran Wajib Pegawai (IWP 8%), Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Iuran program Jaminan Kematian (JKM) Tahun 2024 dari PT. Taspen	115
3.39	:	Kick Off Meeting Evaluasi SAKIP Tahun 2024	115
3.40	:	Coaching Clinic Penyesuaian Pohon Kinerja Dan Dokumen Perencanaan Seluruh Perangkat Daerah Se- Kabupaten Padang Pariaman	119
3.41	:	Rapat Koordinasi Pengembangan Aplikasi SIMAK Kinerja Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	119
3.42	:	Gladi Presentasi SAKIP Kepala Perangkat Daerah	119
3.43	:	Pengembangan Aplikasi SIMAK Kinerja Kabupaten Padang Pariaman	120
3.44	:	Pelaksanaan In-Depth Interview Evaluasi SAKIP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	121
3.45	:	Kabupaten Padang Pariaman menerima Predikat SAKIP BB “Sangat Baik” pada Acara SAKIP AWARD Tahun 2024	123
3.46	:	Pelaksanaan Seleksi Terbuka terhadap Jabatan Eselon II	128
3.47	:	Pelaksanaan Ujian Dinas	128
3.48	:	Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Eselon II, III, IV dan Pejabat Fungsional	128
3.49	:	FGD Pembinaan Statistik Sektoral, Metadata, Rekomendasi Statistik, Peningkatan Standar Pelayanan, dan Finalisasi Penyusunan Publikasi	131
3.50	:	Rakor OPD se-Padang Pariaman bersama Bupati guna Pemenuhan Target SPBE Pemkab. Padang pariaman	132
3.51	:	Evaluasi Penyelenggaraan Smart City Kabupaten Padang Pariaman di KemenPAN RB	132
3.52	:	Penghargaan Kabupaten Terinformatif pada Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik	137

3.53	:	Bupati Padang Pariaman Menerima Anugerah Sahabat Pers Indonesia, Sebagai Penghargaan atas Bukti Harmonisasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Insan Pers	137
3.54		Pendampingan dan Evaluasi Internal PEKPPP	143
3.55	:	Sosialisasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	143
3.56	:	Publikasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	143
3.57	:	Monev dan Pembinaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	148
3.58	:	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	148
3.59	:	Penganugrahan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	149
3.60	:	Pembangunan Pustu Batu Mangaum Sungai Garinggiang	154
3.61	:	Pembangunan Pustu Durian Jantuang Batu Basa	154
3.62	:	Uji Fungsi <i>Vaccine Refrigerator</i>	154
3.63	:	Penerimaan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Pada Penugasan Khusus Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	155
3.64	:	Pemeriksaan USG di Puskesmas	156
3.65	:	Kegiatan AMP	156
3.66	:	Monitoring dan Evaluasi PIS-PK	157
3.67	:	Kegiatan Nagari Siaga Aktif	158
3.68	:	Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Tahun 2024	160
3.69	:	Penurunan Bumil KEK	163
3.70	:	Pemberian Tablet MMS	164
3.71	:	Pemberian PMT Pada Balita	165
3.72	:	Pelaksanaan Intervensi Serentak Bagi Petugas Gizi, Pengelola Anak, PJ Promkes dan Bidan Desa di Wilayah Kerja Puskesmas Ulakan	166
3.73	:	Rakor Rencana Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Intervensi Serentak Stunting	166
3.74	:	Pemberian PMT Berbahan Pangan Lokal Bagi Balita Yang Bermasalah Gizi	166
3.75	:	Pelaksanaan Pos Gizi dengan Dana Desa di Bawah Binaan Puskesmas	167
3.76	:	Penyerahan Bantuan Permakanan untuk Lansia dan Disabilitas	175
3.77	:	PPKS yang Menerima Bantuan Usaha	176
3.78	:	Bantuan Sosial Korban Rumah terbakar An. Ibu Nur Asni di Nagari Sikabu Bukik Kecamatan Lubuk Alung, Hadir Wali Nagari, Ketua Bamus, dan Tagana	176
3.79	:	Penyerahan Bantuan Bahan Makanan dan Logistik pada Korban Bencana Longsor di Kecamatan V Koto Kampung Dalam	177
3.80	:	TAGANA Masuk Sekolah (TMS) di SMP 2 Nan	177

3.81	:	Bimbingan Teknis /Sosialisasi Perizinan Berusaha Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Padang Pariaman	184
3.82	:	Pendampingan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Pengimputan LKPM Untuk Melaporkan Realisasi Investasinya ke dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	185
3.83	:	Pendampingan Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengalami Permasalahan dalam Pengurusan Izin dan Peralihan Aplikasi terkait LKPM Menggunakan Aplikasi OSS (Online Single Submission)	185
3.84	:	Penyaluran Bantuan Bibit Tanaman Dan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	193
3.85	:	Kegiatan Pemberian Bantuan Mesin Tempel dan Perahu	193
3.86	:	Kegiatan Pendataan dan fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	193
3.87	:	Penghargaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan 2024	199

DAFTAR GRAFIK

1.1	: Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 – 2024	6
1.2	: Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Berlaku Tahun 2021-2024	7
1.3	: Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Konstan Tahun 2021-2024	7
1.4	: Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2024	8
3.1	: Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah Tahun 2021-2024	43
3.2	: Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	49
3.3	: Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tahun 2021-2024	55
3.4	: Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Kinerja Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarkan Tahun 2021-2024	61
3.5	: Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang Tahun 2021-2024	71
3.6	: Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2021-2024	76
3.7	: Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2021-2024	79
3.8	: Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi PDRB Per Kapita Tahun 2021-2024	83
3.9	: Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait PDRB Per Kapita Tahun 2024	84
3.10	: Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Pengeluaran Per Kapita Tahun 2021-2024	91
3.11	: PPerbandingan Realisasi Kinerja Pengeluaran Per Kapita Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2024	91
3.12	: Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2021-2024	94
3.13	: Perbandingan Target dan Realisasi Rata - Rata Lama Sekolah Padang Pariaman dengan Realisasi Provinsi dan Nasional Tahun 2024	96
3.14	: Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indeks SPBE Tahun 2021-2024	130
3.15	: Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks SPBE Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2024	131
3.16	: Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021-2024	140

3.17	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Kabupaten dan Provinsi Tahun 2024	140
3.18	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Kabupaten dan Provinsi Tahun 2024	146
3.19	:	Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Usia Harapan Hidup Tahun 2021-2024	152
3.20	:	Capaian Kinerja Usia Harapan Hidup Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2024	152
3.21	:	Perbandingan Capaian UHH 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan 2024	153
3.22	:	Angka Kematian Ibu Tahun 2021-2024	155
3.23	:	Indeks Keluarga Sehat Tahun 2021-2024	157
3.24	:	Nagari Siaga Aktif Tahun 2021-2024	158
3.25	:	Persentase Ibu Hamil KEK Tahun 2024	163
3.26	:	Ibu Hamil Anemia Tahun 2024	164
3.27	:	ASI Eksklusif Tahun 2024	165
3.28	:	Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Tingkat Kemiskinan Tahun 2021-2024	170
3.29	:	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tingkat Kemiskinan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2024	171



KRAMBIE Festival

Kreatif Center Malibou Anai
19-21 DESEMBER 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. *Good Governance* and *Clean Government* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menindaklanjuti amanat peraturan perundangan tersebut serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dengan bertitik tolak pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjelaskan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan serta dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

1.2 GAMBARAN UMUM

1.2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Padang Pariaman merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil kedua di Sumatera Barat setelah Kabupaten Tanah Datar yaitu sebesar 1.343,09 km² atau sebesar 3,2 persen dari luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Padahal dulunya kabupaten ini merupakan kabupaten dengan luas terbesar di Sumatera Barat sebelum diperluasnya Kota Padang pada tahun 1980 serta pemekaran Kabupaten Mentawai pada tahun 1999 dan Kota Pariaman pada tahun 2002.

Secara administrasi Kabupaten Padang Pariaman memiliki batas wilayah administratif, yaitu :

Sebelah Utara	: Kabupaten Agam
Sebelah Selatan	: Kota Padang
Sebelah Timur	: Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok
Sebelah Barat	: Kota Pariaman dan Samudera Indonesia

Secara astronomis terletak antara 0° 19' 15,68" - 0° 48' 59,868" Lintang Selatan dan antara 99° 57' 43,325" - 100° 27' 28,94" Bujur Timur. Kabupaten Padang Pariaman memiliki 17 kecamatan yaitu Batang Anai, Lubuak Aluang, Sintuak Toboh Gadang, Ulakan Tapakih, Nan Sabaris, Anam Lingkuang, 2x11 Anam Lingkuang, 2x11 Kayu Tanam, VII Koto, VII Koto Patamuan, VII Koto Padang Sago, V Koto, V Koto Timur, Sungai Limau, Batang Gasan, Sungai Garinggiang, dan IV Koto Aua Malintang. Tercatat bahwa Kecamatan 2x11 Kayu Tanam memiliki wilayah paling luas dengan luas sebesar 188,55 km² dan wilayah dengan luas terkecil terdapat pada Kecamatan Nan Sabaris dengan luas sebesar 23,01 km² . Kabupaten Padang Pariaman memiliki pantai yang luas dengan panjang garis pantai sepanjang 42,11 km Kemudian rata-rata ketinggian wilayahnya berada pada kisaran 0-1.925 meter dari permukaan laut. Selain memiliki pantai yang panjang Kabupaten Padang Pariaman memiliki 2 pulau yang terletak di Kecamatan Batang Anai dan Ulakan Tapakih serta dilewati oleh 12 sungai.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki jumlah curah hujan yang tinggi. Sepanjang Tahun 2024 tercatat rata-rata jumlah curah hujan dari Stasiun Meteorologi Minangkabau dan Stasiun Klimatologi Padang Pariaman sebanyak 5627,30 mm/tahun dengan rata-rata jumlah hari hujan dari kedua stasiun tersebut sebanyak 312 hari. Bulan Mei tercatat sebagai bulan dengan curah hujan tertinggi yaitu dengan rata-rata 616,55 mm/bulan dan rata-rata jumlah hari hujan tertinggi dari kedua stasiun ada pada bulan Desember, yaitu sebanyak 31 hari terjadi hujan.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki 17 Kecamatan, 103 Nagari dan 600 Korong sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016. Luas wilayah dan jumlah nagari setiap kecamatan berbeda- beda, dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

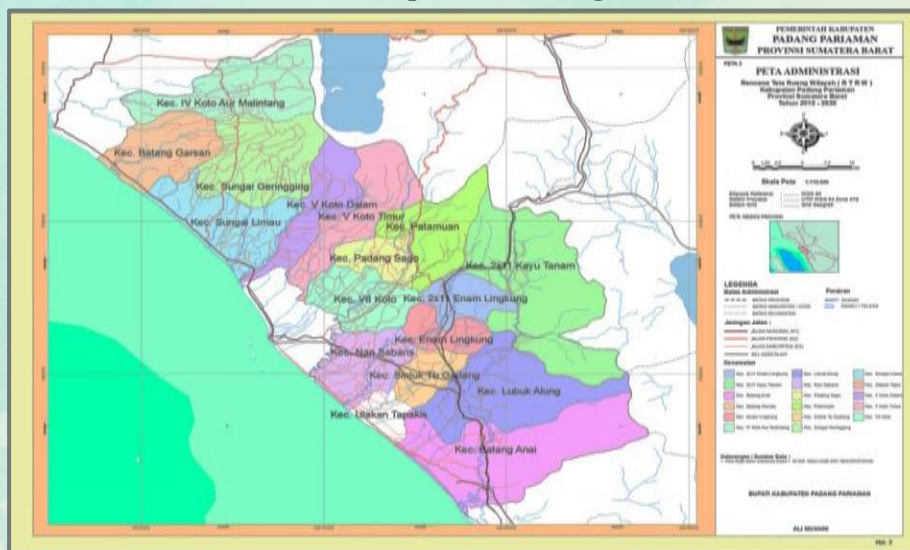
Tabel 1.1
Luas Wilayah Per Kecamatan, Jumlah Nagari dan Korong
di Kabupaten Padang Pariaman

No.	Kecamatan	Luas (km2)	Jumlah Nagari	Jumlah Korong
1	Batang Anai	164,33	8	52
2	Lubuak Aluang	124,76	9	52
3	Sintuak Toboh Gadang	32,65	5	29
4	Ulakan Tapakih	23,01	8	53
5	Nan Sabaris	66,19	9	46
6	2x11 Anam Lingkuang	40,64	3	12
7	Anam Lingkuang	34,28	5	27
8	2x11 Kayu Tanam	188,55	4	21
9	VII Koto	64,14	12	66
10	Patamuan	77,95	6	41
11	Padang sago	34,93	6	24
12	V Koto Kampuang Dalam	66,68	8	49
13	V Koto Timur	66,79	4	28
14	Sungai Limau	90,36	4	28
15	Batang Gasan	76,26	3	15
16	Sungai Garinggiang	107,73	4	27
17	IV Koto Aua Malintang	84,29	5	30
	Jumlah	1.343,56	103	600

Sumber: Padang Pariaman Dalam Angka, 2024

Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam merupakan Kecamatan dengan wilayah terluas yakni 188,55 Km2 sedangkan Kecamatan Ulakan Tapakih merupakan kecamatan dengan luas terkecil, yakni 23,01 Km2. Kecamatan yang paling banyak memiliki nagari adalah Kecamatan VII Koto dengan 12 (dua belas) Nagari, sedangkan kecamatan yang paling sedikit memiliki nagari adalah Kecamatan 2 X 11 Anam Lingkuang dan Batang Gasan yang masing-masing hanya terdiri dari 3 (tiga) nagari.

BAB I PENDAHULUAN



6	V KOTO KAMPUANG DALAM	12.586	12.300	24.886
7	SUNGAI GARINGGIANG	17.166	16.943	34.109
8	SUNGAI LIMAU	15.827	15.443	31.260
9	IV KOTO AUA MALINTANG	11,099	11,209	22.308
10	ULAKAN TAPAKIH	10.988	10.773	21.761
11	SINTUAK TOBOH GADANG	10.509	10.530	21.039
12	PADANG SAGO	4.664	4.742	9.406
13	BATANG GASAN	6.017	5.791	11.808
14	V KOTO TIMUR	7.809	7.696	15.505
15	2 X 11 KAYU TANAM	14.888	14.666	29.554
16	PATAMUAN	9.293	9.249	18.542
17	ANAM LINGKUANG	10.784	10.853	21.637
	JUMLAH	230.615	227.695	458,310

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, Kecamatan Batang Anai merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 56.656 jiwa, sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Padang Sago dengan jumlah 9.406 jiwa.

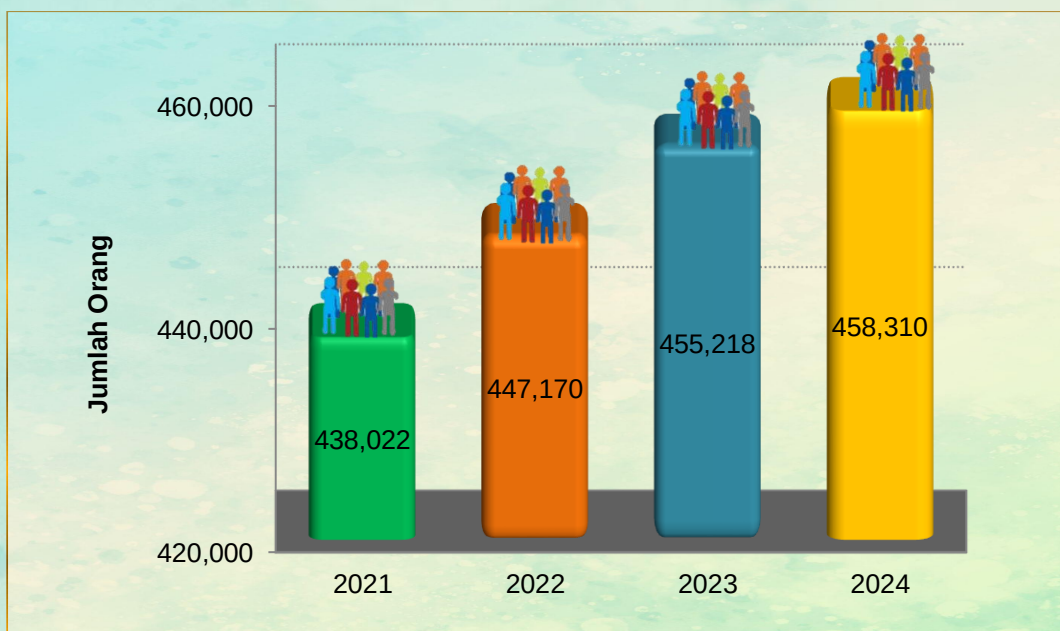
Jika dilihat perkembangan penduduk 4 tahun terakhir diketahui bahwa penduduk Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan peningkatan dari 438.022 pada tahun 2021 menjadi 458.310 pada tahun 2024. Untuk laju perkembangan penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3
Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2021 – 2024

Tahun	Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM 2)
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			
2021	218.717	219.305	438.022	0,78	99,73	326
2022	223.792	223.378	447.170	2,09	100,19	333
2023	228.417	226.801	455.218	1,73	100,71	339
2024	230.615	227.695	458,310	1,73	100,91	342

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Grafik 1.1
Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2021-2024

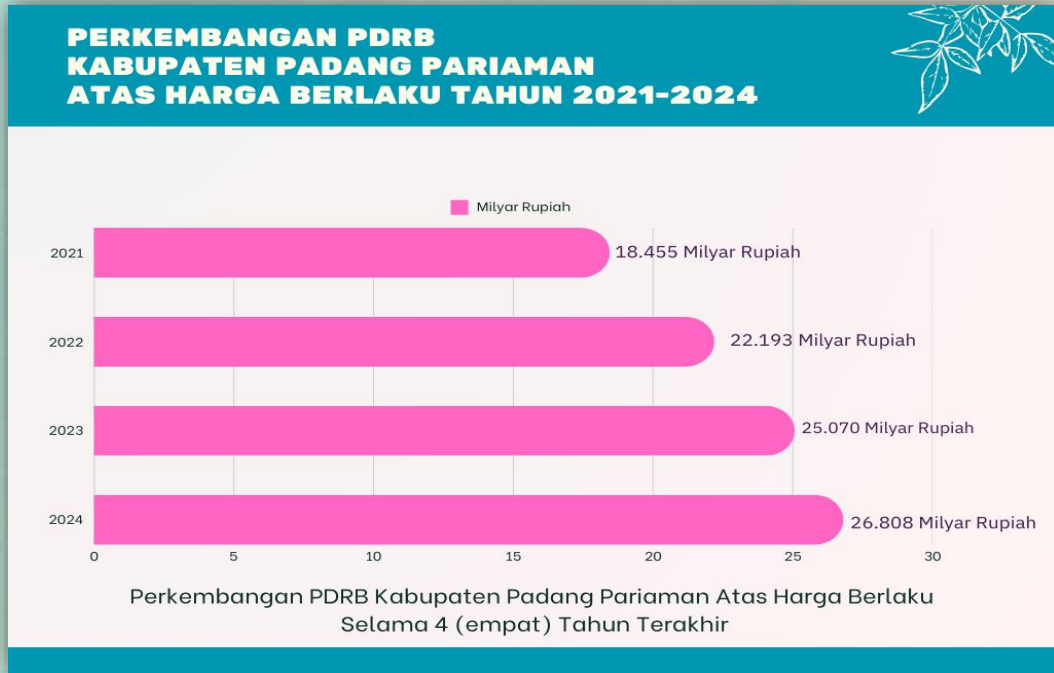


Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2025

1.2.3 Produk Domestik Regional

Produk Domestik Regional Bruto menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Dalam penyusunan PDRB dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu menurut lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Pada Tahun 2024, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Padang Pariaman sebesar 26.808,95 milyar rupiah, sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2024 (ADHK) terlihat sebesar 14.369,24 milyar rupiah. Nilai tersebut naik dibanding tahun sebelumnya karena adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada 2024 sebesar 4,57 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yang bernilai 5,46 persen. Pertumbuhan terbanyak terjadi pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; dan jasa lainnya dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 8,18 persen dan 7,15 persen. Sedangkan Perkembangan lapangan usaha berdasarkan PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas harga berlaku dan konstan ini dapat dilihat pada Grafik 1.2 dan Grafik 1.3 berikut ini :

Grafik 1.2
Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman
Atas Harga Berlaku Tahun 2021-2024



Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2025

Grafik 1.3
Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman
Atas Harga Konstan Tahun 2021-2024



Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2025

1.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Laju dari pertumbuhan ekonomi ini dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan data Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 sebesar 4,57 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yang bernilai 5,46. Pertumbuhan terbanyak terjadi pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; dan jasa lainnya dengan laju pertumbuhan masingmasing sebesar 8,18 persen dan 7,15 persen. Sedangkan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan terendah adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan pertumbuhan sebesar 1,91 persen.

Grafik 1.4
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2024



Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2025

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

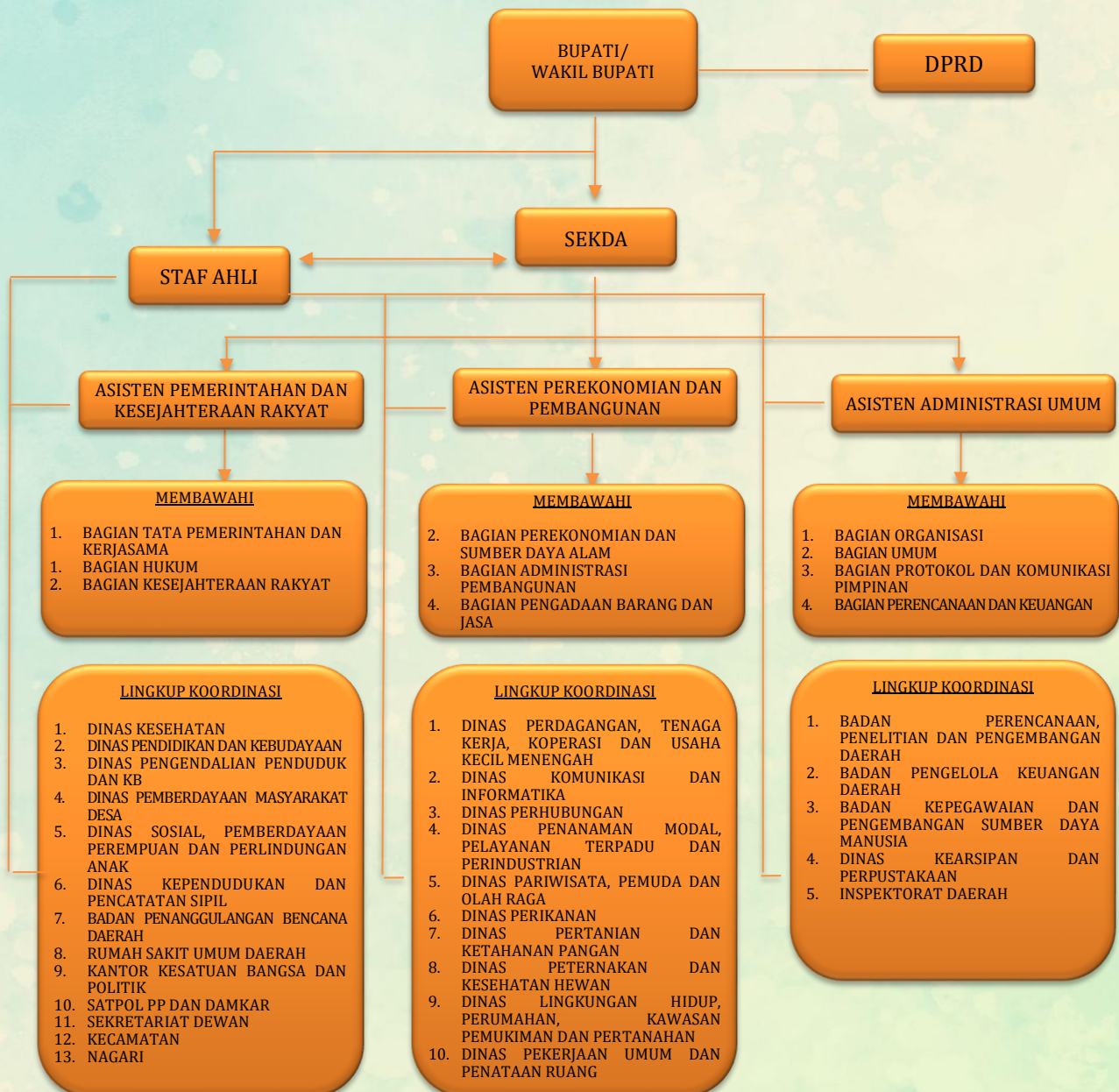
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki struktur organisasi yang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh :
 - Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Bagian Hukum
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan dibantu oleh :
 - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - Bagian Administrasi Pembangunan
 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Asisten Administrasi Umum dibantu oleh :
 - Bagian Umum
 - Bagian Organisasi
 - Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan
 - Bagian Perencanaan dan Keuangan
- d. Staf Ahli terdiri dari :
 - Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
 - Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
 - Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota terdiri dari :
 - a. Bagian Fasilitas Fungsi Penganggaran dan Pengawasan
 - b. Bagian Umum
 - c. Bagian Hukum dan Persidangan
3. Inspektorat
4. Badan Daerah, terdiri dari :
 - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - c. Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Kesehatan
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - d. Dinas Perhubungan
 - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - f. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - g. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 - h. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
 - i. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
 - j. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - k. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
 - l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - m. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- o. Dinas Perikanan
- p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- q. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8. 17 (Tujuh Belas) Kecamatan dan 103 (Seratus Tiga) Nagari.

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas sangat menentukan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2024, jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang sebanyak 4.931 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.262 orang (25,59%) dan perempuan sebanyak 3.669 orang (74,41%).

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	SD/Sederajat	4	2	6
2.	SLTP/Sederajat	27	4	31
3.	SLTA/Sederajat	187	104	291
4.	Diploma I	3	14	17
5.	Diploma II	24	72	96
6.	Diploma III	70	601	671
7.	Diploma IV/Strata I	752	2.649	3.401
8.	Strata II	192	223	415
9.	Strata III	3	0	3
Jumlah		1262	3669	4931

Sumber : BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Berdasarkan Tabel 1.5 di atas diketahui bahwa PNS di Kabupaten Padang Pariaman sebagian besar memiliki tingkat pendidikan Diploma IV/Strata I dengan jumlah 3.401 orang (61,67%), diikuti Diploma III sebanyak 671 orang (13,61%), Strata II sebanyak 415 orang (8,42%) dan Strata III sebanyak 3 orang (0,06%). Tingkat pendidikan PNS ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Secara umum, kualitas PNS di Kabupaten Padang Pariaman sudah sangat baik dengan banyaknya PNS yang berpendidikan di atas SLTA sederajat mencapai 4.603 orang (93,35%).

1.5 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

1.5.1 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa yang akan datang. RPJMD 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan akan dijabarkan pada perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dalam RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Kebudayaan

Tata kehidupan masyarakat Minangkabau telah terpola dengan sebuah filosofi sosial yaitu adaik basandi syara'-syara' basandi kitabullah. Khazanah budaya Minangkabau, agama dan budaya merupakan dua dimensi nilai inti yang saling bertautan satu sama lain. Kedua dimensi nilai inilah yang membentuk karakter masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan nilai utama yang diharapkan mampu melahirkan harmonisasi antara kehidupan yang agamais dan kehidupan yang beradab dan berbudaya. Dalam konteks dan dimensi budaya, keterbukaan wilayah berakibat masuknya pengaruh-pengaruh negatif dalam kehidupan masyarakat. Selain itu eksistensi dan peran kelembagaan adat pada tingkat nagari masih lemah dan bahkan semakin memudar, hal ini dapat kita lihat dari masih kurangnya peran mamak terhadap kemenakan, berkurangnya musyawarah dan mufakat adat dan kaum dalam pengambilan kebijakan, serta masih seringnya terjadi tingkah laku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan falasah ABS SBK tersebut. Rendahnya pengamalan dan aplikasi nilai-nilai ajaran agama dan akhlaq masyarakat, apalagi dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perubahan pola dan tingkah laku masyarakat sehingga tidak sejalan lagi dengan ajaran dan kaedah agama serta norma-norma adat istiadat Minangkabau. Pembangunan jati diri masyarakat melalui pendidikan agama dan wawasan kebangsaan guna mengatasi dampak negatif dan infiltrasi budaya global dan krisis global.

Isu penting lainnya terkait kerukunan, ketentraman dan ketertiban selama lima tahun kedepan diperhadapkan pada sejumlah tantangan berupa peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Selain itu juga tantangan ke depan yang dihadapi adalah kecenderungan munculnya bentuk kerawanan/kejahatan baru yang dipicu oleh terbukanya wilayah dalam rangka pembangunan ekonomi yang memudahkan mobilitas barang dan manusia seperti penggunaan obat-obatan psikotropika. Dengan demikian, diperlukan langkah antisipatif dan koordinatif pada bidang ketentraman dan ketertiban untuk mencegah dan menekan akses pembangunan ekonomi terhadap munculnya tindak kriminal. Isu lainnya terkait pembangunan kebudayaan adalah kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan

isu dalam pembangunan kualitas perempuan, dimana masih terjadi kesenjangan pada laki-laki dan perempuan pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian dalam pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan kabupaten ramah perempuan dan layak anak.

2. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Publik Secara Berkelanjutan

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sarana dan prasarana publik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur daerah terkait infrastruktur transportasi darat, infrastruktur sumber daya air (infrastruktur irigasi, sumber air baku dan infrastruktur pengendalian banjir), memenuhi fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan dan kemandirian wilayah. Selain itu juga dihadapkan pada penyediaan air bersih, irigasi, listrik dan telekomunikasi guna mendukung lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat. Isu penting lainnya yang perlu memperoleh perhatian, yaitu : (i) konektifitas, pemerataan antar daerah dan integrasi sistem transportasi, (ii) meningkatnya produksi persampahan membutuhkan respon terhadap peningkatan cakupan pelayanan sampah dengan pembangunan TPA, dan pengolahan sampah berbasis teknologi. Pengelolaan sampah menjadi perhatian kabupaten, karena kesadaran masyarakat dalam mengolah dan mengelola sampah masih kurang

3. Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata dan Ekowisata

Pembangunan sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dihadapkan dengan sejumlah isu-isu strategis. Pertama, gejolak harga komoditas pertanian sangat menentukan terhadap kesejahteraan petani yang tercermin dari nilai tukar petani.. Sektor pertanian berhadapan ketidakpastian berkaitan dengan lingkungan hidup, berupa bencana alam, perubahan iklim, maupun serangan hama. Sejumlah isu-isu penting terkait dengan produk pertanian yang juga perlu memperoleh perhatian, yaitu: (a) meningkatnya tuntutan kepada produk pertanian berkualitas, berstandar dan bersertifikasi, termasuk produk pertanian yang sehat dari pertanian organik, (b) mulai tumbuhnya pola konsumsi sehat yang meningkatkan permintaan terhadap produk-produk pertanian berupa buah-buahan, sayuran, tanaman obat. Diikuti pula perubahan gaya hidup yang meningkatkan permintaan terhadap produk pertanian seperti kopi, teh, dan susu segar, (c) tumbuhnya angkatan kerja pedesaan yang harus disikapi dengan penciptaan agroindustri pedesaan, regenerasi petani menjadi petani muda atau milenial, dan pengembangan kewirausahaan pertanian di daerah pedesaan. Sektor perikanan dihadapkan pada terbatas sarana dan prasarana perikanan tangkap. Perkembangan sektor perdagangan dan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman

berhadapan dengan trend tumbuh cepatnya perdagangan elektronik yang diperkirakan akan semakin meningkat dalam lima tahun ke depan. Keberadaan perdagangan elektronik melalui berbagai aplikasi belanja daring dengan berbagai strategi promosi dan pemasarannya dapat mengancam daya saing sektor perdagangan dan UMKM Kabupaten Padang Pariaman. Dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman diperlukan ekspose yang lebih luas. Hal ini karena pasar pariwisata Kabupaten Padang Pariaman yang masih lokal. Pengembangan pariwisata berhadapan dengan isu daya dukung dan akses infrastruktur menuju dan sarana prasarana objek destinasi wisata. Daya dukung dan manfaat sosial masyarakat sekitar kawasan pariwisata perlu menjadi perhatian penting. Perkembangan pariwisata juga perlu didukung dengan penciptaan ekosistem ekonomi kreatif dan peningkatan inovasi (kuliner, fashion, kerajinan tangan) dan standarisasi bagi pelaku ekonomi kreatif.

4. Pembangunan Manusia

Dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia melalui pembangunan manusia, sejumlah isu-isu strategis pada bidang kesehatan yaitu pandemi covid-19 yang mulai mereda masih tetap mengancam kondisi kesehatan dan risiko kematian bagi penduduk, namun berhadapan dengan mulai melonggarnya penerapan protokol kesehatan meskipun pelaksanaan vaksinasi telah mulai meluas, menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan test, tracing dan treatment (pengujian, pelacakan, dan penyembuhan). Peningkatan akses kepada layanan dasar dan pemerataan layanan kesehatan antar kecamatan masih menjadi persoalan yang membutuhkan upaya yang lebih giat. Pendekatan preventif melalui pola hidup bersih dan sehat serta kesehatan lingkungan yang belum sepenuhnya diterapkan masyarakat membutuhkan semakin giatnya promosi upaya kesehatan masyarakat. Secara umum permasalahan pendidikan yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja pendidikan berupa angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka melanjutkan sekolah pada semua jenjang pendidikan, kualitas guru, proses belajar mengajar, ketersediaan sarana prasarana pendidikan. Berkaitan dengan permasalahan pendidikan tersebut, maka pembangunan pendidikan selama lima tahun ke depan diperhadapkan pada tantangan berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka peningkatan akses dan pemerataan pendidikan khususnya pada wilayah-wilayah yang potensial jumlah peserta didiknya dan belum tersedia fasilitas sekolah. Disamping itu juga diperhadapkan pada upaya-upaya dalam rangka perbaikan proses belajar mengajar yang lebih berkualitas dan perbaikan tata kelola pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Dengan demikian maka pembangunan pendidikan lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar, angka melanjutkan sekolah, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan

proses belajar mengajar, meningkatkan sarana prasarana pendidikan (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru) untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang semakin meningkat serta meningkatkan luaran pendidikan SD dan SLTP.

5. Tata kelola pemerintahan

Melakukan reformasi birokrasi berarti melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Dengan ini diharapkan kinerja pemerintah dapat lebih optimal sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih maksimal, efektif dan efisien. Reformasi birokrasi ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan birokrasi. Tata kelola pelayanan publik juga mensyaratkan pengendalian dan pengawasan bagi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Untuk itu dibutuhkan kapasitas dan SDM pemerintahan dalam adopsi dan implementasi pelayanan publik secara elektronik. Begitupula pemanfaatan beragam media termasuk kanal sosial media bagi keterbukaan informasi publik dan kegiatan pemerintahan.

6. Optimalisasi Pelayanan Dasar

Masyarakat belum mendapat pelayanan dasar secara maksimal dalam bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, air minum, pengelolaan limbah, penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan dampak program pembangunan. Pelayanan dasar lain adalah pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat serta penanganan masalah sosial.

7. Peningkatan PAD dan Investasi Daerah

Salah satu sumber keuangan daerah yang dapat dioptimalkan penggalannya adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh berbagai variabel makro ekonomi. Ada beberapa indikator makro ekonomi yang secara teoritis mempengaruhi PAD, diantaranya: (1) struktur ekonomi daerah; (2) investasi (PMDN dan PMA); dan (3) pengeluaran pemerintah. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya dalam lima tahun ke depan untuk mengoptimalkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan dengan dengan arah kebijakan Intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun terakhir (2016-2020) adalah sebesar 15,61 persen. Padahal, untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, optimalisasi pajak ini sangat diperlukan. Oleh sebab itu, pajak juga menjadi perhatian khusus untuk dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. Belum optimalnya nilai investasi dan jumlah investasi yang ada di Kabupaten Padang Pariaman menjadi tantangan dalam pembangunan kedepan. Mempermudah

perijinan untuk investor adalah langkah kedepan dalam peningkatan investasi daerah.

1.5.2 Permasalahan Pembangunan

Pada pelaksanaan pembangunan periode 2016-2021 masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Hal tersebut menjadi bahan analisa dalam merumuskan isu strategis perencanaan dan prioritas permasalahan pembangunan pada awal pelaksanaan RPJMD periode 2021-2026. Beberapa prioritas permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman pada RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Prioritas Permasalahan Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Permasalahan Daerah	Isu Strategis
1.	Peningkatan Perekonomian Masyarakat Sektor Pertanian, Pariwisata, dan UMKM	a. Masih rendahnya produktivitas sub sektor tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan b. Belum optimalnya produksi hasil perikanan karena kualitas dan kuantitas benih dan induk masih rendah c. Peningkatan pendapatan petani/peternak d. Penerapan Pola Pangan Harapan (PPH) e. Belum optimalnya pemberdayaan petani pada sektor komoditi unggulan f. Hilirisasi produk komoditi unggulan yang sangat terbatas g. Diversifikasi pangan h. Rendahnya daya saing destinasi pariwisata Kabupaten Padang Pariaman i. Rendahnya daya saing produk pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) j. Jumlah penduduk miskin semakin meningkat k. Belum optimalnya pemanfaatan potensi nagari dalam pembangunan daerah	Produktifitas dan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan ekowisata
2.	Peningkatan	a. Minimnya promosi investasi	Peningkatan PAD dan

	ketepatan alokasi investasi dan sumber-sumber pendanaan.	b. Belum optimalnya integrasi investasi dengan pola ruang c. Belum optimalnya penggalian potensi dan pengembangan pajak dan retribusi daerah d. Kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan covid-19 terhadap penganggaran dan realisasi APBD	Investasi Daerah
3.	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan berbasis lingkungan dan tata ruang	a. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi seperti sarana prasarana lalu lintas keamanan transportasi meliputi fasilitas perlengkapan jalan/rambu, halte, trotoar, penerangan jalan umum, dan terminal b. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang belum optimal c. Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah masih rendah d. Pemenuhan sarana prasarana pengelolaan sampah belum optimal e. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana objek wisata unggulan f. Masih banyak ditemui perumahan dan permukiman kumuh g. Belum optimalnya penggunaan lahan yang sesuai dengan perencanaan tata ruang	Optimalisasi sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan Optimalisasi Pelayanan Dasar
4.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing	a. Mutu pendidikan yang masih tergolong rendah b. Mutu tenaga pendidik masih rendah (masih ada guru yang belum memenuhi kualifikasi) c. Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah d. Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah e. Kurangnya jumlah guru atau tenaga pendidik yang berstatus	Optimalisasi Pelayanan Dasar

		ASN	
		f. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	
		g. Belum optimalnya layanan kesehatan	
		h. Masih ditemukannya kasus stunting di Kabupaten Padang Pariaman	
		i. Rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH)	
		j. Masih tingginya kasus kematian ibu dan bayi serta gizi buruk	
		k. Masih tingginya tingkat perkawinan usia muda	
		l. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
		m. Masih rendahnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	
5.	Peningkatan kemandirian masyarakat tangguh bencana	a. Masih kurangnya regulasi dan koordinasi penanggulangan kebencanaan	Pembangunan Manusia
		b. Kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kebencanaan yang belum optimal	
		c. Pengembangan nagari tangguh bencana yang belum optimal	
		d. Pengelolaan kasus abrasi pantai yang belum optimal	
6.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis.	a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang belum optimal	Tata Kelola Pemerintahan
		b. Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah yang belum optimal	
		c. Belum optimalnya peningkatan kualitas manajemen keuangan daerah	
		d. Belum optimalnya peningkatan kualitas manajemen kinerja instansi pemerintah	
		e. Kualitas Pelayanan Publik yang masih rendah	
		f. Belum optimalnya	

		pengembangan e-gov dan implementasi smart city Kabupaten Padang Pariaman	
7	Peningkatan pengamalan ABS SBK dalam kehidupan bermasyarakat	a. Masih rendahnya kualitas kehidupan beragama	Pembangunan Kebudayaan
		b. Lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan belum berperan aktif dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama di daerah	
		c. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kerukunan dalam upaya menjaga dan mempertahankan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat	
		d. Belum optimalnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya daerah	
		e. Masih maraknya penyakit masyarakat dan permasalahan	

Sumber : RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024



BAB II **PERENCANAAN** **KINERJA**



alam rangka mendorong sistem Pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan berbasis kinerja, dengan mempertimbangkan tantangan, permasalahan, peluang dan isu-isu strategis, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui penetapan Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja untuk mencapai prestasi (*core area*) sebagai ukuran pencapaian tujuh Misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Ditetapkannya RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 menjadi dokumen acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diikuti dengan penetapan Indikator Kinerja Utama melalui Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 38/KEP/BPP/2024 Tanggal 18 Januari 2024 Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Pada dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Periode 2021-2026 sudah menjabarkan tiga pertanyaan dasar, yakni :

- 1) Apa yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun mendatang;
- 2) bagaimana cara mencapainya; dan
- 3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai.

2.1 VISI DAN MISI

2.1.1 VISI

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026, yaitu :

"PADANG PARIAMAN BERJAYA"

Visi "Padang Pariaman Berjaya" merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan menjadi Kabupaten terdepan dari Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Unggul **BERkelanjutan** : Menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju

selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

- **Religius** : Kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
- **SeJAhtera** : suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sector ekonomi, pendidikan, kesehatan dan social budaya.
- **Berbudaya** : suatu gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Sebagaimana diketahui, bahwa Visi merupakan arah Pembangunan atau kondisi masa depan yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Visi tersebut, harus bisa menjawab permasalahan Pembangunan Daerah atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Serta sejalan dengan visi dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

2.1.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan 7 (tujuh) misi yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 .

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, yang dapat dilihat atau diukur dari indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dapat digambarkan pada tabel 2.1 dan dibawah ini :

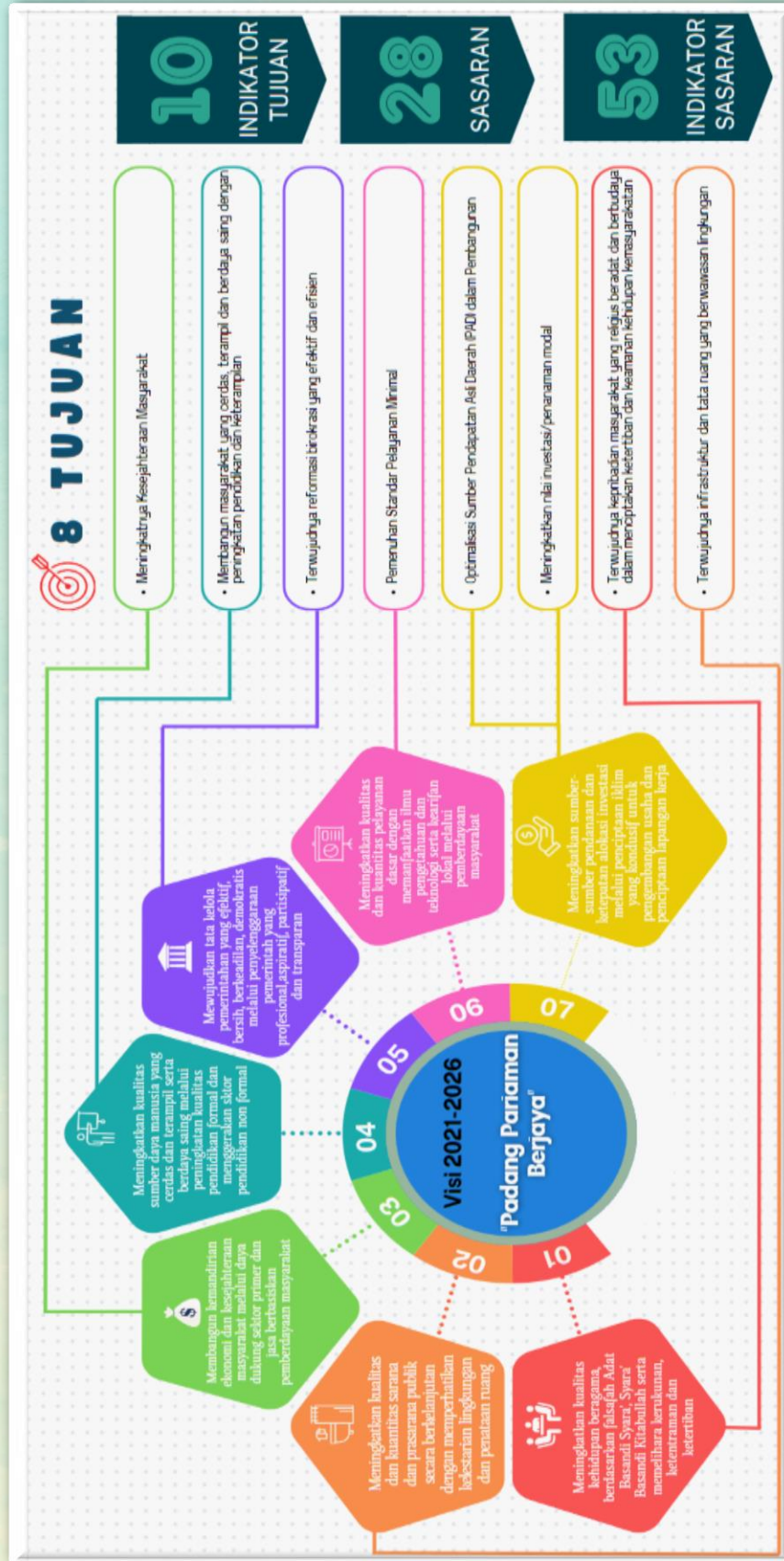
Tabel 2.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Visi : Padang Pariaman Berjaya (unggul BERkelanjutan, Religius, seJAhtera dan berbudaya)		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban umum.	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan umum.	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kebudayaan Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi

prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.	berwawasan lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Sumber daya Air Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang
Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata Berkurangnya jumlah penduduk miskin Peningkatan daya beli masyarakat Kemandirian Desa
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Birokrasi yang bersih dan akuntabel Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum Peningkatan pengelolaan air limbah domestik Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni Penguatan layanan kebencanaan Pengurangan resiko kebakaran Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat Peningkatan penanganan masalah sosial
Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.	Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan Meningkatkan nilai investasi/penanaman modal	Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman

Sumber : RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Periode 2021-2026

Gambar 2.1
Visi, Misi dan Tujuan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026



2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah kebijakan merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dirancang secara konseptual, realistis, analitik, dan komprehensif. Strategi yang akan diwujudkan dalam bentuk suatu kebijakan dan program merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi pembangunan dan arah kebijakan sangat erat kaitannya karena arah kebijakan pada dasarnya merupakan keputusan dan intervensi pemerintah untuk dapat melaksanakan strategi pembangunan yang telah disusun.



Dengan mengaitkan antara strategi dan arah kebijakan tersebut, maka pencapaian sasaran pembangunan akan menjadi lebih terjamin.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien guna mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan melalui Tujuh Misi maka strategi dan arah kebijakan dirumuskan terhadap aspek yang memberikan dampak besar dan mempunyai daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Selanjutnya hubungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada setiap tujuan dan sasaran pada masing-masing Misi dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Urusan		Perangkat Daerah
1.1	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama		Indeks Kesolehan Sosial (IKS)	1.1.1	Meningkatkan Kualitas Pemahaman Dan Pengalaman Ajaran Agama		Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	1.1.1.1	Meningkatkan nilai-nilai keimanan kepada masyarakat melalui dakwah dan pendidikan yang berfokus kepada pengamalan nilai-nilai agama	1.1.1.1.1	Penguatan kehidupan masyarakat agamais dan berbudaya	Tata	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah (Bag. Kesra)
				1.1.2	Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama		Indeks Umat Kerukunan Beragama (IKUB)	1.1.2.1	Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi muda.	1.1.2.1.1	Peningkatan kehidupan sosial yang harmonis dalam suasana multy culture		Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah (Bag. Kesra)
				1.1.3	Meningkatnya Ketertiban Umum/Stabilitas		Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah	1.1.3.1	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan	1.1.3.1.1	Penguatan wawasan kebangsaan, toleransi serta kemitraan dengan masyarakat dan instansi lainnya		Ketenteraman ketertiban umum perlindungan masyarakat	Kantor Kesbangpol
2.1	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Berbudaya		Indeks Pembangunan Kebudayaan	2.1.1	Meningkatnya Pelestarian Warisan Cagar Budaya		Persentase Warisan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	2.1.1.1	Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi	2.1.1.1.1	Peningkatan Pemahaman Sejarah, Seni tradisional dan Warisan Budaya		Kebudayaan	Disdikbud

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan		Urusan	Perangkat Daerah	
							muda.					
						Persentase Warisan Cagar Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan	2.1.1.2	Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi muda.	2.1.1.2.1	Peningkatan Pemahaman Sejarah, Seni tradisional dan Warisan Budaya	Kebudayaan	Disdikbud
3.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	3.1.1	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	3.1.1.1	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan	3.1.1.1.1	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas PUPR
						Persentase Ketaatan RTRW	3.1.1.3	Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	3.1.1.3.1	Penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas PUPR
						Persentase Irigasi dalam Kabupaten Kondisi Baik	3.1.1.4	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten	3.1.1.4.1	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas PUPR
4.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	4.1.1	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi	PDRB Income Per Kapita	4.1.1.1	Meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat	4.1.1.1.1	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perekonomian masyarakat	Penunjang	Sekretariat Daerah (Bag.Perekonomian & SDA)
						Pengeluaran Per	4.1.1.1	Meningkatkan	4.1.1.1.1	Peningkatan	Penunjang	Sekretariat

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Urusan		Perangkat Daerah	
							Kapita		produktifitas perekonomian masyarakat		kapasitas pelaku usaha perekonomian masyarakat				Daerah (Bag.Perekonomian & SDA)
5.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	5.1.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat		Rata-Rata Lama Sekolah	5.1.1.1	Meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan	5.1.1.1.1	Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi		Pendidikan		Disdikbud
6.1	Meningkatnya Implementasi reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	6.1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel		Opini BPK atas LKPD	6.1.1.1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	6.1.1.1.1	Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Terintegrasi		Penunjang		Seluruh perangkat daerah
								6.1.1.2	Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah	6.1.1.2.1	Peningkatan perencanaan pemanfaatan dan inventarisasi aset		Penunjang		Seluruh perangkat daerah
								5.1.1.3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan	6.1.1.3.1	Pengintegrasian perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan berbasis IT		Non urusan		Seluruh perangkat daerah
							Indeks Merit System	6.1.2.1	Meningkatkan profesionalitas aparatur daerah	6.1.2.1.1	Peningkatan kapasitas aparatur dan Penempatan Sumber Daya Aparatur sesuai Analisis Jabatan	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sekretariat Daerah)	BKPSDM		
														6.1.2.1.2	Peningkatan sistem manajemen kepegawaian

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan		Urusan	Perangkat Daerah	
								6.1.2.1.3	Peningkatan Budaya kerja yang profesional	dan pelatihan) Fungsi lain (kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan)	BKPSDM	
								6.1.2.2.1	Peningkatan sarana dan prasarana IT	Komunikasi dan informatika	Diskominfo	
										Komunikasi dan Informatika, fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sekretariat Daerah)	Diskominfo, Bag. Humas dan Protokoler	
										6.1.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik
				Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	6.1.3.1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	6.1.3.1.1	Peningkatan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sekretariat Daerah)			Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)

Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Urusan	Perangkat Daerah
7.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	7.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka usia harapan hidup	7.1.1.1	Meningkatkan Capaian SPM Bidang Kesehatan	7.1.1.1.1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
						7.1.1.2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.1.1.2.1	Peningkatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai standar	Kesehatan	Dinkes
						7.1.1.3	Meningkatkan Kualitas sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	7.1.1.3.1	Peningkatkan Pemenuhan Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	Kesehatan	Dinkes
						7.1.1.4	Meningkatkan Budaya Hidup Sehat	7.1.1.4.1	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kesehatan	Dinkes
				Prevalensi Stunting		7.1.1.5	Menurunkan angka prevalensi stunting	7.1.1.5.1	pemetaan program, kegiatan dan sumber pembiayaan terkait percepatan pencegahan anak kerdil (stunting) hingga tingkat Nagari	Kesehatan	Dinkes, DPPKB
								7.1.1.5.2	Percepatan penyusunan kebijakan dan melaksanakan kampanye perubahan perilaku dan	Kesehatan	Dinkes, DPPKB

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Perangkat Daerah	
					komunikasi antar pribadi untuk percepatan pencegahan anak kerdil			
					7.1.1.5.3 Peningkatan peran Nagari/Kelurahan dalam melakukan Konvergensi	Kesehatan	Dinkes, DPPKB, S eluruh Kecamatan dan Nagari	
8.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	8.1.1 Meningkatkan Investasi di Daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi	8.1.1.1 Meningkatkan promosi dan kemitraan investasi	8.1.1.1.1 Peningkatan promosi investasi di sektor primer dan jasa berbasis IT	Penanaman modal	DPMPTP
					8.1.1.2 Meningkatkan pelayanan investasi	8.1.1.2.1 Peningkatan kemudahan investasi berbasis IT dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang dan kearifan lokal	Penanaman modal	DPMPTP
			8.1.2 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB	8.1.2.1 Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi komoditi unggulan dan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman	8.1.2.1.1 Peningkatan pemberdayaan petani pada sektor komoditi unggulan	Pertanian	DistanKP
					8.1.2.2 Meningkatkan	8.1.2.2.2 Peningkatan	Perikanan	Dis. Perikanan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Perangkat Daerah
				hilirisasi produktivitas perikanan tangkap		Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap	
					8.1.2.2.3	Pengoptimalan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya terpadu	Dis. Perikanan
					8.1.2.2.3	Peningkatan sarana dan prasarana produksi pengolahan ikan serta perluasan pemasaran produk hasil perikanan	Dis. Perikanan
			8.1.2.3	Mengembangkan pusat perdagangan dan terminal terpadu sebagai sentra ekonomi masyarakat	8.1.2.3.1	Peningkatan sarana dan prasarana di pusat perdagangan	Disdagnakerk op & UKM
			8.1.2.4	Mengembangkan potensi wilayah dengan klasterisasi industri	8.1.2.4.1	Pengembangan Pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi wilayah masing-masing	

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan suatu tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Daerah. Dengan demikian, penetapan Perjanjian Kinerja ini menjadi target kinerja yang harus diwujudkan oleh Bupati. Perjanjian Kinerja ini setiap akhir tahunnya akan dijadikan sebagai bahan dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2024.

Sesuai dengan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/190/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 merekomendasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus melakukan penyempurnaan pohon kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan cara memastikan pohon kinerja telah mempertimbangkan *Critical Succes Factor* yang menjadi area atau aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) dapat terbangun secara cukup.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah melakukan *Coaching Clinic* Penyempurnaan Pohon Kinerja Daerah pada tanggal 8 s/d 10 Februari 2024. Dari hal tersebut, telah dirumuskan 14 (sebelas) Sasaran Strategis serta 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Bupati Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel. 2.3
Perjanjian Kinerja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Keterangan
			RPJMD	Perjanjian Kinerja	
1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Persentase Lembaga Pendidikan Al Quran yang Menghasilkan Hafizh dan Hafizah	28%	45%	Target Berubah
2	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	N/A	65,91%	Indikator Baru
3	Meningkatnya Ketertiban Umum/Stabilitas	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah	N/A	100%	Indikator Baru
4	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Persentase Warisan Cagar Budaya yang di Lestarikan	N/A	65,91%	Indikator Baru
		Persentase Warisan Cagar Budaya Tak Benda yang di	N/A	100%	Indikator Baru

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Keterangan
			RPJMD	Perjanjian Kinerja	
		Lestarikan			
5	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	69%	71%	Target Berubah
		Persentase Ketaatan RTRW	70%	75%	Target Berubah
		Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	62,72%	70%	Target Berubah
6	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi	PDRB Per Kapita	49,46 (Juta)	57,25 (Juta)	Target Berubah
		Pengeluaran Per Kapita	N/A	11,65 (Juta)	Indikator Baru
7	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata – Rata Lama Sekolah	8,29 Tahun	8,29 Tahun	Target Tetap
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	Target Tetap
		Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	BB	71 (BB)	Target Tetap
9	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Merit System	N/A	250	Indikator Baru
		Indeks SPBE	3,12	3,12	Target Tetap
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	4,57	4,57	Target Tetap
		Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	N/A	82,83	Indikator Baru
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	69,29 (Tahun)	69,90 (Tahun)	Target Berubah
		Prevalensi Stunting	N/A	14%	Indikator Baru
12	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	6,74%	5,80%	Target Berubah
13	Meningkatnya Investasi di Daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi	N/A	10%	Indikator Baru
14	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB	N/A	62%	Indikator Baru

Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman Periode 2021-2026



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A kuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023, akuntabilitas kinerja Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan informasi keberhasilan maupun kegagalan pencapaian 14 (empat belas) sasaran strategis dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama serta anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah digunakan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut.



Adapun 14 (empat belas) sasaran strategis dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama serta penanggung jawab data kinerja tiap-tiap Indikator Kinerja tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Penanggung Jawab

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah (Bagian Kesra), Kecamatan
2	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)
3	Meningkatnya Ketertiban Umum/Stabilitas	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Persentase Warisan Cagar Budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	
5	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	
		Persentase ketaatan terhadap RTRW	
6	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi	PDRB Per Kapita	Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian & SDA)

		Pengeluaran Per Kapita	
7	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	Seluruh Perangkat Daerah
		Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	Seluruh Perangkat Daerah
9	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Merit System	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Indeks SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Meningkatnya Investasi di Daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
14	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM

Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman, 2024

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *out put* dan *out come* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang

diharapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun rumus pengukuran kinerja tersebut sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara ***Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri*** dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.2
Pengukuran Dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
$x > 100$	Sangat Berhasil
$75 < x < 100$	Berhasil
$55 < x < 75$	Cukup Berhasil
$x < 55$	Kurang Berhasil

Sumber : Keputusan Kepala LAN & Permendagri

3.2 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja

dievaluasi dan dianalisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target yang ditetapkan.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghitung efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja. Efisiensi anggaran adalah selisih persentase realisasi anggaran ketika kinerja tercapai 100% atau lebih. Efisiensi kinerja adalah selisih antara capaian kinerja dengan capaian 100% target kinerja.
 Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan jumlah dari efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 pada 14 (empat belas) sasaran strategis dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel 3.3 :

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 dan
Penyesuaian Pohon Kinerja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban								
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama								
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	%	43	45	72	160	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	N/A	65	71,81	110,48	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Ketertiban	Persentase Penanganan	%	100	100	100	100	Sangat Berhasil

	Umum/Stabilitas	Konflik Sosial di Daerah						
Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Berbudaya								
4.	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Persentase Warisan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	85%	85,44	100	117,04	Sangat Berhasil
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	71,43	100	100	100	Sangat Berhasil
Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang								
Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat								
5.	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	%	65,63	71	68,00	95,77	Berhasil
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	68,50	70	66,77	95,39	Berhasil
		Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	72,86	75	82,10	109,47	Sangat Berhasil
Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat								
Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat								
6.	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	55,54	57,25	58,38	101,97	Sangat Berhasil
		Pengeluaran Per Kapita	Rp. Juta	11,432	11,653	11,756	100,88	Sangat Berhasil
Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan mengerjakan sektor pendidikan non formal								
Tujuan 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat								
7.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,41	8,29	8,42	101,57	Sangat Berhasil
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan								
Tujuan : Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi								
8.	Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	Nilai	69,19 (B)	71 (BB)	71,05 (BB)	100,07	Sangat Berhasil
		Opini BPK terhadap LKPD	Nilai	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Berhasil
9.	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Merit System	Indeks	140,5	250	N/A	N/A	N/A
		Indeks SPBE	Indeks	2,62	3,12	3,51	112,50	Sangat Berhasil
10.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,88	4,57	4,29	93,87	Berhasil
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Indeks	81,23	82,83	89,86	108,49	Sangat Berhasil
Misi 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keinvestasiarifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat								
Tujuan 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat								
11.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,70	69,89	70,10	100,30	Sangat Berhasil
		Prevalensi Stunting	%	19,4	14	N/A	N/A	N/A
12.	Meningkatnya Pemberdayaan	Tingkat Kemiskinan	%	6,34	5,80	6,27	91,90	Berhasil

	Masyarakat							
Misi 7 : Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi mealui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja								
Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat								
13.	Meningkatnya Investasi di Daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi	%	159,98	10	185	1.850	Sangat Berhasil
14.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB	%	59,63	62	59,27	95,60	Berhasil

Sumber : Analisis Capaian IKU OPD & RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, 2024



SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 1 yaitu : “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Serta Memelihara Kerukunan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini adalah Persentase Lembaga pendidikan Al-Quran Yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah.

Lembaga Pendidikan Alqur’an merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar Alqur’an yang menghasilkan Hafizh/Hafizhah serta lulus dalam seleksi Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebu Pafa) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur’an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah merupakan alat untuk mengukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius.

Adapun formulasi pengukuran capaian realisasi Indikator Kinerja Utama ini yakni :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Jumlah Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah}}{\text{Jumlah Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Keseluruhan}} \times 100\%$$

Berikut data Lembaga Pendidikan Alquran menurut Kecamatan pada tahun 2024 :

Tabel 3.4

Lembaga Pendidikan Alqur'an Penghasil Hafizh/Hafizhah Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN		
		KESELURUHAN	PENGHASIL HAFIZH/HAFIZHAH	JUMLAH HAFIZH/ HAFIZAH
1	Sintuk Toboh Gadang	42	31	46
2	Batang Gasan	9	6	7
3	V Koto Timur	12	7	9
4	2x11 Kayutanam	21	10	17
5	Sungai Limau	45	37	42
6	Sungai Geringging	17	9	10
7	Lubuk Alung	46	30	36
8	Ulakan Tapakis	32	24	34
9	IV Koto Aur Malintang	23	14	15
10	Batang Anai	59	41	51
11	VII Koto	49	37	51
12	Enam Lingkung	59	42	51
13	Nan Sabaris	67	60	76
14	2x11 Enam Lingkung	28	23	28
15	Padang Sago	34	28	33
16	V Koto Kampung Dalam	25	12	14
17	Patamuan	13	6	8
	Jumlah	581	417	528

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa total Lembaga Pendidikan Alqur'an yang ada di Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2024 adalah sebanyak 581, sedangkan lembaga yang telah menghasilkan Hafizh/Hafizhah yang lulus proses seleksi Gerakan Seribu Penghafal Alqur'an yang diadakan oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebanyak 417 lembaga. Sehingga realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 adalah sebesar 72%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Lembaga Penghasil Hafidh/Hafizhah} = \frac{417}{581} \times 100\% = 72\%$$

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman:

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah	45%	72%	160	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Dari Tabel 3.4 diatas, dapat di lihat bahwa realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 yaitu 72% melebihi target yang ditetapkan sebesar 45%, sehingga capaian kinerjanya 160% yang dikategorikan "sangat berhasil".

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Perbandingan target dan realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah pada tahun 2023 dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah	%	28	43	153,57	45	72	160	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pada tabel 3.6 diatas diketahui bahwa capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 6,43%. Peningkatan tersebut dikarenakan tingginya minat putra-putri Padang Pariaman dalam menghafal Al-Qur'an dan semakin banyaknya Lembaga Pendidikan Al-Qur'an di tingkat Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman. Capaian ini juga didukung dengan adanya tambahan dana dari APBD Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 serta bantuan dana dari donatur lainnya.

Keberhasilan peningkatan kehidupan yang religius terutama Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara semua unsur tersebut.

Gambar 3.1
Proses Belajar Mengajar di Lembaga Pendidikan Al-Qur'an

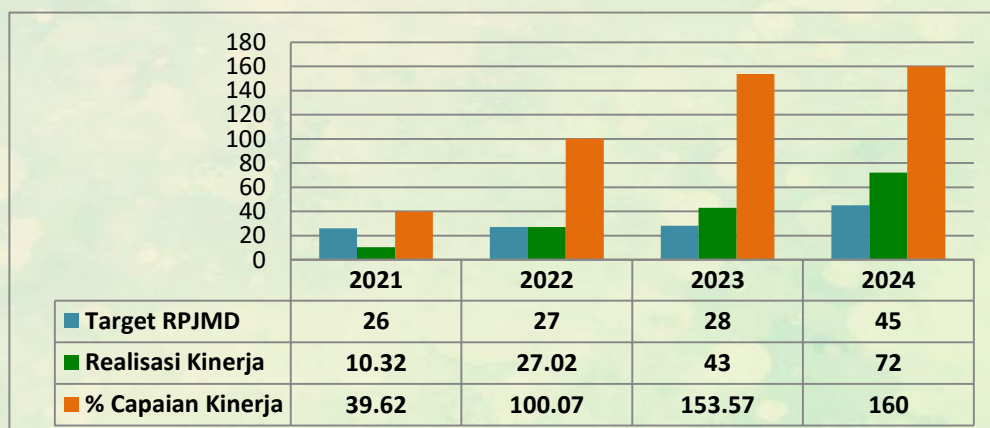


Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Grafik 3.1
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah Tahun 2021-2024



Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur’an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah” pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021 realisasi kinerja sebesar 10,32% dari target RPJMD sebesar 26% dengan persentase capaian hanya sebesar 39,62%. Kemudian pada tahun 2022 capaian kinerja mengalami kenaikan menjadi 27,02% dari target RPJMD sebesar 27% dengan persentase capaian 100,07%. Dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan yang sangat baik dimana realisasi kinerja yang dihasilkan sebesar 43% dari target RPJMD sebesar 28% dengan persentase capaian sebesar 153,57%. Sehingga pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian target berdasarkan capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2023 menjadi 45% dan mendapat realisasi sebesar 72% dengan persentase capaian kinerja 160% atau melebihi target.

d) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur’an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah” diluncurkan inovasi kegiatan “Gerakan Menghafal Al-Qur’an Demi Terciptanya Masyarakat Madani” (Gema Insani) untuk memotivasi Lembaga Pendidikan Alqur’an yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dalam menghasilkan Hafizh/Hafizhah dengan cara memberikan beasiswa/*reward* kepada para Hafizh/Hafizah.

Pada tahun 2024 terdapat 417 Lembaga Pendidikan Alquran telah menghasilkan 528 Hafiz/Hafizah yang lolos seleksi “Gerakan Menghafal Al-Qur’an Demi Terciptanya Masyarakat Madani” (Gema Insani) dan untuk Hafiz/Hafizah tersebut diberikan beasiswa/*reward* dengan total sebesar Rp. 200.000.000,-.

Berikut data Hafizh/Hafizhah yang lolos Gema Insani tahun 2024 :

Tabel 3.7
Hafiz/Hafizah Yang Lolos Gema Insani 2024

No	Kategori Hafiz/Hafizhah	Jumlah (Orang)
1	Kategori 1 Juz	520
2	Kategori 5 Juz	4
3	Kategori 10 Juz	2
4	Kategori 20 Juz	0
5	Kategori 30 Juz	2
JUMLAH		528

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Kabupaten Padang Pariaman pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. Meningkatkan jumlah Lembaga Pendidikan Alquran sebagai penghasil Hafiz/Hafizah;
2. Meningkatkan jumlah anggaran beasiswa bagi hafiz/hafizah yang lolos seleksi “Gerakan Menghafal Al-Qur’an Demi Terciptanya Masyarakat Madani” (Gema Insani).

Gambar 3.2
Pemberian Beasiswa/*Reward* kepada Hafizh/Hafizhah



Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

e) Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Adapun beberapa faktor penentu keberhasilan kinerja yang sudah dicapai sepanjang tahun 2024 ini adalah :

1. Terjalinya Kejasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Guru Mengaji/Guru Tahfizh yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman sangatlah tinggi

Dalam Pelaksanaan Inovasi Gema Insani ditemukan beberapa kendala, yaitu :

1. Pendaftaran Hafizh/Hafizah tidak sesuai dengan Kartu Keluarga
2. Terdapat beberapa Hafizh/Hafizah mendaftar lebih dari satu kecamatan
3. Perlunya penyamaan persepsi mengenai standar penilaian pada seleksi Gema Insani antara Kecamatan dan Kabupaten.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran tahun 2024 :

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah	160%	100%	60%

Dalam menunjang capaian kinerja ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengalokasikan pembiayaan sebesar Rp. 75.000.000,-. Dan kegiatan ini juga didukung oleh beberapa stakeholders diantaranya BAZNAS Padang Pariaman berupa bantuan sebesar Rp. 125.000.000,- sehingga total anggaran yang ada sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi 100%.

Persentase efisiensi secara teori sudah sangat baik untuk tahun ini, dimana Efisiensi Capaian Kinerja 60% dan Efisiensi Anggaran 0% sehingga total efisiensi pada 2024 adalah sebesar 60%, dapat di asumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama

Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 1 yaitu : “ Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Serta Memelihara Kerukunan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum”. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, kerukunan yaitu: “Suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka mengukur tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Padang Pariaman, telah dilaksanakan Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2024. Survei ini mengukur beberapa aspek, yaitu :

1. Toleransi : Sikap menghormati dan menerima perbedaan agama dan kepercayaan
2. Kesetaraan : Sikap menghormati dan mengakui hak dan kewajiban yang sama bagi semua umat beragama
3. Kerjasama : Sikap bekerjasama dan berkolaborasi antar umat beragama untuk mencapai tujuan bersama

Adapun formulasi pengukuran realisasi IKU Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah sebagai berikut :

Formulasi Pengukuran :
$$\frac{\text{Skor Toleransi} + \text{Skor Kesetaraan} + \text{Skor Kerjasama Sosial}}{3}$$

Hasil survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 memperoleh poin sebesar 71,81.

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024

Berikut ini adalah target dan realisasi indikator kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024:

Tabel 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	65	71,81	110,48%	Sangat Berhasil

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 yaitu 71,81 dari target yang ditetapkan sebesar 65, sehingga capaian ini melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 110,48% dengan interpretasi “Sangat Berhasil”.

(b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	N/A	N/A	N/A	65	71,81	110,48	Sangat Berhasil

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Padang Pariaman, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian sasaran strategis pada pohon kinerja kabupaten, sehingga Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) baru dimunculkan sebagai indikator kinerja utama untuk sasaran “Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama” pada tahun 2024.

(c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Tahun 2021-2024 dengan Target RPJMD

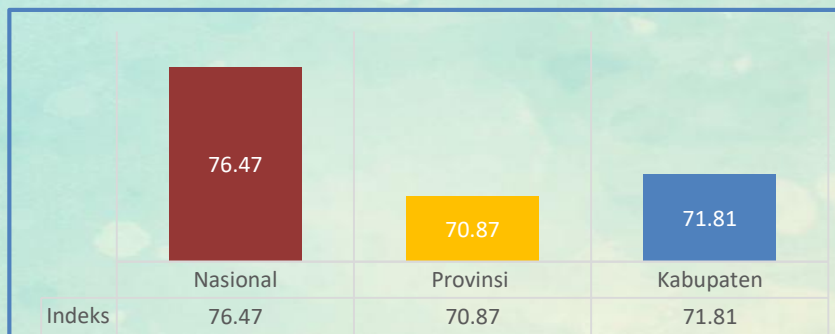
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	N/A	N/A	N/A	65	N/A	N/A	N/A	71,81

Tidak tersedia data Realisasi Indikator Kinerja “Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)” pada tahun 2021 s/d 2023. Hal ini dikarenakan indikator tersebut baru muncul setelah penyesuaian sasaran strategis pada pohon kinerja Kabupaten tahun 2024. Sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 71,81 dari target 65 yang telah ditetapkan dengan persentase capaian kinerja 110,48% (Sangat Berhasil).

(d) Perbandingan Realisasi IKU Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Kabupaten, Provinsi dan Nasional terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah sebagai berikut :

Grafik 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)



Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 adalah 71,81 dan termasuk kategori “Baik”, dimana angka ini berada diatas capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Barat yaitu 70,87. Namun, masih berada dibawah capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Nasional yaitu 76,47.

(e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Padang Pariaman yang mencapai 71,81 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa ada beberapa faktor pendukung yang berkontribusi terhadap tercapainya angka tersebut. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mendukung tercapainya tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Padang Pariaman:

1. Pemahaman dan Pendidikan Multikultural

Salah satu faktor pendukung utama adalah adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kerukunan antar umat beragama. Pendidikan multikultural yang dilakukan sejak usia dini di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya membantu membentuk sikap toleransi dan saling menghargai. Program-program ini berperan penting dalam menciptakan generasi yang lebih terbuka dan dapat bekerja sama dengan berbagai kelompok agama. Contoh : Program pendidikan karakter dan pelajaran agama yang tidak hanya fokus pada agama masing-masing, tetapi juga mengajarkan pentingnya memahami dan menghormati perbedaan agama.

2. Kegiatan Dialog Antar Agama

Kabupaten Padang Pariaman melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman, mengadakan Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Padang Pariaman Tahun 2024 di Aula FKUB Kabupaten Padang Pariaman. Dialog ini bertujuan untuk :

- Terbangunnya dialog yang intens antar pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam rangka memperkuat koordinasi, konsolidasi dan komunikasi untuk kerukunan umat beragama;
- Terbangunnya koordinasi, konsolidasi dan komunikasi yang kuat antar pemuka agama yang ada;
- Terbangunnya wadah dialog dan komunikasi yang intens dalam menemukan penyelesaian atas setiap persoalan antarumat beragama.
- Tersambungannya aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat terkait pemeliharaan kerukunan dan harmonisasi antar umat beragama;
- Terbangunnya sinergitas kerjasama FKUB dengan pemerintah daerah, Forkompinda dan pimpinan organisasi sosial dan kemasyarakatan dalam menjaga dan memelihara kerukunan dan harmonisasi antar umat beragama;
- Tersampainya aspirasi Ormas Keagamaan dan Masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan;
- Tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat agama.

Gambar 3.3

Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Padang Pariaman Tahun 2024 di Aula FKUB Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Padang Pariaman, 2024

3. Aktivitas Sosial Bersama

Kerukunan umat beragama di Kabupaten Padang Pariaman juga didorong oleh adanya kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok agama. Kegiatan seperti gotong royong, bakti sosial, dan kegiatan kemanusiaan lainnya menciptakan kesempatan untuk umat beragama saling bekerjasama, mempererat hubungan, dan memperlihatkan bahwa kerukunan adalah nilai yang praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh: Kegiatan bersama seperti pembagian sembako, bantuan kepada korban bencana, dan kerja bakti yang melibatkan umat dari berbagai agama.

4. Pengaruh Pemimpin Agama yang Bijaksana

Pemimpin agama yang bijaksana dan moderat di Kabupaten Padang Pariaman berperan besar dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Mereka sering kali menjadi teladan dalam mengedepankan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai antar kelompok agama. Pemimpin agama juga memiliki pengaruh besar dalam meredakan ketegangan sosial atau konflik yang berkaitan dengan agama. Umat beragama Kabupaten Padang Pariaman dipimpin oleh pemuka agama yang selalu mendorong sikap damai dan menghindari ekstremisme dalam ajaran agama masing-masing.

5. Adanya Organisasi Kemasyarakatan yang Mendukung

Berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga keagamaan di Kabupaten Padang Pariaman juga mendukung terciptanya kerukunan umat beragama. Organisasi-organisasi ini seringkali mengadakan kegiatan yang melibatkan lintas agama dan menyuarakan pentingnya toleransi serta kerukunan.

Contoh: Organisasi masyarakat yang bekerja sama dalam kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan, serta memiliki program untuk memfasilitasi pertemuan antar kelompok agama.

6. Pengaruh Budaya Lokal yang Mendukung Toleransi

Budaya lokal di Padang Pariaman yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, saling menghormati, dan hidup berdampingan dengan damai menjadi faktor pendukung utama dalam mencapai tingkat kerukunan yang tinggi. Masyarakat Padang Pariaman secara tradisional memiliki nilai budaya yang mendukung kehidupan harmonis antar berbagai suku, agama, dan budaya.

Contoh: Adanya tradisi adat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian masalah, serta pengakuan terhadap keberagaman budaya dan agama.

7. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Sosial

Keamanan dan ketertiban sosial yang terjaga dengan baik di Kabupaten Padang Pariaman memberikan rasa aman bagi seluruh umat beragama untuk beribadah dan menjalankan aktivitas agama mereka tanpa rasa takut. Hal ini mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif untuk kerukunan. Adanya kerja sama yang baik antara aparat keamanan dan tokoh agama untuk menjaga stabilitas sosial, mencegah potensi konflik, dan menjaga kedamaian antar umat beragama.

Faktor-faktor pendukung seperti pemahaman multikultural, dialog antar agama, kebijakan pemerintah yang inklusif, kegiatan sosial bersama, pengaruh pemimpin agama, budaya lokal yang mendukung, stabilitas keamanan, dan pemanfaatan teknologi telah berkontribusi besar terhadap capaian IKUB Kabupaten Padang Pariaman yang mencapai 71,81% pada tahun 2024. Meskipun angka ini sudah menunjukkan hasil yang positif, terus meningkatkan faktor-faktor ini dapat lebih memperkuat kerukunan antar umat beragama di masa depan.

Adapun strategi serta upaya untuk perbaikan kinerja kedepan antara lain :

- Meningkatkan komitmen dan kerja sama yang berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat;

- Menggiatkan moderasi beragama di Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki kondisi masyarakat majemuk;
- FKUB ke depan lebih efektif dan dinamis dalam menjalankan tugasnya, mengingat tantangan yang semakin kompleks dalam kerukunan antar umat beragama;
- Kebijakan pemerintah daerah perlu lebih menekankan prinsip non-diskriminasi dalam pelayanan publik; dan
- Penguatan forum-forum dialog dan kerjasama antarumat beragama dapat mendorong terciptanya proyek-proyek bersama yang bermanfaat bagi masyarakat;

(f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama (IKUB)	110,48%	-	10,48%

Dari tabel diatas, dilihat bahwa untuk pencapaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2024, terjadi efisiensi sumber daya sebesar 10,48% hasil dari efisiensi kinerja, dan tidak terdapat efisiensi anggaran.



SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Ketertiban Umum/Stabilitas

Meningkatnya Ketertiban Umum/Stabilitas merupakan sasaran strategis untuk mencapai Misi 1 yaitu : “ Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Serta Memelihara Kerukunan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini adalah : Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah.

Adapun formulasi pengukuran realisasi IKU tersebut adalah :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Jumlah konflik sosial yang tertangani}}{\text{Jumlah konflik sosial yang dilaporkan keseluruhan}} \times 100\%$$

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan ketertiban umum/stabilitas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan beberapa *stakeholders* telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2024. Salah satunya adalah dengan meningkatkan Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah.

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah Kabupaten Padang Pariaman :

Tabel 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024				Interpretasi
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah	%	100	100	100%	Sangat Berhasil

Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah tahun 2024 yaitu 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian 100% (interpretasi “ Sangat Berhasil”). Hasil tersebut didapat dari total 3 laporan potensi konflik di daerah yang masuk, seluruhnya dapat ditindak lanjuti atau diselesaikan. Berikut ini merupakan potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2024 :

Tabel 3.14
Petensi Konflik Sosial di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

NO	Objek Potensi Konflik	Latar Belakang/ Kronologi Konflik	Pihak yang di Konflik	Lokasi	Jenis Konflik	Tindaklanjut/ Upaya Penyelesaian	Keterangan
1	Status Kepemilikan Lahan IKK	Pasca Vonis Pengadilan Tipikor Tersangka Dugaan Korupsi Lahan Taman Kehati	Masyarakat Dengan Pemerintah Daerah	Nagari Parit Malintang	Sumber Daya Alam(SDA)/ Lahan	Telah dilakukan Beberapa Kali Pertemuan Antara Pemuka Masyarakat dengan Pemerintah Daerah	Lanjutan Tahun Sebelumnya
2	Proses Pengadaan Tanah Jalan Tol	Belum Selesai Pembayaran Ganti Kerugian Lahan Masyarakat yang Terkena Jalan Tol	Masyarakat Dengan Pelaksana Jalan Tol	1.Kec.Batang Anai 2.Kec.Lubuk Alung 3.Kec. Enam Lingkung 4. Kec.2x11 Enam Lingkung 5.Kec.2x11 Kayu Tanam	Sumber Daya Alam(SDA) /lahan	Telah Dilakukan Beberapa Kali Pertemuan Antara Masyarakat Dengan Pelaksana Jalan Tol	Lanjutan Tahun Sebelumnya
3	Galian C	Kerusakan Lingkungan terutama di Aliran Sungai Batang Anai	Masyarakat dengan Penambang Galian C	1. Kec. Lubuk Alung 2. Kec. Batang Anai 3. Kec. 2x11 Kayu Tanam	Sumber Daya Alam(SDA)/ lahan	Telah Dilakukan Beberapa Kali Pertemuan Antara Masyarakat Dengan Penambang	Lanjutan Tahun Sebelumnya

Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman, 2024

(b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah pada tahun 2023 dengan Tahun 2024 :

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil

Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah tahun 2024 sebesar 100%, dan pada tahun 2023 juga memperoleh realisasi sebesar 100%.

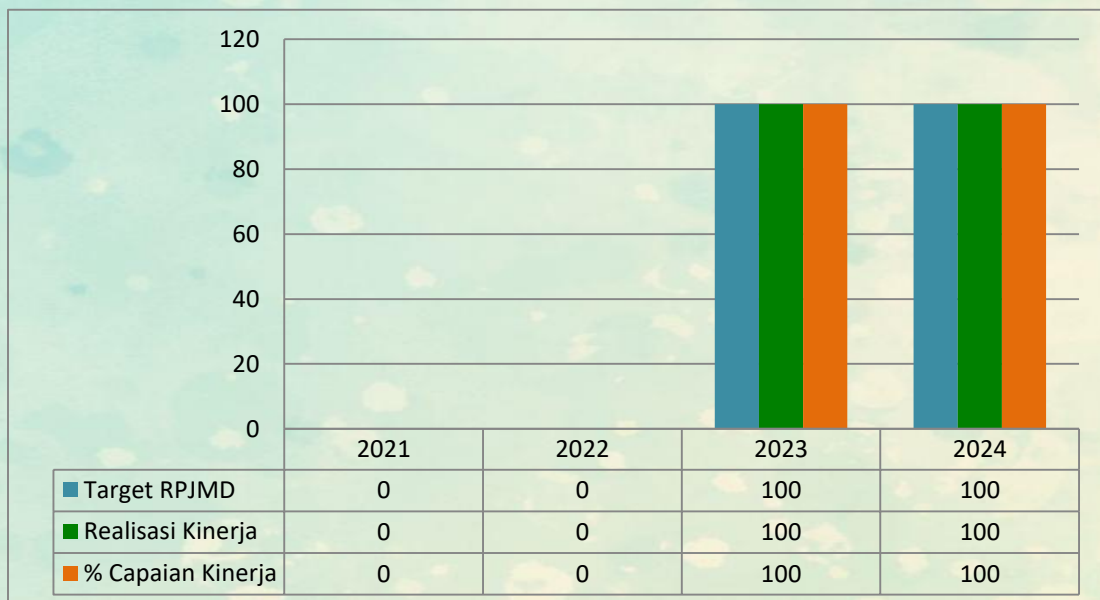
Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh adanya upaya-upaya preventif yang dilakukan seperti mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan keberagaman, membangun komunikasi antar-kelompok yang berpotensi konflik, mengurangi kesenjangan sosial dengan program ekonomi inklusif serta penegakkan hukum tanpa diskriminasi agar masyarakat percaya pada keadilan. Disamping upaya preventif tersebut, terdapat upaya-upaya represif antara lain : Aparat Polisi dan TNI bertindak untuk mengendalikan situasi jika terjadi eskalasi konflik, menindak tegas

pelaku provokasi dan kekerasan dan mengontrol penyebaran informasi yang bisa memperkeruh situasi. Selanjutnya Kabaupaten Padang Pariaman juga melakukan upaya rehabilitatif seperti : membangun kembali hubungan antar-kelompok yang berseteru, bantuan untuk korban konflik agar dapat kembali beraktivitas, membangun fasilitas umum yang bisa mempererat kebersamaan masyarakat.

(c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Grafik 3.3
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tahun 2021-2024



Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Data Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah” pada tahun 2021-2022 tidak tersedia karena indikator ini termasuk ke dalam indikator yang baru muncul setelah dilakukan penyesuaian pohon kinerja Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 100% dengan target RPJMD sebesar 100% dan pada tahun 2024 realisasi kinerja juga memperoleh angka sebesar 100% dari target RPJMD sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya penanganan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman.

(d) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Untuk mencapai indikator kinerja “Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah”, Kantor Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Padang Pariaman

melaksanakan Program/Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan indikator tersebut, yaitu:

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah. Jumlah anggaran Sub Kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah adalah sebesar Rp. 59.020.000,00 dan dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 58.400.480,00 persentase capaian sebesar 98,95%. Sub Kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut :
 - ✓ Koordinasi ke Kantor Imigrasi dan Depnaker Sumatera Barat tentang keberadaan orang asing,
 - ✓ Koordinasi dengan Kapolres Padang Pariaman terkait konflik sosial;
 - ✓ Koordinasi dengan OPD yang terkait konflik sosial;
 - ✓ Koordinasi dengan Nagari Nagari terkait konflik sosial dan keberadaan orang asing; dan
 - ✓ Pemantuan keberadaan orang asing di Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 3.4
FGD Forkopimda



Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 3.5
Rapat Koodinasi dengan OPD terkait



Gambar 3.6
Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman, 2024

(e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah yang ditindaklanjuti tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan, baik Kepala Daerah maupun Kepala Perangkat Daerah terkait, dalam menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat terkait konflik sosial;
2. Sinergitas yang baik antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Forkopimda terkait isu-isu sosial di Kabupaten Padang Pariaman;
3. Melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan Forkopimda dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Perangkat Daerah terkait dengan Nagari-nagari dan KAN di Kabupaten Padang Pariaman;
4. Menindaklanjuti segera laporan-laporan yang terkait dengan konflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman;

Adapun upaya atau strategi kedepan untuk pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam mencegah konflik.
2. Memperkuat lembaga mediasi untuk penyelesaian konflik secara damai.
3. Meningkatkan program kesejahteraan sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
4. Mengoptimalkan peran media dalam memberikan informasi yang edukatif dan damai.

(f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran tahun 2024 :

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Persentase IKU Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Ketertiban Umum/Stabilitas	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah	100%	97,14%	2,86%

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk kegiatan penunjang indikator kinerja adalah Rp 391.525.085,- sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp 403.025.000,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 97,14%. Artinya diperoleh efisiensi anggaran adalah 2,86% . Persentase capaian kinerja sebesar 100%. Sehingga diperoleh total efisiensi sebesar 2,86%, Persentase efiseinsi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat di asumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya. Namun bila dilihat pada hasil yang diperoleh, anggaran tersebut sudah sangat efisien karena kegiatan kegiatan Penunjang Indikator Kinerja tersebut sangat mendukung Meningkatnya Ketertiban Umum untuk menurunkan persentase konflik sosial masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.



SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Pelestarian Warisan Cagar Budaya

Meningkatnya Pelestarian Warisan Cagar Budaya merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 1 yaitu : “Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini adalah Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan dan Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarikan.

A. Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan

Warisan cagar budaya yang dilestarikan adalah jumlah situs atau objek cagar budaya yang mendapat perlindungan, perawatan dan pelestarian. Total warisan cagar budaya yang terdaftar adalah jumlah keseluruhan cagar budaya yang telah didata atau terdaftar dalam suatu wilayah atau kategori tertentu, merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten dalam rangka mencapai target sasaran strategis “Meningkatnya Pelestarian Warisan Cagar Budaya”.

Formulasi Pengukuran :
$$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdaftar}} \times 100\%$$

(a) Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024

Berikut ini adalah target dan realisasi indikator kinerja Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 :

Tabel 3.17
Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Warisan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024				Interpretasi
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan	%	85,44%	100%	117,04	Sangat Berhasil

Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Kinerja Utama “Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan” 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 85,44% sehingga memperoleh capaian 117,04% dengan kategori “Sangat Berhasil”. Hasil ini didapatkan dari total 9 (buah) objek yang diduga warisan cagar budaya pada tahun 2024, keseluruhannya berhasil ditetapkan sebagai warisan cagar budaya yang dilestarikan.

Jumlah Cagar budaya yang dilestarikan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tugu Perjuangan Pasar Oesang
2. Makam Singo Pasar Oesang
3. Mortir Pasar Oesang
4. Stasiun Kandang Ampat

5. Terowongan Kereta Api Lingkuang Kandang Ampat
6. Stasiun Kereta Api Parit Malintang
7. Jembatan Kereta Api Batang Anai
8. Bukik Batu Mejan (*Columnar Joint Surantiah*)
9. Ruang Pendidik INS (*Indonesisch Nederlandsche School*)

Adapun Jumlah Cagar budaya yang terdaftar selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tugu Perjuangan Pasar Oesang
2. Makam Singo Pasar Oesang
3. Mortir Pasar Oesang
4. Stasiun Kandang Ampat
5. Terowongan Kereta Api Lingkuang Kandang Ampat
6. Stasiun Kereta Api Parit Malintang
7. Jembatan Kereta Api Batang Anai
8. Bukik Batu Mejan (*Columnar Joint Surantiah*)
9. Ruang Pendidik INS (*Indonesisch Nederlandsche School*)

Jumlah Cagar budaya yang telah terdaftar dan telah dilestarikan selama tahun 2024 adalah 9 (Sembilan) cagar budaya sehingga capaian kinerja “Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarkan” tercapai 100%. Objek diduga cagar budaya yang terdaftar di Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor 9887/KEP/DISDIKBUD/2024 Tanggal 22 November 2024 tentang Status Objek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

(b) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2023 dan Tahun 2024

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase
Warisan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarkan	%	N/A	85	N/A	85,44%	100%	117,04	Sangat Berhasil

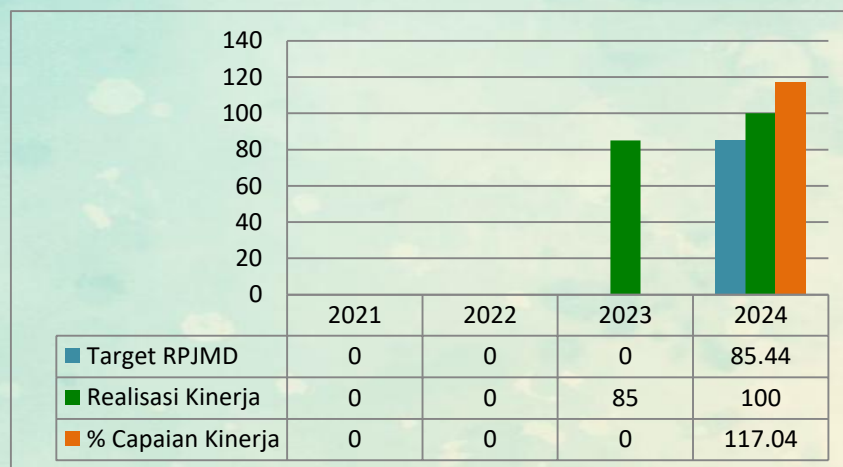
Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Indikator Kinerja Utama “Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarkan” pada tahun 2024 memperoleh realisasi kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 85,44%. Hasil ini diperoleh dari total 9 (sembilan) objek yang diduga cagar budaya, seluruhnya ditetapkan sebagai warisan cagar budaya di Kabupaten Padang Pariaman dengan persentase capaian sebesar 117,04%. Capaian tersebut termasuk kategori “Sangat Berhasil” untuk pencapaian sebuah indikator kinerja. Sedangkan pada tahun 2023 dari total 72 (tujuh puluh dua) objek yang diduga cagar

budaya, sebanyak 61 (enam puluh satu) objek cagar budaya yang ditetapkan sebagai warisan cagar budaya di Kabupaten Padang Pariaman. Namun, hasil ini tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2023 karena indikator tersebut merupakan indikator baru setelah dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pohon kinerja Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 yang lalu.

(c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Grafik 3.4
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarkan Tahun 2021-2024



Sumber : Disdikbud Padang Pariaman, 2024

Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarkan” merupakan indikator baru setelah dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pohon kinerja Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 yang lalu. Hal ini mengakibatkan target jangka menengah dan realisasi kinerja 2021-2026 tidak dapat diperbandingkan. Namun pada tahun 2024 dari target 85,44% yang ditetapkan memperoleh realisasi kinerja sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 117,04%.

(d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Dalam pencapaian Indikator Kinerja, terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

1. Regulasi dan Kebijakan, Penerapan regulasi dan kebijakan pendukung pelestarian cagar budaya dapat meningkatkan persentase pelestarian. Regulasi ini bisa mencakup perlindungan terhadap pembangunan yang merusak atau menghancurkan situs-situs bersejarah.
2. Kesadaran dan partisipasi masyarakat, Masyarakat yang sadar akan pentingnya pelestarian cagar budaya akan lebih aktif dalam menjaga dan melestarikan situs-situs tersebut.

3. Kerja sama antara lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal dapat memperkuat upaya pelestarian cagar budaya.
4. Pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab dapat membantu meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya.
5. Pendidikan dan pelatihan tentang pelestarian cagar budaya dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan situs-situs tersebut.

Langkah kedepan yang dapat dilakukan untuk perbaikan capaian kinerja ini adalah:

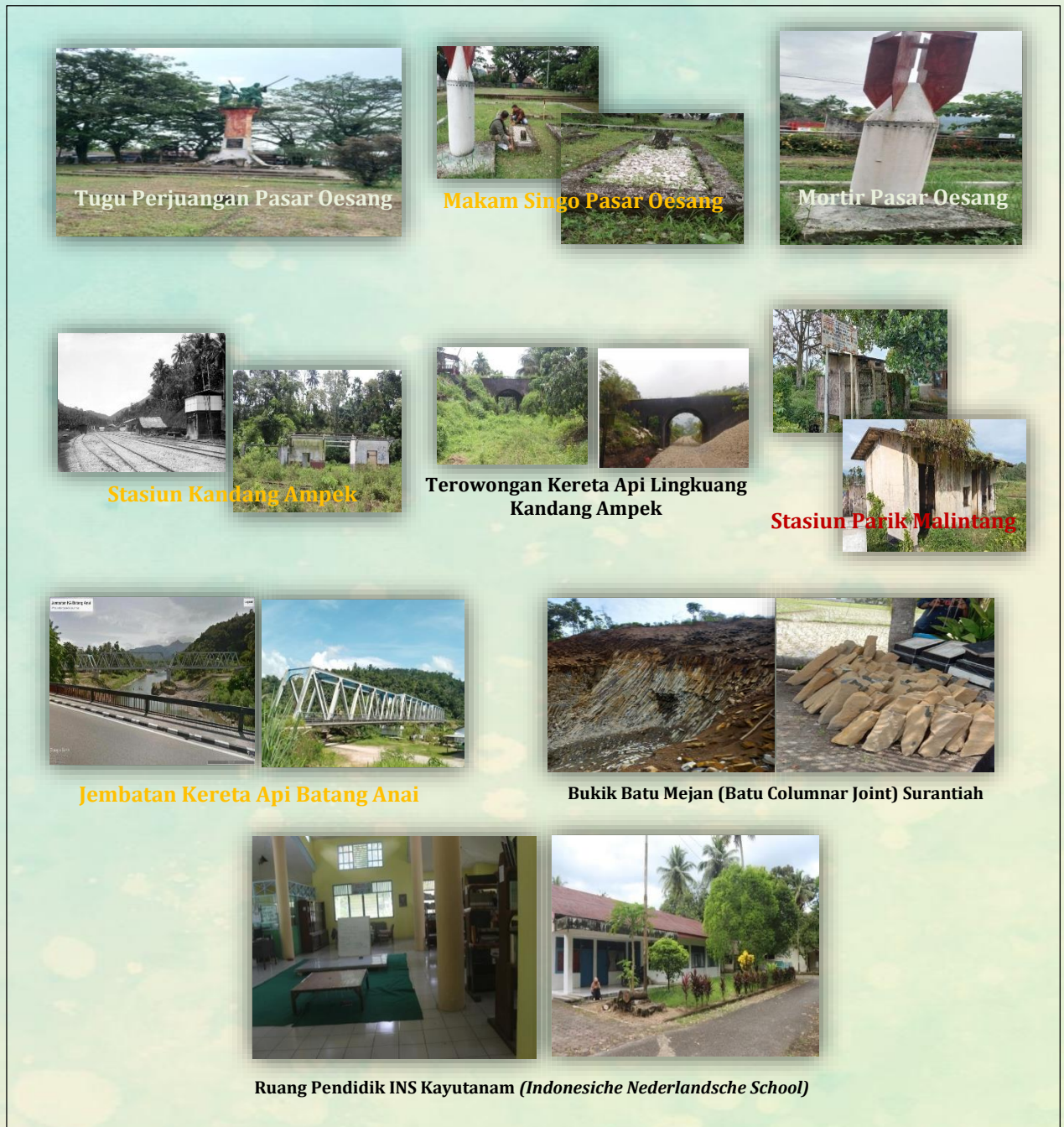
1. Pengakuan Hukum dan Perlindungan: Memberikan status hukum kepada situs, artefak, atau bangunan bersejarah melalui undang-undang dan regulasi perlindungan warisan budaya. Hal ini mencakup penetapan sebagai situs bersejarah, zona lindung, atau status warisan dunia UNESCO.
2. Pemantauan dan Pengawasan: Melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi cagar budaya untuk mendeteksi potensi ancaman atau kerusakan, serta mencegah tindakan vandalisme atau pencurian.
3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga warisan budaya, baik melalui program pendidikan formal maupun informal, serta kampanye kesadaran dan apresiasi terhadap warisan budaya.
4. Konservasi dan Restorasi: Merawat dan memperbaiki situs, artefak, atau bangunan bersejarah yang telah rusak atau mengalami kerusakan, dengan memperhatikan prinsip konservasi yang mempertahankan nilai autentisitas dan integritas sejarah.
5. Pengembangan Perencanaan Wilayah yang Berkelanjutan: Mengintegrasikan perlindungan warisan budaya ke dalam perencanaan pembangunan wilayah, untuk memastikan bahwa pertumbuhan perkotaan tidak merusak atau mengorbankan cagar budaya yang ada.
6. Kolaborasi Antar Pihak: Membangun kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya secara bersama-sama.
7. Penggunaan Teknologi Modern: Memanfaatkan teknologi modern seperti mendigitalkan warisan budaya untuk dokumentasi, analisis, dan pemulihan cagar budaya dengan lebih efisien dan akurat.
8. Pengembangan Kapasitas Lokal: Membangun kemampuan lokal dalam bidang konservasi dan manajemen cagar budaya melalui pelatihan, pendidikan, dan transfer pengetahuan dari ahli dan lembaga internasional.

(e) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

1. Pada program pelestarian warisan budaya dan pengelolaan cagar budaya terdapat kegiatan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan

kawasan cagar budaya yang ada di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Gambar 3.7
Warisan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2024



Sumber : Disdikbud Padang Pariaman, 2024

(f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja tahun 2024 :

Tabel 3.19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Persentase Warisan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pelestarian Warisan Cagar Budaya	Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarkan	117,04%	99,27%	17,77%

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk program penunjang indikator kinerja adalah Rp 2.221.220.982,00,- sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp 2.237.462.778,00,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,27%. Persentase capaian kinerja sebesar 100%. Artinya diperoleh total tingkat efisiensi sebesar 17,77%. Persentase efisiensi ini cukup baik, sehingga dapat di asumsikan bahwa pada tahun 2024 terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya. Dan jika dilihat pada hasil kinerja yang diperoleh, anggaran tersebut sudah sangat efisien karena program penunjang Indikator Kinerja tersebut sangat mendukung Meningkatkan Pelestarian Warisan Cagar Budaya di Kabupaten Padang Pariaman.

B. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarkan

Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarkan merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mencapai target sasaran strategis “Meningkatnya Pelestarian Warisan Cagar Budaya”. Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) merupakan tradisi, ekspresi lisan, seni petunjukan adat istiadat, ritual, praktik sosial, pengetahuan tradisional, hingga keterampilan kerajinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Adapun formulasi pengukuran realisasi indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan}}{\text{Total warisan budaya tak benda yang terdata}} \times 100\%$$

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarkan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 :

Tabel 3.20
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarkan	%	71,43	100	140	Sangat Berhasil

Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Kinerja Utama “Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarkan” sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 71,43% sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 140% dengan kategori “Sangat Berhasil”. Hasil ini didapatkan dari total 6 (enam) warisan budaya tak benda yang terdata, sebanyak 3 (tiga) warisan budaya tak benda yang dilestarikan. Adapun warisan budaya tak benda yang dilestarikan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 446/M/20258.

b) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2023 dan Tahun 2024

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Warisan
Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarkan	%	N/A	50	N/A	71,43	100	140	Sangat Berhasil

Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Realisasi kinerja indikator “Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarkan” tahun 2023 dan tahun 2024 tidak bisa diperbandingkan karena indikator tersebut merupakan indikator baru setelah dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pohon kinerja Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 yang lalu. Namun jika dilihat pada tabel diatas, realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 50%. Dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan realisasi sebesar 50% menjadi 100%.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.22

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Tahun 2021-2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarkan	%	N/A	N/A	N/A	71,43	N/A	N/A	N/A	100

Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarkan” merupakan indikator baru setelah dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pohon kinerja Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 yang lalu. Hal ini mengakibatkan target jangka menengah dan realisasi kinerja 2021-2026 tidak dapat diperbandingkan.

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Dalam pencapaian Indikator Kinerja, terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

1. Adanya dukungan Pemerintah berupa kebijakan regulasi, anggaran dan program pelestarian.
2. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mempraktikkan dan meneruskan Warisan Budaya Tak Benda;
3. Pemanfaatan teknologi digital (promosi digital);
4. Adanya edukasi Warisan Budaya Tak Benda kepada generasi muda.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja tersebut antara lain :

1. Pengaruh globalisasi-modernisasi bisa berdampak positif (promosi digital) atau negatif (pergeseran budaya)
2. Ancaman kepunahan-misalnya menurunnya jumlah praktisi seni atau tradisi tertentu.

Langkah kedepan yang dapat dilakukan untuk perbaikan capaian kinerja ini adalah:

1. Pengakuan dan Pencatatan: Mengidentifikasi dan mencatat elemen-elemen warisan budaya tak benda yang penting melalui survei, penelitian, dan konsultasi dengan komunitas lokal dan para ahli budaya.
2. Pengembangan Kebijakan Perlindungan: Membuat undang-undang, regulasi, atau kebijakan khusus untuk melindungi dan mempromosikan warisan budaya tak benda, serta menetapkan status khusus dan pengakuan resmi terhadap elemen-elemen ini.
3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya warisan budaya tak benda, mempromosikan apresiasi terhadap

tradisi dan praktik budaya mereka, serta meningkatkan kesadaran akan ancaman yang mungkin dihadapi oleh warisan ini.

4. Partisipasi Komunitas: Melibatkan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan tentang pelestarian dan pengembangan warisan budaya tak benda, serta memberdayakan mereka untuk mengambil peran aktif dalam menjaga dan memelihara tradisi mereka sendiri.
5. Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan: Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat keterampilan dan pengetahuan tentang warisan budaya tak benda, baik di kalangan generasi muda maupun anggota masyarakat secara umum.
6. Kolaborasi Antar Pihak: Membangun kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk mendukung upaya pelestarian dan pengembangan warisan budaya tak benda.
7. Pendokumentasian dan Penelitian: Melakukan dokumentasi lengkap tentang elemen-elemen warisan budaya tak benda, termasuk pengumpulan cerita, gambar, rekaman audio/video, dan data lainnya untuk keperluan penelitian dan pemeliharaan.
8. Pengembangan Program Budaya dan Festival: Mengadakan acara-acara budaya dan festival untuk mempromosikan warisan budaya tak benda, serta memperkuat identitas budaya dan kebanggaan masyarakat terhadap warisan mereka.
9. Penggunaan Teknologi dan Media: Memanfaatkan teknologi modern dan media sosial untuk mempromosikan dan membagikan informasi tentang warisan budaya tak benda dengan lebih luas, serta untuk mendukung upaya dokumentasi dan pendidikan.

e) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Adapun Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan dan terdata sebanyak 2 WBTB (Warisan Budaya Tak Benda) dengan kriteria sebagai berikut :

- **Batagak Kudo Kudo**

Tradisi batagak kudo kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah atau surau. Kemudian dilaksanakan dengan cara mengundang seluruh lapisan masyarakat setempat setelah bangunan siap untuk diatap. Hal ini bertujuan untuk membangun sebuah rumah atau surau agar dilakukan secara bergotong royong. Batagak kudo kudo merupakan suatu tradisi yang menarik untuk dikaji karena mengandung nilai-nilai untuk gotong royong dan silaturahmi dalam membangun fasilitas kepentingan umum seperti surau atau masjid. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diaplikasikan pada kepentingan umum tetapi juga untuk kepentingan pribadi masyarakat yang ada di daerah. Oleh karena itu masyarakat sekitar perlu menjaga tradisi ini agar tetap eksis dari generasi ke generasi secara turun temurun.

Gambar 3.8
Batagak Kudo-Kudo



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2024

- Katumbak**

Katumbak adalah suatu ansambel yang hidup dan berkembang di Kabupaten Padang Pariaman. Sebutan *katumbak* sendiri berawal dari peniruan bunyi yang dihasilkan dari suara gendang yang berbunyi “Tum bak, tum bak” sehingga masyarakat menyebut kesenian ini dengan nama *katumbak* atau *baktumbak*. Musik *katumbak* terdiri dari beberapa instrumen, setiap instrumen mempunyai peran masing masing yaitu musik *rabunia* atau harmonim, *gandang katumbak*, *gandang mambo* dan giriang-giriang atau tamborin.

Gambar 3.9
Katumbak



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2024

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestariakan tahun 2024 :

Tabel 3.23
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestariakan Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarikan	Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan	140%		99,64%	40,36%

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk program penunjang indikator kinerja ini adalah Rp 269.026.425,00,- sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp 270.000.000,00,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,64%. Persentase capaian kinerja sebesar 140%. Artinya diperoleh total efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 40,36%. Persentase ini menggambarkan efisiensi pelaksanaan program sangat baik dan sangat mendukung Meningkatnya Pelestarian Warisan Cagar Budaya di Kabupaten Padang Pariaman.



SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah

Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah merupakan sasaran strategis untuk mencapai Misi ke-2 yaitu : “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Publik Secara Berkelanjutan dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Penataan Ruang”, terdapat 3 (tiga) indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini yaitu Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang, Persentase Ketaatan RTRW dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik.

A. Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang

Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mencapai target sasaran strategis “Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah”.

Adapun formulasi pengukuran realisasi kinerjanya sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Panjang jalan memenuhi kondisi jaringan jalan baik dan sedang}}{\text{Panjang jaringan jalan kabupaten}} \times 100\%$$

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024

Jika diperbandingan target dan realisasi indikator kinerja “Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang” Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.24
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang
Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024				Interpretasi
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	%	71,00	68,00	95,77%	Berhasil

Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2025

Pada tahun 2024 panjang jalan yang memenuhi kondisi jaringan jalan baik dan sedang sepanjang 1.409,21 KM, sedangkan total panjang jalan kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paadang Pariaman Nomor :046/KEP/BPP/DPU-2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 adalah 2.072,40 KM, sehingga didapatkan realisasi persentase tingkat kondisi jaringan jalan

baik dan sedang sebesar 68,00% dari target sebesar 71,00% dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 95,77% dengan interpretasi ‘Berhasil’.

b) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2023 dan Tahun 2024

Adapun perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang Tahun 2023 dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang
Tahun 2023 dengan Tahun 2024

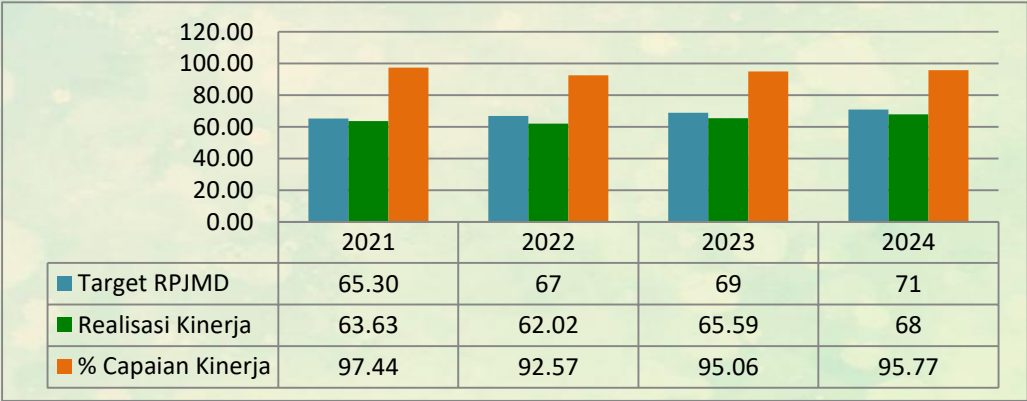
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	%	69,00	65,59	95,06	71,00	68,00	95,77	Berhasil

Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pada Tahun 2023 jaringan jalan kabupaten dengan kondisi baik dan sedang sepanjang 1.359,25 KM sedangkan pada tahun 2024 telah dilakukan rehabilitasi pada kondisi jalan rusak sepanjang 49,96 KM, sehingga total panjang jaringan jalan kabupaten kondisi baik dan sedang tahun 2024 sepanjang 1.409,21 KM dari total Panjang jalan kabupaten 2.072,40 KM. Dari Tabel 3.25 diatas dapat dilihat terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun 2023 sebesar 95,06% meningkat menjadi 95,77% pada tahun 2024.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Grafik 3.5
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang
Tahun 2021-2024



Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Realisasi indikator kinerja “Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang” pada tahun 2021 sebesar 63,63% dengan target RPJMD sebesar 65,30%. Pada tahun 2022 realisasi menurun menjadi 62,02% dengan target RPJMD sebesar 67%, hal ini disebabkan adanya refocussing anggaran pasca penanganan covid-19. Setelah itu pada tahun 2023 realisasi kinerja mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 65,59% dari target RPJMD sebesar 69%. Sedangkan pada tahun 2024 realisasi mengalami peningkatan menjadi 68,00% dengan target RPJMD sebesar 71%.

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Dalam pencapaian Indikator Kinerja, terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

1. Pemeliharaan rutin jalan yang optimal turut mendukung dalam menjaga kondisi jalan tetap baik. Meskipun pada kegiatan pemeliharaan jalan ini hanya untuk permukaan jalan saja dan tidak mempunyai nilai konstruksi, tetapi dapat menutup lubang-lubang jalan yang ada, sehingga jalan menjadi lebih layak dilalui;
2. Perencanaan teknis yang baik dan pengawasan yang tepat dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan;
3. Terinventarisasinya informasi jalan dan jembatan di Kabupaten Padang Pariaman melalui survei kondisi jalan dan jembatan secara berkala setiap tahun.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja tersebut antara lain :

1. Perbaikan kondisi jalan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih baik untuk mencegah banjir dan trotoar yang ramah pejalan kaki.
2. Peningkatan kualitas kemantapan jalan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan
3. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi yang tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya mencapai realisasi indikator kinerja, terdapat beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

1. Perbaikan kondisi jalan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih baik untuk mencegah banjir dan trotoar yang ramah pejalan kaki.
2. Peningkatan kualitas kemantapan jalan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan.
3. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi yang tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana.

e) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Program Penyelenggaraan jalan dengan kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota yang terdiri atas 6 sub kegiatan :

1. Survei kondisi jalan / jembatan

2. Pembangunan jalan

Pada sub kegiatan Pembangunan Jalan dilaksanakan pekerjaan:

- Peningkatan jalan Hotmix Paket 1
- Peningkatan jalan Hotmix Paket 2
- Peningkatan jalan Hotmix Paket 3
- Peningkatan jalan Hotmix Paket 4
- Peningkatan jalan Hotmix Paket 5
- Peningkatan jalan Hotmix Paket 6
- Peningkatan jalan Hotmix Paket 7

3. Rehabilitasi jalan

Pada sub kegiatan Pembangunan Jalan dilaksanakan pekerjaan penanganan *long segment* :

- Palabihan - Aspiran
- Gunung Basi - Sungai Gimba
- Pasar Duku - Kasang
- Kamumuan - Pasar Sungai Geringging
- Simpang Kapalo Hilalang - Tandikat
- Kampung Aro - Lubuk Simbung
- Kali Air - Talao Mundam

4. Pemeliharaan rutin jalan

5. Pembangunan jembatan

- Pembangunan Jembatan Batang Kapecong
- Pembangunan Jembatan Seulayat Ulakan Tapakis

6. Rehabilitasi Jembatan

- Rehabilitasi Jembatan Lubuk Tano
- Rehabilitasi Jembatan Tanjung Mutuih
- Rehabilitasi Jembatan IKK
- Rehabilitasi Jembatan Tunggul Hitam Limpato
- Rehabilitasi Jembatan Dadok Putih

Gambar 3.10
Rehabilitasi Jalan



Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2024

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase

penyerapan anggaran. Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja tahun 2024 :

Tabel 3.26
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	95,77%	93,65%	6,35%

Pada Tahun 2024 realisasi biaya untuk Program Penyelenggaraan Jalan adalah Rp. 89.276.329.479,- sedangkan target biaya untuk program adalah Rp 95.324.686.939,- Dengan demikian diperoleh efisiensi biaya sebesar 6,35%. Sedangkan untuk efisiensi kinerja, belum dapat diperoleh karena capaian kinerja masih berada dibawah 100%.

Tingkat efisiensi keseluruhan sebesar 6,35% secara teori sudah sangat baik, sehingga dapat di asumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya.

B. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Jaringan irigasi merupakan saluran, bangunan dan struktur tambahan membentuk satu kesatuan untuk mengatur air irigasi mulai dari penyediaan, pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan, penggunaan dan pembuangan. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah indikator kinerja Kabupaten Padang Pariaman yang perlu diukur untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah” di Kabupaten Padang Pariaman.

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksanakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$$

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama “Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik “ tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	70,00	66,67	95,24	Berhasil

Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pada Tahun 2024 Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah 17.100,11 Ha, sedangkan total luas irigasi kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi adalah 25.610,76 Ha, sehingga didapatkan realisasi persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 66,77% dari target sebesar 70,00% dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 95,39% dengan interpretasi 'Berhasil'.

(b) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2023 dan Tahun 2024

Adapun perbandingan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	62,72	68,50	91,56	70,00	66,77	95,39	Berhasil

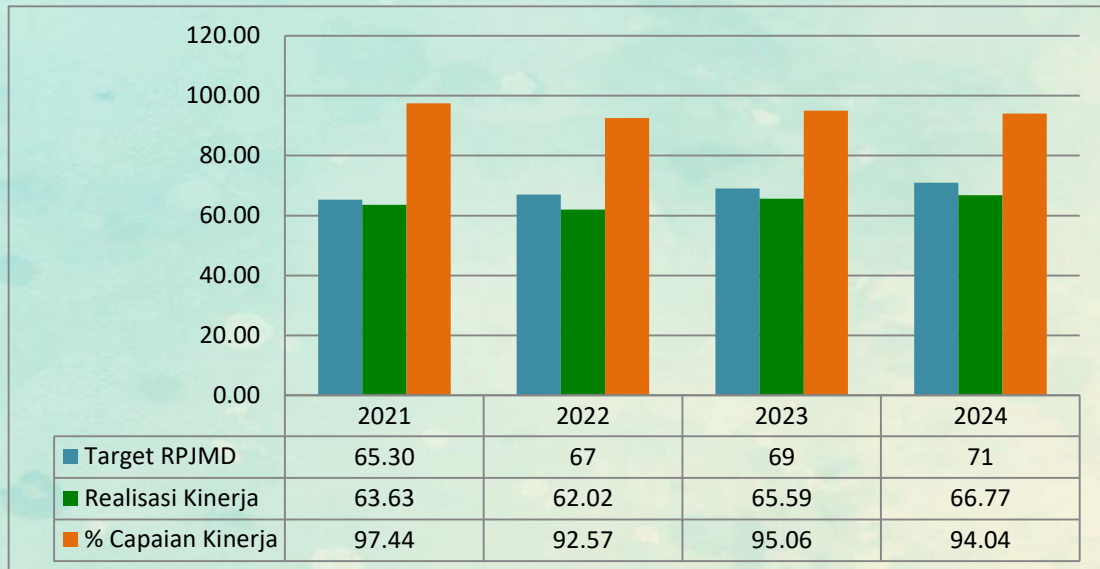
Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pada Tahun 2023 Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah 17.543,37 Ha sedangkan pada tahun 2024 telah dilakukan rehabilitasi pada kondisi daerah irigasi rusak sebesar 10,179,10 Ha menjadi rusak berat, hal ini disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, dan yang lainnya. Pada tahun 2024 dilakukan perbaikan pada daerah irigasi dengan luas 6.920,41 Ha.

Dari Tabel 3.28 diatas dapat dilihat terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun 2023 sebesar 91,56% naik menjadi 95,77% pada tahun 2024, walaupun realisasi kinerja menurun dari 68,50% menjadi 66,77%.

(c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Grafik 3.6
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2021-2024



Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik” pada tahun 2021 sebesar 69,30% dengan target RPJMD sebesar 54,82%. Pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 69,47% dengan target RPJMD sebesar 58,72%. Dan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 68,50% dari target RPJMD sebesar 62,72%. Sedangkan pada tahun 2024 realisasi kinerja menurun menjadi 66,77% dengan target RPJMD sebesar 70,00%.

Selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, target Indikator Kinerja “Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik” selalu berhasil dicapai dengan capaian diatas 90%.

(d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Dalam pencapaian realisasi indikator kinerja, terdapat beberapa hambatan-hambatan yang ada diantaranya adalah :

1. Belum semua kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air yang memiliki standar operasional yang baku.
2. Banyaknya Sumber daya Air yang terletak pada tanah milik penduduk sehingga perlu pembebasan tanah agar Pemda dapat mengelola SDA secara optimal.

Adapun faktor penyebab keberhasilan yang menyebabkan realisasi indikator kinerja bisa tercapai adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data melalui e-PAKSI yang merupakan aplikasi survey berbasis Android yang digunakan untuk pengambilan data survey inventaris aset Jaringan Irigasi, Aset Non Jaringan Irigasi dan Kinerja Irigasi.
2. Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan secara berkala.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya mencapai realisasi indikator kinerja, terdapat beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

1. Peningkatan Peraturan Pemerintah Daerah terkait pengelolaan Sumber Daya Air
2. Pemanfaatan lahan sub-optimalisasi melalui revitalisasi
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan irigas

(e) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Program pengelolaan sumber daya air (SDA) dengan kegiatan Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam satu daerah kabupaten/kota, yang terdiri atas 4 sub kegiatan :

1. Pembangunan jaringan irigasi;
2. Rehabilitasi jaringan irigasi,
3. Peningkatan Jaringan Irigasi ,
4. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan.

Total Anggaran Program Rp.14.493.210.393,- dengan realisasi anggaran Rp.10.767.592.734,- Persentase realisasi anggaran 74,29%. Total luas Daerah Irigasi yang dikerjakan pada tahun 2024 adalah 6.920,41 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman

Gambar 3.11
Rehabilitasi Jaringan Irigasi



Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2024

(f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya, biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100 \% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \%$$

Pada Tahun 2024 realisasi biaya untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) adalah Rp. 12.094.781.568,- sedangkan anggaran untuk program adalah Rp 14.493.210.393,-. Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya sebesar 16,55%. Sedangkan untuk efisiensi kinerja, pada tahun 2024, tidak terdapat efisiensi karena capaian kinerja masih berada dibawah 100%. Dengan demikian total efisiensi sumberdaya hanya sebesar 16,55% yang berasal dari efisiensi biaya. Persentase efisiensi ini secara teori sudah sangat baik, sehingga dapat di asumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya untuk pencapaian kinerja pada indikator ini.

C. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Penataan ruang merupakan proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Persentase ketaatan terhadap RTRW merupakan salah satu indikator kinerja untuk melihat ketercapaian sasaran strategis "Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah".

Rencana tata ruang merupakan dokumen acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan ruang. Konsekuensi logisnya adalah seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus terlebih dahulu memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan proses dalam mewujudkan kepatuhan terhadap rencana tata ruang.

Formulasi pengukuran realisasi indikator kinerja adalah sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$$

a) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Ketaatan Terhadap RTRW" tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024				Interpretasi
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	%	75	82,10	109,46	Sangat Berhasil

Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pada tahun 2024 realisasi RTRW sebesar 92.275 Ha sedangkan total rencana peruntukan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020 - 2040 adalah 102.580 Ha, sehingga didapatkan realisasi persentase ketaatan terhadap RTRW sebesar 82,10% dari target sebesar 75,00% dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 109,47% dengan interpretasi 'Sangat Berhasil'.

b) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2023 dan Tahun 2024

Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama "Persentase Ketaatan Terhadap RTRW" Tahun 2023 dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2023 dan Tahun 2024

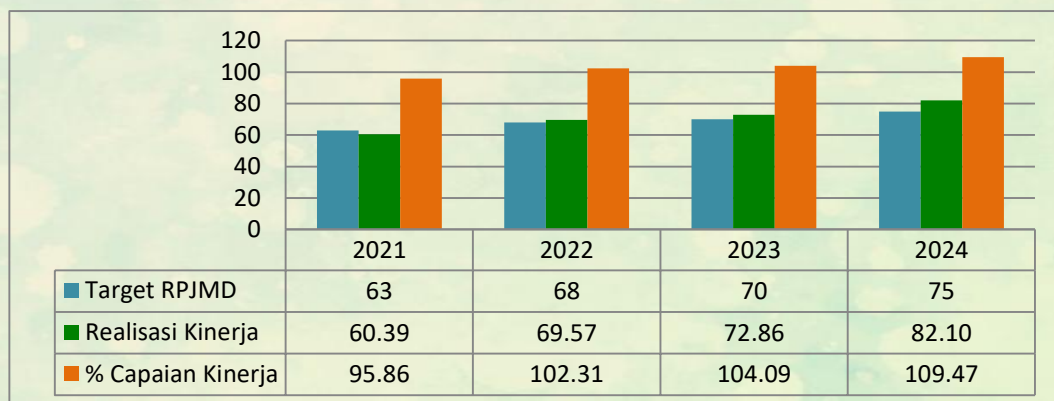
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	%	70,00	72,86	104,08	75	82,10	109,46	Sangat Berhasil

Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pada Tahun 2023 realisasi RTRW adalah 74.739,79 sedangkan pada tahun 2024 telah dilakukan penambahan realisasi RTRW sebesar 19.535,21 Ha, sehingga total realisasi RTRW tahun 2024 sebesar 94.275,00 Ha dari total rencana peruntukan sebesar 102.580 Ha. Dari Tabel 3.28 diatas dapat dilihat terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun 2023 sebesar 104,09% meningkat menjadi 109,47% pada tahun 2024.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Grafik 3.7
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2021-2024



Gambar 3.12
Pembahasan Lintas Sektor Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang di
Kementerian ATR/BPN



Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2024

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi biaya dan efisiensi kinerja. Pada Tahun 2024 realisasi biaya untuk Program Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah Rp. 256.165.608,- sedangkan target biaya untuk program adalah Rp 300.426.100,-. Dengan demikian diperoleh efisiensi biaya adalah 14,73%. Sedangkan untuk efisiensi kinerja dengan capaian 109,47%, maka didapat efisiensi kinerja sebesar 9,47%. Total tingkat efisiensi sebesar 24,20%. Perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.31
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Persentase Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	109,47%	85,27%	24,20%

Persentase tingkat efisiensi ini secara teori sudah sangat baik, sehingga dapat di asumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya pada pencapaian indikator kinerja utama Persentase Ketaatan Terhadap RTRW ini.

Dilihat dari grafik diatas, capaian kinerja “Persentase Ketaatan Terhadap RTRW” dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 selalu meningkat setiap tahunnya.

d) Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Serta Upaya Yang Dilakukan Dalam Menunjang IKU

Dalam pencapaian realisasi indikator kinerja, terdapat beberapa hambatan-hambatan yaitu :

1. Konflik kepentingan para pihak dalam pemanfaatan ruang (ketidakseimbangan kepentingan Ekonomi, Ekologi, Sosial Budaya dan Institusional).
2. Kurang pahamnya masyarakat terhadap rencana Tata Ruang
3. Dinamika perkembangan pembangunan yang sangat cepat

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pencapaian realisasi indikator kinerja, terdapat juga beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja antara lain :

1. Adanya kolaborasi Akademisi, Birokrasi, Dunia Usaha, Masyarakat (NGO Lingkungan) dan Dunia Pers dalam penyusunan rencana rinci Tata Ruang
2. Melakukan updating rencana tata ruang secara berkala
3. Meningkatkan Koordinasi Lintas OPD

Selain faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja terdapat juga beberapa strategi dalam pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan strategi pengembangan infrastruktur wilayah (perencanaan program dan pembiayaan).
2. Sinkronisasi program pengembangan infrastruktur secara terpadu.
3. Meningkatkan sinergi perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah.
4. Penyusunan Kajian tata ruang yang sesuai dengan peruntukan lahan dan fungsinya.

e) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Capaian IKU

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Total Anggaran Program : Rp. 300.426.100,- dengan realisasi Rp. 256.165.608,-
Persentase realisasi anggaran 85,27%.

SASARAN STRATEGIS 6 **Meningkatnya Pembangunan Ekonomi**

Meningkatnya Pembangunan Ekonomi merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 3 yaitu : “Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat”. Terdapat 2 (dua) indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini yaitu PDRB Per Kapita dan Pengeluaran Per Kapita. Salah satu indikator tingkat perekonomian di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena, itu besar kecil nya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB perkepala atau per satu orang penduduk.

A. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah hasil pembagian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah. besar kecil nya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB perkepala atau per satu orang penduduk.

Formulasi pengukuran PDRB Per Kapita adalah sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Nilai PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Untuk realisasi tahun 2024 digunakan angka PDRB Per Kapita yang dirilis oleh BPS dalam “Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2025) yaitu sebesar 58,38 Juta.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah PDRB Per Kapita. Adapun realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.32
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja PDRB Per Kapita Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
PDRB Per Kapita	Juta	57,25	58,38	101,97	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa realisasi kinerja PDRB Per Kapita Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 58,38 Juta dari target yang ditetapkan sebesar 57,25 Juta dengan persentase capaian sebesar 101,97 (Sangat Berhasil).

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi PDRB pada tahun 2023 dengan Tahun 2024 :

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja PDRB Per Kapita
Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023				Tahun 2024			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
PDRB Per Kapita	Juta	50,50	55,54	109,98	57,25	58,38	101,97	Sangat Berhasil

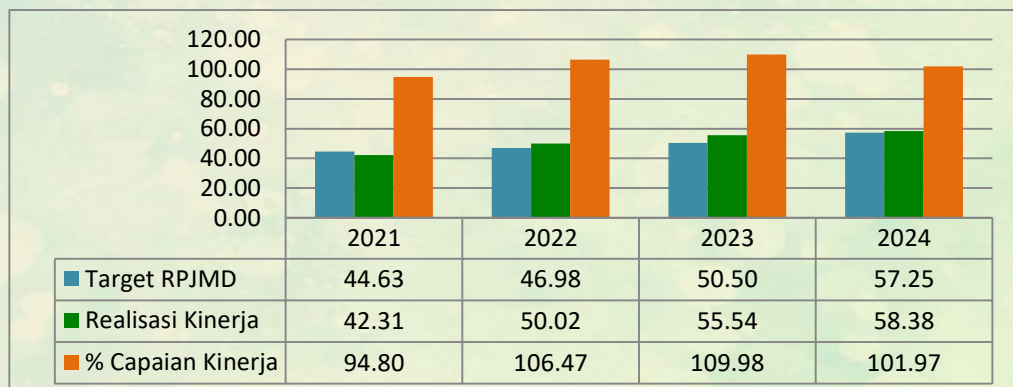
Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Realisasi indikator kinerja PDRB Per Kapita tahun 2023 adalah 55,54 Juta dari 50,50 Juta target yang ditetapkan (109,98%). Sedangkan realisasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,84 Juta menjadi 58,38 Juta dari 57,25 Juta target yang ditetapkan. Persentase capaian ini adalah sebesar 101,97% dengan interpretasi “Sangat Berhasil”.

Peningkatan realisasi PDRB Per Kapita ini terjadi karena pada semua sektor menurut lapangan usaha mengalami kenaikan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan perekonomian masyarakat berangsur-angsur pulih sehingga meningkatkan kebutuhan dan pendapatan masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya daya beli masyarakat akan kebutuhannya. Namun dari segi capaian kinerja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2024 Jumlah penduduk di Kabupaten Padang Pariaman mengalami kenaikan juga, sehingga capaian realisasi tidak begitu signifikan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Grafik 3.8
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja
PDRB Per Kapita Tahun 2021-2024



Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

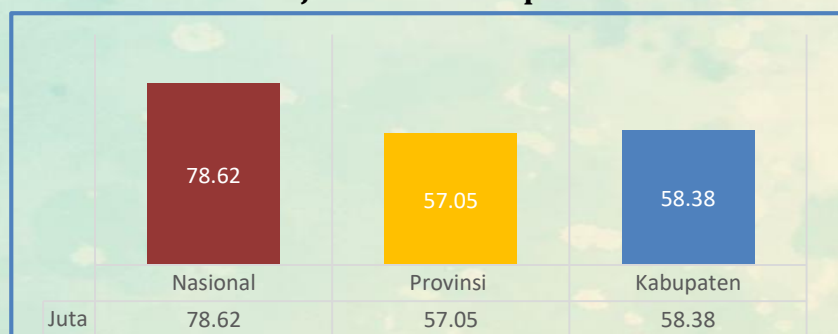
Realisasi Indikator Kinerja “PDRB Per Kapita” pada tahun 2021 sebesar Rp. 42,31 Juta dengan target RPJMD sebesar Rp. 44,63 Juta. Pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar Rp. 50,50 Juta dengan target RPJMD sebesar Rp. 46,98 Juta. Selanjutnya pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar Rp. 55,54 Juta dari target sebesar Rp. 50,50 Juta. Sedangkan pada tahun 2024 realisasi kinerja 58,38 Juta dari target yang ditetapkan sebesar 57,25 Juta.

Pada Tahun 2021 capaian kinerja “PDRB Per Kapita tidak mencapai 100% hal ini dikarenakan adanya wabah covid 19, namun terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun 2021 - 2023 hal ini karena mulai meningkatnya konsumsi pada masa pemulihan pandemi covid 19, pasca banjir bandang serta letusan gunung merapi yang berdampak pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

d) Perbandingan Realisasi IKU Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait PDRB Per Kapita

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Kabupaten, Provinsi dan Nasional terkait PDRB Per Kapita adalah sebagai berikut :

Grafik 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait Indikator Kinerja PDRB Per Kapita Tahun 2024



Sumber : BPS dan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian PDRB Per Kapita Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 sebesar Rp. 58,38 juta, lebih tinggi dari realisasi Provinsi Sumatera Barat sebesar 57,05 juta, namun masih dibawah realisasi PDRB Per Kapita Nasional sebesar 78,62 juta.

Realisasi kinerja kabupaten sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi dikarenakan adanya peningkatan investasi di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu dalam pengerjaan Proyek Jalan Tol Padang Pekanbaru dari Pemerintah pusat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan pertumbuhan Ekonomi, karena banyak realisasi ganti rugi tanah masyarakat oleh Pemerintah pusat sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman terutama yang memiliki tanah ganti rugi.

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Meningkatnya capaian PDRB Per Kapita dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yaitu:

1. Membaiknya ekonomi pasca banjir dan lahar dingin gunung merapi dan usaha ekonomi masyarakat berangsur-angsur pulih sehingga meningkatnya kebutuhan dan pendapatan masyarakat
2. Pertambahan jumlah penduduk
3. Koordinasi tentang daya beli bersama Perangkat Daerah terkait (Dinas Pertanian, Disdagnakerkop UKM, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, BULOG Provinsi).

Disamping faktor pendukung tersebut, terdapat beberapa hal yang menghambat pencapaian kinerja antara lain :

1. Tingkat perubahan harga yang naik/tidak stabil;
2. Faktor iklim dan cuaca menyebabkan para petani mengalami gagal panen
3. Keterbatasan sumber daya alam dan faktor-faktor produksi.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian Nilai PDRB/Income Per Kapita adalah sebagai berikut :

1. Menstabilkan harga kebutuhan pokok supaya daya beli masyarakat meningkat dengan cara mengendalikan tingkat inflasi dengan menanam tanaman cabe, bawang dan sayur-sayuran di pekarangan rumah.
2. Melakukan penanaman disaat iklim yang mendukung, atau mengganti dengan komoditi yang tahan terhadap iklim yang kurang baik (misal penanaman ubi kayu atau daun singkong)
3. Menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat supaya tidak terjadi lagi pengangguran.
4. Meningkatkan produktivitas untuk penambahan *income* (usaha tambahan dan pekerjaan *part time*)
5. Mengonsumsi kebutuhan yang lebih penting (primer) dibandingkan dengan kebutuhan tersier.
6. Memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang IKU

Pada tahun 2024 bulan Maret dan Juni Kabupaten Padang Pariaman mengadakan Bazar dan Operasi Pasar Murah Ramadhan 1444 H di Pasar Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung dan di Kantor Camat VII Koto Sungai Sariak. Dan pada bulan Maret 2024 mengadakan operasi sidak pasar di Pasar Pakandangan, Pasar Lubuk Alung dan Pasar Sei. Limau.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang daya beli masyarakat:

1. Kegiatan Pengendalian Distribusi Dan Perekonomian
Sub kegiatan untuk pencapaian IKU dengan total anggaran Rp. 38.660.000 dan realisasi sebesar Rp.37.649.787 dengan capaian 97,38%. Bagian Perekonomian dan SDA dengan melakukan survey harga ke pasar-pasar nagari di lingkungan kabupaten padang pariaman (Pasar Lubuk Alung, Pasar Pakandangan, Pasar Sungai Limau,)), hal ini dilakukan agar para penjual tidak melakukan penimbunan stock

barang dan menaikkan harga yang tidak wajar agar bisa terjadinya keseimbangan pasar.

2. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Terkait Sektor Perikanan, Pertanian dan Peternakan
 - Melaksanakan Rapat Koordinasi bersama OPD terkait mengenai Pengawasan Pendistribusian Pupuk Subsidi dan Pestisida.
 - Melakukan pengawasan dan survey dalam mendistribusikan Pupuk Bersubsidi ke Kios-kios Pupuk yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Energi Air
 - Melakukan koordinasi ke Dinas ESDM dan Biro perekonomian Provinsi Sumatera Barat mengenai data tambang yang ada di kabupaten padang pariaman.
 - Melakukan koordinasi ke Dinas ESDM dan Biro Provinsi Sumatera Barat mengenai izin penggunaan air tanah di Kabupaten Padang Pariaman.
4. Kegiatan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM adalah operasi survey harga kebutuhan sembilan bahan pokok ke Pasar-pasar nagari dan pasar induk yaitu pasar di kecamatan Lubuk Alung.
5. Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengadakan gerakan tanam cabai baru dan mengadakan survey harga kebutuhan sembilan bahan pokok ke Pasar-Pasar Nagari di Kabupaten Padang Pariaman.
6. Koordinasi dengan Dinas terkait dalam melakukan kerjasama dengan BULOG, TTIC, Disdagnakerkop dan UKM, Baznas serta Bank Nagari untuk dilaksanakan Bazar/Pasar Murah agar membantu masyarakat dalam meningkatkan daya beli.

Gambar 3.13
Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Terkait



Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

7. Kegiatan Dinas Peternakan dan kesehatan hewan mengadakan survey harga kebutuhan sembilan bahan pokok ke Pasar-Pasar Nagari di Kabupaten Padang Pariaman terutama harga daging sapi, daging ayam dan telur.
8. Kegiatan Dinas Perikanan survey harga kebutuhan sembilan bahan pokok ke Pasar-Pasar Nagari di Kabupaten Padang Pariaman terutama harga ikan.

9. Kegiatan pemantauan harga kebutuhan sembilan bahan pokok ke pasar dan koordinasi dengan OPD terkait dari Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab. Padang Pariaman.

Gambar 3.14
Pemantauan Harga Kebutuhan Sembilan Bahan Pokok Ke Pasar



Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

10. Melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Padang Pariaman dan Program Kerja Tahun 2024. Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan prestasi Insentif fiskal daerah dalam pengendalian inflasi sebesar kurang lebih 6 Miliar Rupiah dan peringkat ke dua TPAKD dalam peningkatan akses keuangan daerah.

Gambar 3.15
Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)



Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

11. Melaksanakan Zoom Meeting dan Rapat Koordinasi tentang pengendalian inflasi daerah tahun 2024.

Gambar 3.16

Zoom Meeting Rapat Koordinasi Tentang Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024



Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

12. Melakukan Bazar/Pasar Murah di Pasar Pakandangan, Pasar Kayu Tanam dan Sungai Sariak Dalam (Bazar kerjasama antara Bulog, Bank Nagari, Bank BRI, BNI, Baznas dan Disdagnakerkop dan UKM)

Gambar 3.17

Kegiatan Bazar di Sejumlah Pasar



Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

13. Melakukan High Level Meeting (HLM) mengenai upaya pengendalian Inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru 2025.

Gambar 3.18

High Level Meeting (HLM) Mengenai Upaya Pengendalian Inflasi Menjelang Natal dan Tahun Baru 2025



Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja tahun 2024 :

Tabel 3.34
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi	PDRB Per Kapita	101,97%	90,25%	11,72%

Efisiensi capaian kinerja = $101,97\% - 100\% = 1,97\%$

Efisiensi penyerapan anggaran = $100\% - 90,25\% = 9,75\%$

Total Efisiensi = $1,97\% + 9,75\% = 11,72\%$

Efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 9,75% dan efisiensi kinerja sebesar 1,97%. Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar 11,72%, yang dapat diasumsikan efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator kinerja utama PDRB Per Kapita ini “sangat baik”.

B. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut:

Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun

Formulasi Pengukuran : **X 100%**

Banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli

Untuk realisasi tahun 2024 digunakan angka Pengeluaran Per Kapita yang dirilis oleh BPS dalam “Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2025 yaitu sebesar 11,756 Juta.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Adapun perbandingan realisasi dan target kinerja indikator kinerja utama ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.35
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Pengeluaran Per Kapita Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024				Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Pengeluaran Per Kapita	Rp. Juta	11,653	11,756	100,88		Sangat Berhasil

Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2025

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa nilai realisasi Pengeluaran Per Kapita tahun 2024 sebesar Rp. 11,756 Juta melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 11,653 Juta dengan persentase capaian sebesar 100,88 (Sangat Berhasil). Berdasarkan data dari Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2025, terdapat sebesar 0,59 persen penduduk di Kabupaten Padang Pariaman yang berada pada kelompok pengeluaran di bawah Rp 500.000,00 per bulan, sementara itu sebanyak 64,08 persen penduduk berada pada kelompok pengeluaran Rp 1.000.000,00 ke atas per bulan.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Pengeluaran Per Kapita pada tahun 2023 dengan Tahun 2024 :

Tabel 3.36
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita
Tahun 2023 dan Tahun 2024

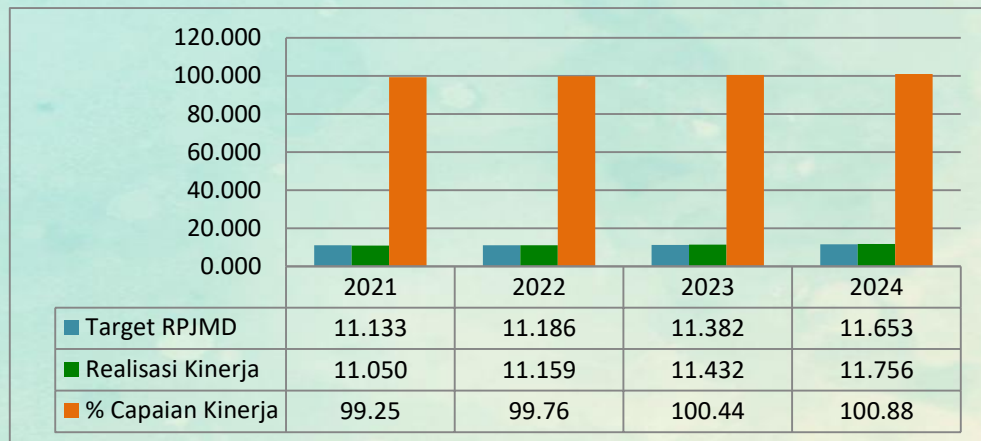
Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023				Tahun 2024			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Pengeluaran Per Kapita	Rp. Juta	11,382	11,432	100,44	11,653	11,756	100,88	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pengeluaran Per Kapita penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 324 Ribu dari tahun 2023. Jika target dan realisasi tahun 2023 dan tahun 2024 diperbandingkan, capaian kinerja Kabupaten Padang Pariaman pada indikator ini meningkat sebesar 0,44%. Hal ini menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil terutama terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Sehingga dapat dikatakan pendapatan masyarakat cukup stabil dan membuat pengeluaran masyarakat secara tidak langsung meningkat juga.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Grafik 3.10
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja
Pengeluaran Per Kapita Tahun 2021-2024



Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

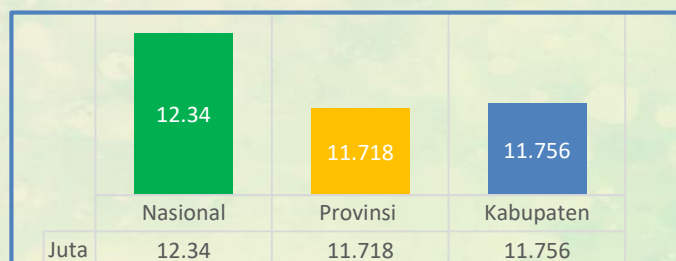
Jika dilihat dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja “Pengeluaran Per Kapita” selalu mengalami peningkatan dari tahun 2021-2024. Namun hanya pada tahun 2023 dan 2024 dapat melebihi target yang ditetapkan.

Peningkatan capaian kinerja dari tahun 2021 - 2024 disebabkan karena sudah membaiknya pertumbuhan ekonomi atau PDRB Padang Pariaman sehingga meningkatkan daya beli masyarakat terutama bagi kalangan muda yang mengeluarkan pendapatannya untuk meningkatkan kepuasan dalam berbelanja. Selain itu, kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dengan demikian kenaikan ini mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

d) Perbandingan Realisasi IKU Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait Pengeluaran Per Kapita

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Kabupaten, Provinsi dan Nasional terkait Pengeluaran Per Kapita Tahun 2024.

Grafik 3.11
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pengeluaran Per Kapita
Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2024



Sumber : BPS dan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan realisasi Provinsi Sumatera Barat, namun masih jauh lebih rendah dari realisasi Nasional. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat konsumsi Kabupaten Padang Pariaman lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Sumatera Barat, namun jauh lebih rendah daripada tingkat Nasional.

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Meningkatnya indikator kinerja Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Padang Pariaman dipengaruhi oleh faktor-faktor, diantaranya :

1. Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat;
2. Perubahan gaya hidup masyarakat;
3. Perkembangan ekonomi.

Gambar 3.19

Proses Jual Beli Masyarakat Pada Salah Satu Pasar di Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Disamping faktor pendukung tersebut, terdapat beberapa hal yang menghambat pencapaian kinerja antara lain :

1. Tingkat perubahan harga yang naik dan tidak stabil;
2. Ketersediaan barang dan jasa; dan
3. Faktor demografi dan iklim.

Adapun upaya ke depan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Pengeluaran Per Kapita adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Jumlah UMKM dan produksi rumahan
2. Meningkatkan produktifitas dan kreatifitas kaum muda untuk membuka usaha sesuai dengan minat atau bakat
3. Meningkatkan investasi di Kabupaten Padang Pariaman
4. Mengembangkan sektor pariwisata



SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan adalah salah satu pilar utama pembangunan suatu negara. Perkembangan pendidikan menjadi fokus utama dalam upaya mencapai kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu indikator penting dalam dunia pendidikan adalah angka Rata-Rata Lama Sekolah. Indikator Kinerja Utama “Rata-Rata Lama Sekolah” merupakan indikator kinerja dari Sasaran Strategis “Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat.

Rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal, baik tingkat SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, akan semakin baik tingkat pendidikan di suatu wilayah, artinya semakin baik kualitas sumber daya manusia wilayah tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pemerintah dapat menggunakan indikator rata-rata lama sekolah untuk merancang kebijakan pendidikan, seperti program wajib belajar atau bantuan pendidikan.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Berikut capaian dan target dari angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024:

Tabel 3.37
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024				Interpretasi
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,29	8,42	100,1%	Berhasil

Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2025

Pencapaian angka rata-rata lama sekolah selama tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman bisa dikatakan “Berhasil” dengan capaian sebesar 8,42 dari target 8,29 berarti bahwa pencapaian pendidikan sudah melebihi target yang ditetapkan. Capaian 8,42 tahun menunjukkan tren positif dalam pendidikan dan bahwa kebijakan yang diterapkan cukup efektif. Namun evaluasi lebih lanjut perlu untuk memastikan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan.

b) Perbandingan Realisasi IKU Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan Tahun 2024

Adapun perbandingan realisasi IKU “Rata-Rata Lama Sekolah” tahun 2023 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.38
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Rata - Rata Lama Sekolah Tahun 2023 dan 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,16	8,41	100,1	8,29	8,42	100,1	Berhasil

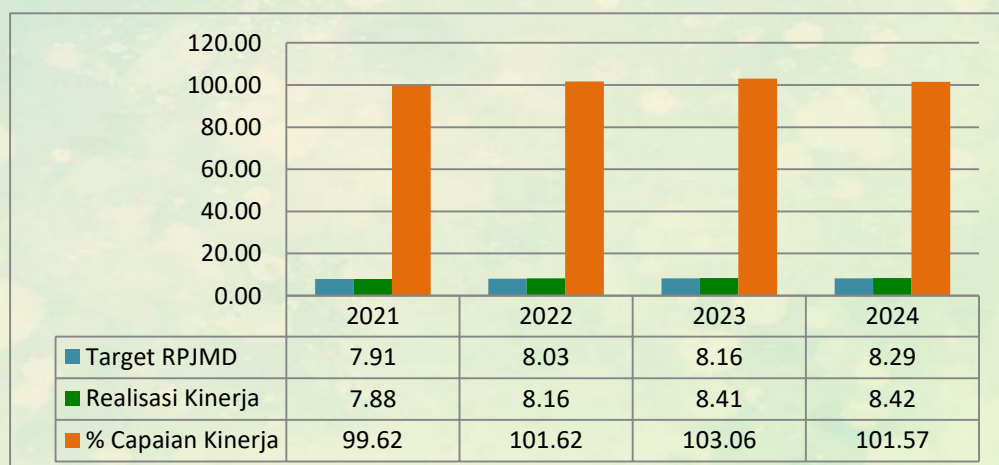
Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Indikator kinerja rata-rata lama sekolah baru ditetapkan menjadi indikator kinerja utama Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024. Dilihat dari tabel diatas, terdapat ketidakakuratan daam penetapan target tahun 2024 yang belum memperhatikan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Kedepan akan menjadi perhatian dalam penetapan target-target kinerja yang akan dicapai.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka rata-rata lama sekolah tidak terlalu mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2023 capaian angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,41 tahun, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai 8,42 tahun, dapat dilihat angka rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan sebesar 0,01 tahun.

c) Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Kabupaten Tahun 2024

Grafik 3.12
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2021-2024



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Dari grafik 3.12 diatas dapat dilihat ketercapaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman dari Tahun 2021 sampai Tahun 2024 sudah memenuhi target yang ada di Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman kecuali pada Tahun 2021.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman masih bisa dikatakan cukup tinggi dibanding beberapa Kabupaten lain di Sumatera Barat seperti Kabupaten Solok, Kepulauan Mentawai, Kab. Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman yang rata-rata capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah nya berada di bawah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk capaian tersebut dapat dilihat dari tabel yang ada di bawah ini:

Tabel 3.39
Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
Tahun 2023 dan 2024

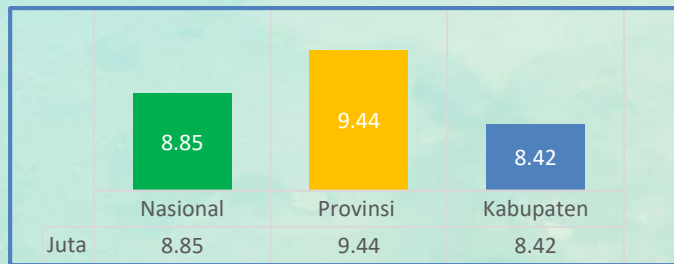
Nama	Tahun 2023	Tahun 2024
Sumatera Barat	9,28	9,44
Kepulauan Mentawai	7,76	8,03
Pesisir Selatan	8,58	8,81
Solok	7,90	7,91
Sijunjung	8,57	8,62
Tanah Datar	9,02	9,29
Padang Pariaman	8,41	8,42
Agam	9,22	9,23
Lima Puluh Kota	8,12	8,13
Pasaman	8,13	8,14
Solok Selatan	8,69	8,85
Dharmasraya	8,71	8,98
Pasaman Barat	8,81	8,99
Kota Padang	11,62	11,63
Kota Solok	11,36	11,37
Kota Sawahlunto	10,44	10,53
Kota Padang Panjang	11,94	12,00
Kota Bukittinggi	11,64	11,65
Kota Payakumbuh	10,88	10,89
Kota Pariaman	10,79	11,06

Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2024

d) Perbandingan Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2024

Perbandingan realisasi rata – rata lama sekolah nasional, provinsi dan kabupaten padang pariaman dapat dilihat dari grafik yang ada di bawah ini:

Grafik 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Rata - Rata Lama Sekolah
Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2024



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Dengan melihat perbandingan pada grafik diatas maka realisasi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 sebesar 8,42 tahun berada dibawah realisasi rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini memperlihatkan masih tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Padang Pariaman yang sebagian besar disebabkan karena kurangnya kemampuan orang tua untuk membiayai sekolah anak.

e) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang IKU

Keberhasilan pencapaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman di dukung oleh Program dan kegiatan yang berkaitan dengan mutu Pendidikan dan akses Pendidikan. Rata-rata lama sekolah dapat dikategorikan **"Berhasil"** karena didukung oleh beberapa faktor berikut :

1. Mutu Pendidikan

Mutu Pendidikan menjadi indikator yang mempengaruhi rata-rata lama sekolah. Pendidikan yang berkualitas dan bermutu selaras dengan peningkatan rata-rata lama sekolah. Banyak aspek yang terkait dalam mutu Pendidikan dapat mempengaruhi peningkatan angka rata-rata lama sekolah, diantaranya :

a. Bantuan Pembiayaan Peserta Didik

Dalam memastikan semua anak sekolah mendapatkan hak pendidikannya, pemerintah memberikan dukungan pembiayaan berupa dana Bantuan Operasional (BOS). BOS ini merupakan dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan. Program ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan Dana BOS sekolah dengan pagu sebesar Rp.42.467.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 39.564.524.371,00 atau sebesar 93,16% untuk Tingkat SD sedangkan untuk Tingkat SMP Dana BOS sebesar Rp. 16.916.000.000,00 dengan realisasi Rp.16.383.723.636,00 atau 96,85%.

b. Peningkatan mutu Satuan Pendidikan

Salah satu penilaian mutu di Satuan Pendidikan di berbagai jenjang dapat dilihat dari penilaian akreditasi satuan Pendidikan. Akreditasi sekolah merupakan proses penilaian komprehensif terhadap kelayakan satuan

Pendidikan. Mekanismenya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Badan Akreditasi Nasional (BAN). Pada tahun 2024 Sekolah Dasar (SD) yang berakreditasi A sebanyak 46 sekolah, akreditasi B sebanyak 303 sekolah dan akreditasi C sebanyak 62 sekolah. Sementara untuk akreditasi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berakreditasi A sebanyak 19 sekolah, akreditasi B sebanyak 30 sekolah dan akreditasi C sebanyak 12 sekolah.

c. **Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan**

Peningkatan Manajemen pelayanan Pendidikan untuk mempermudah proses perencanaan, pengelolaan dan pengawasan terhadap unsur-unsur Pendidikan mulai dari peserta didik, pendidik/tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana satuan Pendidikan yaitu dengan penggunaan sistem aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Melalui penggunaan Dapodik ini semua data substansi Pendidikan yang berasal dari sekolah dapat terintegrasi dan mempermudah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pendidikan.

Kegiatan yang mendukung penerapan DAPODIK ini yaitu penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan nonformal dengan pagu anggaran sebesar Rp 492.491.300,00. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman penggunaan aplikasi DAPODIK dalam administrasi kependidikan melalui kegiatan sosialisasi dan memberikan akses langsung pelayanan DAPODIK bagi yang ingin berkonsultasi secara langsung di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Gambar 3.20
Kegiatan Manajemen Pelayanan Pendidikan



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2024

d. **Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Non Formal**

Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Non Formal yaitu melalui penyelenggaraan Paket A,B dan C dan program pelayanan pendidikan lainnya untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pendidikan terkhusus bagi warga yang mengalami putus sekolah. Pendidikan non

formal ini ditujukan untuk penduduk yang berusia 7-18 tahun yang belum menamatkan pendidikannya atau mengalami putus sekolah. Program Pendidikan Kesetaraan (Paket) A diperuntukan setara pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), Paket B diperuntukan setara Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Paket C di peruntukan setara Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kegiatan yang mendukung capaian tersebut yaitu penyediaan biaya personil peserta didik non formal/kesetaraan dimana pendanaannya bersumber dari dana hibah dari pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diperuntukan bagi peserta didik di tingkat satuan pendidikan nonformal/kesetaraan. Pada tahun 2024, BOP ini dianggarkan dengan pagu sebesar Rp. 1.227.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 991.906.645,00 yang di salurkan untuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang ada di Padang Pariaman.

Gambar 3.21
Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Non Formal



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2024

- e. Program Peningkatan mutu Pendidik
 Pada program ini diutamakan untuk meningkatkan kualitas bagi pendidik (guru) dengan mengutamakan beberapa program seperti peningkatan kapasitas dan kualitas guru mengajar melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Selain itu program nasional yaitu guru penggerak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan nilai kepemimpinan bagi tenaga pendidik.

Kondisi keterbatasan tenaga pendidik pada jenjang Pendidikan SD dan SMP dipenuhi dengan tambahan tenaga pendidik dan kependidikan yang bersifat honor yang didukung oleh anggaran berupa insentif kepada guru honor, operator dan penjaga sekolah. Pada jenjang SD diberikan pagu anggaran sebesar Rp.7,450.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.7.450.100.000,00 atau sebesar 99,90%. Sementara untuk jenjang SMP diberikan pagu sebesar

Rp.1.476.000.000,00- yang terealisasi sebesar Rp. 1.474.500.000,00 atau sekitar 99,90%.

Gambar 3.22
Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, dilaksanakan beberapa inovasi antara lain :

1) INOVASI GERAKAN MILITER (Mengimplementasikan Literasi)

"Gerakan militer" adalah inovasi yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam membaca, menulis dan berpikir kritis, meningkatkan prestasi akademik, pengembangan karakter dan produk budi pekerti, meningkatkan kreativitas dan imajinasi stimuli kreativitas membaca buku cerita novel dan literatur lainnya.

Gambar 3.23
Inovasi Gerakan Militer



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2024

2) INOVASI UPAYA PRIMA

Upaya Prima merupakan inovasi yang bertujuan untuk pelestarian budaya daerah yang dilakukan oleh satuan pendidikan (PAUD, SD, dan SMP), meningkatkan minat generasi muda, memperkuat identitas daerah, mendukung pembangunan daerah, memperkaya budaya nasional, meningkatkan toleransi dan saling menghormati serta memperkuat daya saing bangsa.

Gambar 3.24
Inovasi Upaya Prima



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2024

3) INOVASI SIRATU BACA

Inovasi ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa Satuan Pendidikan SD dan SMP yang tergolong rendah karena minimnya fasilitas tempat literasi dan numerasi di sekolah. Jika hal ini dibudayakan setiap hari, maka akan membuat minat baca dan hitung siswa meningkat.

Gambar 3.25
INOVASI SIRATU BACA



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2024

4) INOVASI CETAR MEMBAHANA (Cerdas Tanggap dan Responsif Memberantas Bahaya Narkolema)

Inovasi ini bertujuan untuk membersihkan siswa dari bahaya NARKOLEMA (Narkoba Lewat Mata). Narkolema adalah pornografi berupa gambar, alur cerita, foto, maupun video yang melanggar norma-norma kesusilaan.

Gambar 3.26
Inovasi Cetar Membahana



5) INOVASI BELAFREND (Pembelajaran Berdiferensiasi)

Inovasi ini dilakukan untuk guru agar tidak lagi mengajar dengan satu metode yang sama untuk semua siswa, melainkan menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individual setiap siswa.

Gambar 3.27
Inovasi Belafrend



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2024

6) INOVASI Siswa Bersih dari Narkoba (BERSINAR) : Upaya Bersama Selamatkan Generasi Muda

Gerakan siswa bersih dari narkoba merupakan inisiatif yang sangat penting untuk melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Upaya ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga siswa itu sendiri.

Gambar 3.28
Inovasi Siswa Bersih dari Narkoba (BERSINAR)



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2024

7) INOVASI PROPPELA (Profil Proyek Pelajar Pancasila)

Pengertian PROPPELA atau Penguatan Profil Proyek Pelajar Pancasila adalah merupakan sebuah inovasi di dunia pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu Proppela? Proppela kepanjangan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah program pemerintah dalam implementasi Kurikulum merdeka yang bertujuan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik mengembangkan segala kemampuannya melalui proyek keterlibatannya langsung dengan persoalan

disekitarnya. Maksud Penyelenggaraan PROPPELA Penyelenggaraan PROPPELA (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) merupakan upaya untuk mengembangkan dan memperkuat pemahaman serta penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar.

Gambar 3.29
Inovasi Proppela



- 8) INOVASI SIMPATIK (Simak Pelajari Pembelajaran Berbasis TIK)
 Inovasi ini digunakan untuk meningkatkan pendidikan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman dengan pendekatan yang lebih menarik, interaktif, dan efektif dalam proses belajar-mengajar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Gambar 3.30
Inovasi Simpatik



- 9) INOVASI LEKAT GUNA (Lebih Dekat dengan Lagu Nasional)
 Inovasi lekat guna merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan nasionalisme kepada murid di PAUD, SD dan SMP sehingga dapat meningkatkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Gambar 3.31
Inovasi Lekat



2. Peningkatan Akses Pendidikan

Akses Pendidikan merupakan kemampuan pemerintah dalam memastikan ketersediaan satuan Pendidikan yang memadai untuk usia sekolah. Pemerataan akses Pendidikan menjadi faktor pendukung dalam pencapaian rata-rata lama sekolah. Jika satuan Pendidikan tersedia dan didukung oleh Kondisi sarana dan prasarana yang memadai sehingga penduduk usia sekolah dapat memperoleh Pendidikan yang layak.

Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan dengan kondisi baik, didukung oleh APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendidikan SD/SDLB didukung beberapa kegiatan, yaitu:

- Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.701.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.692.281.692,00 (99,48%);
- Pembangunan ruang guru/kepala sekolah /TU dengan pagu anggaran sebesar Rp.259.117.397,00 dan terealisasi sebesar Rp.208.617.134,00 (80,51%)
- Pembangunan perpustakaan sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.546.477.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.365.851.411,00 (66,95 %)
- Pengadaan mebel sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.355.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.354.028.409,00 (99,73%)
- Pengadaan perlengkapan sekolah dengan pagu anggaran 150,000,000,00 dan terealisasi sebesar Rp.148.560.000,00 (99,04%)
- Rehabilitasi sedang berat sarana ,prasarana dan utilitas sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.594.733.915,00 dan terealisasi sebesar Rp.593.952.698,00 (99,87%)
- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.890.749.813,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.512.822.631,00 (86,93 %).

Gambar 3.32
Peningkatan Akses Pendidikan



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendidikan SMP/SMPLB didukung beberapa kegiatan, yaitu:

1. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah dengan pagu anggaran sebesar Rp.450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.449.298.000,00 (99,48%)
2. Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah dengan pagu anggaran sebesar Rp.467.913.104,00 dan terealisasi sebesar Rp.466.745.200,00 (99,75%)
3. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.193.691.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.049.391.920,00 (93,42%)
4. Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.171.819.584,00 dan terealisasi sebesar Rp.171.331.500 (99,72 %)
5. Rehabilitasi sedang /berat laboratorium dengan alokasi anggaran sebesar Rp.175.442.184,00 dan terealisasi sebesar Rp.175.195.000 (99,785%)
6. Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.157.608.889,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.142.421.800,00 (98,69%)
7. Pengadaan mebel sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.516.665.514,00 dan terealisasi sebesar Rp.513.630.00 (99,41%)
8. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa dengan pagu anggaran sebesar Rp.227.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.221.920.000.00 (97,46%)
9. Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.00 dan terealisasi sebesar Rp.199.664.050,00 (99,83%)
10. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.833.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.823.141.900,00 (98,82%)
11. Pembangunan ruang kelas baru dengan pagu anggaran 315.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.314.875.000 (99,96%)

Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendidikan, dilaksanakan beberapa inovasi antara lain :

- 1) INOVASI RAMPAK (Ramah Lingkungan dan Peduli Anak)
"RAMPAK" atau Ramah Lingkungan dan peduli anak adalah merupakan sebuah inovasi di dunia pendidikan yang mana inovasi ini bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang ramah lingkungan dan peduli anak, dimana anak merasa nyaman untuk berada di sekolah sehingga membuat anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. RAMPAK diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan sekolah yang ramah lingkungan dan peduli anak dengan fasilitas berupa pojok literasi, tempat bermain anak yang rindang yang sesuai dengan kebutuhan anak serta menunjang pembelajaran anak sesuai dengan usianya.

Gambar 3.33
Inovasi Rampak



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2024

- 2) Inovasi SIMPELS (Sikap Peduli Lingkungan Sekolah)
 Inovasi SIMPELS merupakan gerakan yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sekolah, sehingga siswa terbiasa hidup tertib dan disiplin di mana saja berada.

Gambar 3.34
Inovasi SIMPELS



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2024

- 3) INOVASI JUMPA BERLIAN (Jumat Pagi Bersih Lingkungan)
 Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kebersihan di lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Jumat pagi oleh murid PAUD, siswa SD dan pelajar SMP sehingga terbiasa menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Gambar 3.35
Inovasi Jumpa Berlian



f) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Hambatan dalam Peningkatan capaian Rata-Rata Lama Sekolah dapat berupa :

1. Faktor Ekonomi, seperti :
 - Keterbatasan biaya pendidikan, terutama bagi keluarga yang kurang mampu.
 - Anak-anak yang harus bekerja untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga.
2. Kurangnya akses dan kelengkapan infrastruktur yang tersedia.
3. Keterbatasan tenaga pendidik yang berkualitas.
4. Rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Strategi yang dilakukan untuk pemecahan masalah tersebut antara lain:

1. Bantuan Subsidi Pendidikan
 - Beasiswa bagi siswa kurang mampu (PIP dan Baznas)
 - Program sekolah gratis atau subsidi biaya pendidikan
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan
 - Melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah
 - Untuk mendorong dan memberikan akses bagi pendidik yang ingin melanjutkan pendidikannya agar pendidik/guru yang ada di Kabupaten Padang Pariaman memiliki kualifikasi minimal S1 guna meningkat mutu pendidik.
 - Untuk pemenuhan guru per rombongan harus dilakukan perekrutan tenaga pendidik agar kekurangan pendidik/guru di satuan Pendidikan di tingkat SD dan SMP dapat di penuhi.
3. Dukungan Sosial dan Regulasi Pemerintahan
 - Sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat
 - Program wajib belajar 12 tahun dengan pengawasan ketat

Langkah kedepan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah adalah :

1. Meningkatkan Akses Pendidikan
 - Memberikan beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu
 - Mempermudah akses transportasi ke sekolah
2. Mengurangi Angka Putus Sekolah
 - Memberikan bantuan finansial atau program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
 - Menerapkan program sekolah inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.
 - Menyediakan program kejar paket bagi siswa yang putus sekolah.
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan
 - Meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan berkala.
 - Mengembangkan kurikulum yang relevan dan menarik.
 - Menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai.
4. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat
 - Kampanye pentingnya pendidikan hingga jenjang tinggi.

- Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja tahun 2024 :

Tabel 3.40
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	101,1%	94%	6,1%

Efisiensi Capaian kinerja = $100,1 \% - 100 \% = 0,1 \%$

Efisiensi Penyerapan Anggaran = $100 \% - 94 \% = 6 \%$

Total Efisiensi = $0,1 \% + 6 \% = 6,1\%$

Efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 6% dan efisiensi kinerja sebesar 0,1%. Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar 6,1%.



SASARAN STRATEGIS 8

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel

Sasaran Strategis “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel” merupakan turunan dari Misi Kabupaten Padang Pariaman yang ke-5 yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih Berkeadilan, Demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintah Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan. Sasaran Strategis ini diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu : Opini BPK Atas LKPD dan Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten. Masing-masing capaian Indikator Kinerja Utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Opini BPK Atas LKPD

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan keuangan. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji materi. Oleh sebab itu, opini WTP merupakan keharusan bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman karena merupakan cerminan terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang efektif, akuntabel dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan dan juga terwujudnya pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dalam urusan penunjang dibidang keuangan telah melakukan berbagai strategi dalam pengelolaan keuangan daerah yang didukung dengan pengawasan yang efektif dari Inspektorat.

Berikut ini perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2024 :

Tabel 3.41
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Opini BPK Atas LKPD Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
Opini BPK Atas LKPD	WTP	WTP	100%	Sangat Berhasil

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berhasil meraih Opini WTP Atas Laporan Keuangan Daerah dari BPK RI sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini merupakan Opini WTP ke-11 (sebelas) kali sejak tahun 2013.

(b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama “Opini WTP Atas Laporan Keuangan Daerah” adalah sebagai berikut :

Tabel 3.42
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Opini BPK Atas LKPD
Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2023			TAHUN 2024			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	Sangat Berhasil

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Jika dilihat capaian indikator kinerja tahun 2023 dan tahun 2024, dapat dilihat bahwa capaian IKU Kabupaten Padang Pariaman “Opini BPK terhadap LKPD” ini konsisten dikarenakan realisasi yang didapatkan adalah sama yaitu “WTP”.

Adapun kriteria yang dijadikan perhatian BPK dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan Standard Akuntansi Pemerintahan
2. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia (SAP).
3. Kecukupan Pengungkapan (*Adequate Disclosures*)
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping kelima kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (*no material uncertainties*), pengelolaan atas *cash flow* dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang sifatnya material.

Terkait dengan penilaian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 sudah mengatur tentang jenis opini yang diberikan sebagai salah satu bentuk hasil audit atas laporan keuangan Daerah yang terdiri atas :

1. Wajar Tanpa Pengecualian / WTP (*Unqualified Opinion*)
2. Wajar dengan Pengecualian / WDP (*Qualified Opinion*)
3. Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)
4. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan hasil penilaian kerja setiap pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang diamanatkan kepadanya, tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menjelaskan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu.

Opini WTP ini menjadi ukuran penting dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan yang baik

terhadap opini WTP ini dari tahun ke tahun menjadi penting dari kondusifnya pemerintahan daerah yang sedang berlangsung. Tindak lanjut rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bisa saja berbeda antar entitas pemerintah daerah yang satu dengan entitas pemerintah daerah lainnya, tergantung kualitas SDM, keterbatasan sarana dan prasarana, luasan wilayah, serta kompleksitas permasalahan yang ada di daerah.

Sehingga pada tahun 2024 Kabupaten Padang Pariaman melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai perangkat daerah penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Opini ini tertuang dalam LHP BPK RI Nomor 987/S-HP/XVIII.PDG/05/2024 tentang Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 pada tanggal 17 Mei 2024.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.43
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Opini BPK Atas LKPD
Tahun 2021-2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Opini BPK Atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Realisasi Indikator Kinerja “Opini BPK terhadap LKPD” pada tahun 2021-2024 selalu meraih hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya, realisasi kinerja pada IKU ini selalu mencapai target yang telah ditetapkan pada Dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

d) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Realisasi Provinsi Tahun 2024

Pada tahun 2024, seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) nya. Hal ini memperlihatkan Kabupaten Padang Pariaman berhasil meraih Opini WTP, sama dengan Kabupaten/Kota se- Provinsi Sumatera Barat.

e) Analisis Program dan Kegiatan Pencapaian IKU

Sebagai upaya memperoleh opini WTP dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Padang Pariaman, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah didukung dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.44
Program dan Kegiatan Pendukung IKU Opini BPK terhadap LKPD Tahun 2024

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	100%
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	100%
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100%
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100%
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100%
		Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	100%
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100%
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100%
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100%
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100%
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100%
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	100%
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100%
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%
		Penyusunan Standar Harga	100%
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%

	Pengamanan Barang Milik Daerah	100%
	Penilaian Barang Milik Daerah	100%
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100%

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2024

f) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Faktor penunjang keberhasilan indikator kinerja “Opini BPK terhadap LKPD” adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Inspektorat sebagai APIP dalam peningkatan kualitas pemeriksaan internal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- b. Kecepatan dan Ketepatan dalam menindaklanjuti temuan BPK RI
- c. Pemanfaatan dan implementasi SIPD dengan maksimal
- d. Percepatan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah dengan melakukan rekon secara intens
- e. Komitmen dengan perangkat daerah dalam penyusunan Laporan Keuangan tepat waktu
- f. Koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*money follow result*) dengan melakukan verifikasi RKA
- g. Menyusun surat edaran tentang Batasan pencairan dan percepatan penyelesaian pencairan dan kerjasama yang baik dengan Bank Nagari
- h. Peningkatan Kepatuhan perangkat daerah dalam menyampaikan Laporan Aset
- i. Inventarisasi Barang Milik Daerah secara berkala
- j. Pelaksanaan pembinaan dalam pemberian kodefikasi Barang Milik Daerah

Disamping faktor pendukung tersebut, terdapat juga faktor yang menghambat pencapaian kinerja antara lain :

- Kurangnya komitmen antara eksekutif dan legislatif dalam percepatan penyusunan APBD
- SDM Pengelola Keuangan pada perangkat daerah belum maksimal dalam memahami aturan pencairan dana (contoh dalam pengelolaan data gaji)
- Keterlambatan dalam pengiriman Laporan Realisasi Penggunaan Dana ke pusat
- Anggaran kas tidak proposional dan tidak sesuai dengan rencana kegiatan
- Masih kurangnya sosialisasi tentang azas penatausahaan keuangan
- Manajemen kas kurang maksimal
- Belum mempedomani ketentuan perundang-undangan terbaru
- Adanya temuan yang tidak ditindaklanjuti
- Belum terintegrasinya proses perencanaan dan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan
- Tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menyampaikan Laporan Aset masih kurang

- Pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah kurang optimal
- Belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan berorientasi pelayanan yang berbasis kinerja

Berikut beberapa upaya yang dilakukan untuk meraih kembali opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman :

1. Penyusunan Dokumen Penganggaran secara terperinci;
2. Perlunya peningkatan pembinaan SDM terkait penatausahaan keuangan;
3. Perlu adanya komitmen kepala perangkat daerah dengan kepala daerah,
4. Perlunya pembinaan dan peningkatan SDM terkait penyusunan Laporan Keuangan;
5. Percepatan pemenuhan kelengkapan dokumen penyusunan LKPD oleh seluruh perangkat daerah;
6. Meningkatkan kualitas rekon aset dan melaksanakan bimtek;
7. Inventarisasi Barang Milik Daerah secara berkala;
8. Meningkatkan *agreement* terkait optimalisasi kinerja secara akuntabel; dan
9. Penyesuaian dengan Perpres dan regulasi terkait.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.45
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Opini BPK Atas LKPD Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	100%	97,03%	2,97%

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,97% dari efisiensi anggaran dan capaian kinerja 100% berdasarkan hasil opini BPK terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024.

h) Penghargaan Yang Diterima

Kabupaten Padang Pariaman menerima beberapa penghargaan dalam pengelolaan keuangan pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.46
Penghargaan dalam Pengelolaan Keuangan yang Diperoleh Pada Tahun 2024

NO	PENGHARGAAN
1.	Opini WTP atas LKPD Tahun 2023 dari BPK RI
2.	Peringkat Kedua Pemerintah Daerah dengan Kinerja Pengelolaan Dana Desa terbaik dari KPPN Padang
3.	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Terbaik VI dalam Ketepatan Penyetoran Iuran Wajib Pegawai (IWP 8%), Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Iuran program Jaminan Kematian (JKM) Tahun 2024 dari PT. Taspen

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 3.36
Opini WTP atas LKPD Tahun 2024



Sumber : BPKD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 3.37
Peringkat Kedua Pemerintah Daerah dengan Kinerja Pengelolaan Dana Desa terbaik dari KPPN Padang



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 3.38
Penghargaan Terbaik VI dalam Ketepatan Penyetoran Iuran Wajib Pegawai (IWP 8%), Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Iuran program Jaminan Kematian (JKM) Tahun 2024 dari PT. Taspen



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2024

B. Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Evaluasi akuntabilitas kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada *hasil (result oriented government)* serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/107/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperoleh nilai 71,05 atau predikat "BB". Capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Berikut capaian Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB :

Gambar 3.39
Kick Off Meeting Evaluasi SAKIP Tahun 2024



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

a) Perbandingan Target dengan Realisasi IKU “Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten” Tahun 2024

Tabel 3.47
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	71 (BB)	71,05 (BB)	100,07%	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja “Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten” dengan total nilai sebesar 71,05 yang dikategorikan kedalam Tingkat Akuntabilitas Kinerja dengan perdikat “BB” kategori Sangat Baik. Hasil ini telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 71 (BB) dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,07%. Adapun interpretasi capaian ini termasuk “Sangat Berhasil”.

b) Perbandingan Realisasi IKU “Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten” Tahun 2023 dan Tahun 2024

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten” Tahun 2023 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.48
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dan 2024

Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	70,01(BB)	B (69,19)	98,83	71 (BB)	71,05 (BB)	100.07

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 dari 69,19 (B) menjadi 71,05 (BB) meningkat 1,86 poin. Peningkatan nilai tersebut menunjukkan bahwa adanya keseriusan dan komitmen penuh dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam meningkatkan implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman guna mewujudkan visi dan misi daerah.

Berikut ini perbandingan perolehan nilai SAKIP Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 dengan tahun 2024 berdasarkan aspek evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :

Tabel 3.49
Nilai Aspek Evaluasi SAKIP Tahun 2023 dan 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	2023	2024	Kenaikan
1	Perencanaan Kinerja	30	22,54	22,84	0,3
2	Pengukuran Kinerja	30	21,25	22,27	1,02
3	Pelaporan Kinerja	15	10,81	11,11	0,3
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,59	14,83	0,24
Nilai Hasil Evaluasi			69,19	71,05	1,86
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	BB	

Sumber : LHE AKIP dari KemenPANRB, 2024

Dilihat dari tabel diatas, komponen pengukuran kinerja adalah komponen yang mendapatkan peningkatan nilai paling besar dari 21,25 pada tahun 2023 menjadi 22,27 pada tahun 2024, meningkat 1,02 poin. Sedangkan komponen penilaian lainnya hanya mengalami kenaikan rata-rata 0,3 poin. Hal ini memperlihatkan bahwa komponen pengukuran kinerja pada tahun 2024 mendapatkan penilaian lebih baik karena Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja (SIMAK Kinerja) sebagai alat bantu pelaksanaan pengukuran kinerja.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.50
Perbandingan Realisasi IKU Nilai Evaluasi AKIP
Tahun 2021-2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	Nilai	B	B	BB	71 (BB)	68,50 (B)	68,86 (B)	69,19 (B)	71,05 (BB)

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Berdasarkan target jangka menengah pada RPJMD tahun 2021-2026, Indikator Kinerja “Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten” ditargetkan menjadi BB pada tahun 2023, tetapi baru dapat tercapai pada tahun 2024. Namun demikian, selama 2021-2024 nilai evaluasi AKIP Kabupaten Padang Pariaman selalu mengalami peningkatan.

d) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Provinsi dan Kabupaten Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat terkait IKU dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.51
Hasil Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	NILAI
1	KOTA PADANG	78,68
2	KOTA PAYAKUMBUH	76,01
3	KOTA BUKITTINGGI	71,43
4	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	71,05
5	KABUPATEN PESISIR SELATAN	68,94
6	KOTA SOLOK	68,59
7	KABUPATEN SOLOK	68,58
8	KABUPATEN TANAH DATAR	67,6
9	KABUPATEN DHARMASRAYA	67,24
10	KABUPATEN AGAM	67,11
11	KABUPATEN SIJUNJUNG	65,99
12	KAB.KEPULAUAN MENTAWAI	65,8
13	KOTA PADANG PANJANG	64,22
14	KOTA SAWAHLUNTO	63,6
15	KABUPATEN PASAMAN	63,1
16	KABUPATEN PASAMAN BARAT	63,01
17	KABUPATEN 50 KOTA	62,16
18	KABUPATEN SOLOK SELATAN	61,3
19	KOTA PARIAMAN	57,43
20	PROVINSI SUMATERA BARAT	78,98

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024

Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 berada pada posisi ke-4 jika dibandingkan dengan seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dimana pada tahun 2024 Kabupaten Padang Pariaman merupakan satu-satunya Pemerintah Daerah se-Sumatera Barat yang berhasil naik predikat dari “B” ke “BB”. Namun jika dibandingkan dengan Nilai Evaluasi AKIP Provinsi Sumatera Barat sebesar 78,98 (BB), masih perlu upaya peningkatan yang cukup signifikan dalam implementasi SAKIP di Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 3.40
Coaching Clinic Penyesuaian Pohon Kinerja Dan Dokumen Perencanaan Seluruh Perangkat Daerah Se- Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 3.41
Rapat Koordinasi Pengembangan Aplikasi SIMAK Kinerja Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2024

Gambar 3.42
Gladi Presentasi SAKIP Kepala Perangkat Daerah



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2024

Gambar 3.44
Pelaksanaan In-Depth Interview Evaluasi SAKIP
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2024

Disamping faktor-faktor pendukung tersebut, terdapat faktor penghambat dalam upaya peningkatan Nilai AKIP, diantaranya :

1. Kurangnya kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan dan pengelolaan kinerja.
2. Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan implementasi AKIP, seperti : peningkatan kapasitas SDM dalam bentuk Bimtek, sosialisasi, dan lain sebagainya, pengembangan aplikasi-aplikasi yang terkait dengan implementasi AKIP.
3. Masih lemahnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja internal pada perangkat daerah.

Untuk meningkatkan nilai AKIP, berikut upaya dan langkah kedepan yang harus dilakukan:

1. Komitmen yang kuat dari Kepala Daerah (Bupati Padang Pariaman) dalam rangka mendorong peran serta seluruh Perangkat Daerah guna peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Peningkatan komitmen dari seluruh perangkat daerah dan pegawai untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan oleh Kepala Perangkat

- Daerah dengan Bupati Padang Pariaman dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD.
3. Evaluasi *cascading* kinerja untuk meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan Pemda dan PD dengan memerhatikan *critical success factor* (CSF) dalam mencapai tujuan dan sasaran serta memperbaiki *cascading* (penjenangan) kinerja mulai dari level tertinggi hingga terendah
 4. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja (Simak Kinerja) Kabupaten Padang Pariaman.
 5. Integrasi aplikasi kinerja individu dengan SIMAK Kinerja
 6. Optimalisasi kinerja Tim Penyusun LKjIP Kabupaten dengan Tim Reviu dan Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah dengan melakukan pendampingan terhadap seluruh OPD dan Kecamatan dalam pelaksanaan Reviu LAKIP Pemerintah Daerah dan Evaluasi SAKIP OPD dan Kecamatan.
 7. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan faktor penghambat pencapaian kinerja.
 8. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal.
 9. Melakukan reviu atas keselarasan antara kegiatan, program serta sasaran strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan.

(f) Analisis Program dan Kegiatan Pencapaian IKU “Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten”

Tabel 3.52

**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Capaian
Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2024**

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp. 662.619.300,00	Rp. 584.766.719,00,00	88,25
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 19.700.000,00	Rp. 11.132.000,00	56,51
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Rp. 58.328.000,00	Rp. 54.909.705,,00	94,14
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 19.305.000,00	Rp.6.985.300,00	36,18
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 334.788.603,00	Rp. 332.589.401,00	99,34

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2024

(g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja “Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten” tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.53
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	100,07%	90,47%	9,6%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2024 efisiensi sumber daya untuk mencapai target indikator “Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten” adalah sebesar 9,6% dari efisiensi kinerja sebesar 0,07% dan efisiensi anggaran sebesar 9,53%. Namun jika merujuk kepada realisasi kinerja IKU ini dimana pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berhasil naik predikat Nilai SAKIP dari B ke BB maka efisiensi yang ada sudah sangat mendukung ketercapaian kinerja guna terwujudnya Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel.

(h) Penghargaan Yang Diraih

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award 2024 dengan nilai “BB” (Sangat Memuaskan). Pencapaian ini merupakan lompatan signifikan, mengingat dalam beberapa tahun terakhir, nilai SAKIP Padang Pariaman berada pada kategori “B”. Pencapaian ini diberikan apresiasi oleh Kementerian PANRB dengan pemberian penghargaan pada acara SAKIP Award Tahun 2024.

Gambar 3.45
Kabupaten Padang Pariaman menerima Predikat SAKIP BB “Sangat Baik”
pada Acara SAKIP AWARD Tahun 2024



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2024



SASARAN STRATEGIS 9

Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel

Sasaran Strategis “Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel” merupakan turunan dari Misi ke-5 Kabupaten Padang Pariaman. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini diantaranya adalah Indeks Merit System dan Indeks SPBE. Sistem merit merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin, dan pensiun pegawai.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

A. Indeks Merit System

Indeks Merit System merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana prinsip-prinsip sistem merit diterapkan dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan, khususnya dalam hal perekrutan, promosi, penilaian kinerja, dan pengembangan karier pegawai.

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Merit System Kabupaten Padang Pariaman tidak dapat disajikan karena tidak dilakukan penilaian. Sesuai dengan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor : B-2187/SM.00.00/07/2024 Perihal Penilaian Sistem Merit Manajemen ASN tahun 2024 tanggal 09 Juli 2024, untuk Tahun 2024 Penilaian Sistem Merit hanya dilakukan pada Provinsi, Kabupaten dan Kota yang terpilih. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 penilaian Indeks Merit System mengalami transisi dari KASN ke Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 91 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2021 tentang Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi tanggal 23 Agustus 2024 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan dan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara tanggal 4 September 2024.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Merit System Tahun 2024

Berikut perbandingan target dan realisasi capaian kinerja tahun 2024 indikator kinerja Indeks Merit System :

Tabel 3.54

Target dan Realisasi Nilai Indeks Merit System Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	2024		%	Interpestasi
	Target	Realisasi		
Indeks Merit Sytem	250	N/A	N/A	N/A

Sumber : BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Target ditetapkan sebesar 250 poin dengan kategori “Baik” untuk 8 (delapan) aspek penilaian dalam merit system.

Berdasarkan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Terdapat 8 Aspek penilaian sistem merit yaitu :

- Perencanaan Kebutuhan Pegawai;
- Pengadaan, Pembinaan Karir;
- Promosi dan Mutasi;
- Manajemen Kinerja;
- Penggajian Penghargaan dan Disiplin;
- Perlindungan dan Pelayanan; dan
- Sistem Informasi;

Karena tidak adanya realisasi nilai Indeks Merit System tahun 2024, capaian indikator ini tidak dapat diukur.

b) Perbandingan Realisasi Nilai Indeks Merit System Tahun 2023 dan Tahun 2024

Adapun perbandingan capaian realisasi Indeks Merit System tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.55

**Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Merit System
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	2023		2024		%	Interpestasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Indeks Merit System	N/A	140,5	250	N/A	N/A	N/A

Sumber : BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Indeks Merit System merupakan indikator yang baru ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024. Sementara pada tahun 2024 indikator ini tidak ada penilaian untuk Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan analisis perbandingan tahun 2024 dan tahun 2023.

Namun demikian, untuk mendapatkan gambaran dari indikator ini, dapat dilihat pada capaian tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.56
Nilai Sistem Merit Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

No	Aspek	2023
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai	35
2	Pengadaan	30
3	Pembinaan Karir	12.5
4	Promosi dan Mutasi	10
5	Manajemen Kinerja	15
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	25
7	Perlindungan dan Pelayanan	2
8	Sistem Informasi	11
Total Akhir Verifikasi		140,5

System Merit Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2023 mendapat nilai 140,5 dengan predikat “Buruk”. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kurang baiknya penerapan sistem merit di Kabupaten Padang Pariaman yang paling utama adalah lemahnya komitmen terhadap penerapan Sistem Merit dalam manajemen kepegawaian.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.57
Perbandingan Realisasi Indeks Merit System
Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Indeks Merit System	Nilai	N/A	N/A	N/A	250	N/A	158,5	140,5	N/A

Indikator Kinerja “Indeks Merit System” tidak dapat diperbandingkan realisasi kinerjanya dengan target RPJMD karena merupakan indikator yang baru digunakan pada tahun 2024.

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Dalam menerapkan sistem merit, terdapat beberapa faktor penghambat sebagai berikut :

- **Resistensi terhadap Perubahan:** Beberapa individu atau kelompok mungkin enggan menerima perubahan yang dibawa oleh sistem merit, terutama jika merasa nyaman dengan sistem lama yang mungkin lebih subjektif.
- **Kurangnya Pemahaman:** Pemahaman yang kurang memadai tentang konsep dan tujuan sistem merit dapat menghambat implementasinya. Sosialisasi dan edukasi yang efektif sangat penting untuk mengatasi hal ini.

- **Keterbatasan Sumber Daya:** Implementasi sistem merit yang efektif memerlukan sumber daya yang memadai, baik finansial maupun sumber daya manusia. Keterbatasan dalam hal ini dapat menjadi kendala.
- **Budaya Organisasi:** Budaya organisasi yang tidak mendukung nilai-nilai merit seperti transparansi, akuntabilitas, dan kinerja dapat menjadi penghambat.
- **Intervensi Politik:** Intervensi politik dalam proses rekrutmen, promosi, atau penempatan pegawai dapat merusak sistem merit.
- **Lemahnya Penegakan Hukum:** Penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran prinsip-prinsip merit dapat mengurangi efektivitas sistem ini.

Dengan mengatasi faktor penghambat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat meningkatkan implementasi sistem merit dan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, seperti peningkatan kinerja pegawai, pelayanan publik yang lebih baik, dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Berikut ini merupakan upaya atau strategi perbaikan kinerja kedepan, antara lain:

- a. Penguatan Komitmen Pimpinan:
 - Pimpinan harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap implementasi sistem merit.
 - Komitmen ini harus tercermin dalam tindakan dan kebijakan, bukan hanya kata-kata.
 - Pimpinan harus menjadi contoh dalam penerapan prinsip-prinsip merit.
- b. Sosialisasi dan Edukasi yang Efektif:
 - Program sosialisasi dan edukasi yang komprehensif tentang sistem merit perlu dirancang dan dilaksanakan.
 - Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman seluruh pegawai tentang konsep, tujuan, dan manfaat sistem merit.
 - Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, workshop, pelatihan, dan media komunikasi lainnya.
- c. Penyempurnaan Sistem Informasi:
 - Sistem informasi yang handal dan terintegrasi diperlukan untuk mendukung implementasi sistem merit.
 - Sistem ini harus mampu mengelola data kinerja pegawai, kompetensi, kualifikasi, dan informasi lain yang relevan.
 - Data ini akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait rekrutmen, promosi, mutasi, dan pengembangan pegawai.
- d. Pengembangan Kapasitas SDM:
 - Program pengembangan kapasitas yang berkelanjutan perlu dirancang untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
 - Pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan individu.
 - Pengembangan kapasitas juga mencakup peningkatan pemahaman tentang sistem merit dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukungnya.

e. Penegakan Transparansi dan Akuntabilitas:

- Proses rekrutmen, promosi, mutasi, dan pengembangan pegawai harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik.

e) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Untuk pencapaian indikator Indeks Merit System, pada tahun 2024 didukung oleh beberapa program sebagai berikut :

1. Program Kepegawaian Daerah dengan pagu Rp 1.438.461.959,00 dan realisasi sebesar Rp 1.124.215.065,00, persentase realisasi anggaran sebesar 78,15%.
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan pagu Rp 68.374.000,00 dan realisasi sebesar Rp 66.660.700,00, persentase realisasi anggaran sebesar 97,49%.

Gambar 3.46
Pelaksanaan Seleksi Terbuka terhadap Jabatan Eselon II



Sumber : BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 3.47
Pelaksanaan Ujian Dinas



Sumber : BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 3.48
Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Eselon II, III, IV dan Pejabat Fungsional



f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2024 untuk pencapaian indikator ini hanya dapat diukur pada efisiensi anggaran yaitu sebesar 24,36%, karena efisiensi kinerja tahun 2024 tidak dapat diukur.

B. Indeks SPBE

Nilai Indeks SPBE ditentukan berdasarkan hasil Evaluasi dari KemenpanRB terhadap seluruh K/L/D. Indeks SPBE ini diukur berdasarkan tingkat kematangan berdasarkan struktur domain (terdiri dari empat (4) domain), aspek (terdiri dari delapan (8) aspek) dan indikator (terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) indikator). Keempat domain meliputi Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen dan Domain Layanan SPBE.

Sesuai dengan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemertintah Daerah Tahun 2024, maka Nilai Indeks SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah 3,51 dengan predikat “Sangat Baik”.

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Nilai SPBE Tahun 2024

Berikut perbandingan target dan realisasi capaian kinerja tahun 2024 :

Tabel 3.58
Target dan Realisasi Nilai Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	2024		%	Interpestasi
	Target	Realisasi		
Indeks SPBE	3,12	3,51	112,50	Sangat Berhasil

Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pada tahun 2024 upaya untuk peningkatan prestasi pada IKU ini, dilakukan sesuai target dan standar penilaian yang telah ditetapkan. Dari Target yang ditetapkan pada pencapaian IKU tahun 2024 yakni 3,12 diperoleh realisasi sebesar 3,51 sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 112,50% dengan kategori “Sangat Berhasil”.

(b) Perbandingan Realisasi Nilai SPBE Tahun 2023 dan Tahun 2024

Adapun perbandingan capaian realisasi Nilai SPBE tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.59
Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indeks SPBE
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	2023		2024		%	Interpestasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Indeks SPBE	2,76	2,62	3,12	3,51	112,50	Sangat Berhasil

Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pencapaian Indeks SPBE tahun 2024 meningkat 0,89 poin jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa komitmen untuk memanfaatkan teknologi dalam pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman meningkat signifikan di tahun 2024.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini perbandingan realisasi capaian indikator kinerja utama “Indeks SPBE” dengan Target pada RPJMD Tahun 2021-2024 :

Grafik 3.14
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indeks SPBE Tahun 2021-2024



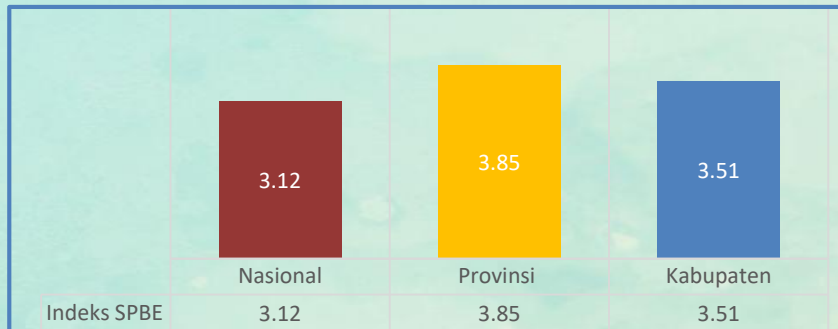
Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Realisasi Indikator Kinerja “Indeks SPBE” dari tahun 2021 sampai dengan 2024 relatif selalu meningkat, hanya pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan. Demikian juga capaian kinerjanya relatif selalu tercapai sesuai dengan target kecuali tahun 2023. Namun jika dilihat dari realisasi per tahun, realisasi tahun 2024 adalah kenaikan terbesar sejak tahun 2021, mencapai 0,89 poin.

d) Perbandingan Realisasi Nilai SPBE Kabupaten dengan Realisasi Provinsi dan Nasional Tahun 2024

Adapun perbandingan realisasi Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman dengan realisasi Provinsi Sumatera Barat dan realisasi Nasional pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.15
Perbandingan Realisasi Indeks SPBE Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2024



Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Jika dibandingkan, realiasi Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman masih berada dibawah realisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, namun berada diatas nilai Indeks SPBE Nasional.

e) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Pencapaian indikator Indeks SPBE didukung oleh beberapa program, yaitu :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan pagu Rp 1.169.230.000,00 dan realisasi sebesar Rp 1.167.445.738,00, persentase realisasi anggaran sebesar 99,84%.
2. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan pagu Rp 18.050.000,00 dan realisasi sebesar Rp 17.932.400,00, persentase realisasi anggaran sebesar 99,34%.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan pagu Rp 9.240.000,00 dan realisasi sebesar Rp 9.168.700,00, persentase realisasi anggaran sebesar 99,25%.
4. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan pagu Rp 2.685.612.750,00 dan realisasi sebesar Rp 2.619.694,785,00, persentase realisasi anggaran sebesar 97,54%.

Gambar 3.49
FGD Pembinaan Statistik Sektoral, Metadata, Rekomendasi Statistik, Peningkatan Standar Pelayanan, dan Finalisasi Penyusunan Publikasi



Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 3.50
Rakor OPD se-Padang Pariaman bersama Bupati guna Pemenuhan Target SPBE Pemkab. Padang pariaman



Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 3.51
Evaluasi Penyelenggaraan Smart City Kabupaten Padang Pariaman di KemenPAN RB



Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2024

f) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

1) Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan adanya Kebijakan Internal Perbub No. 59 Tahun 2023, tentang referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE yang berisi kebijakan internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana dan Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi dan Kebijakan Internal Audit TIK. Keputusan Bupati Nomor 236 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE merupakan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE.

• Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yaitu: Kebijakan Internal Perbub No. 59 Tahun 2023, tentang referensi Arsitektur dan domain

Arsitektur SPBE sebagai kebijakan internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana dan Audit TIK yang merupakan kebijakan baru menggantikan Perbub No. 25 Tahun 2021.

- **Kelemahan**

Kebijakan terkait Layanan Pusat Data, Pembangunan Aplikasi, dan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai tergolong paling lemah

2) **Perencanaan Strategis SPBE**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan adanya Keputusan Bupati Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Dokumen Arsitektur SPBE Keputusan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Peta Rencana SPBE Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE yang telah dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK serta Inovasi Proses Bisnis yang telah dilakukan berdasarkan Proses Bisnis yang ada (as-is).

- **Kekuatan**

Sudah ditetapkan dokumen arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE

- **Kelemahan**

Perencanaan Strategis terkait Layanan Pusat Data, Pembangunan Aplikasi, dan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai tergolong paling lemah

3) **Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan adanya dokumen siklus pengembangan aplikasi yang dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK Layanan Data telah dimanfaatkan seluruh unit dan juga telah memanfaatkan Pusat Data Nasional (PDN) Layanan Jaringan Intra telah dimanfaatkan seluruh unit dan telah terkoneksi dengan jaringan intra Provinsi Layanan Sistem Penghubung telah dimanfaatkan seluruh unit dan telah mengintegrasikan berbagai layanan.

- **Kekuatan**

Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat terlihat adanya Layanan Data yang telah dimanfaatkan seluruh unit dan juga telah memanfaatkan Pusat Data Nasional (PDN) Layanan Jaringan Intra telah dimanfaatkan seluruh unit dan telah terkoneksi dengan jaringan intra Provinsi Layanan Sistem Penghubung telah dimanfaatkan seluruh unit dan telah mengintegrasikan berbagai layanan. Ketiga layanan ini merupakan kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

- **Kelemahan**

Tidak ditemukan indikator yang memiliki tingkat kematangan rintisan dan terkelola yang dapat dianggap sebagai kelemahan.

4) **Penyelenggara SPBE**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan adanya Pelaksanaan tugas tim koordinasi sesuai dengan surat tugas terkait. Kolaborasi juga sudah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk tim kolaborasi secara formal.

- **Kekuatan**

Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini dapat terlihat adanya kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi sesuai dengan tugas yang dinyatakan pada kebijakan yang digunakan sebagai acuan Tim Koordinasi, dan menjadi kekuatan dalam Aspek Penyelenggara SPBE pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

- **Kelemahan**

Tidak ditemukan indikator yang memiliki tingkat kematangan rintisan dan terkelola yang dapat dianggap sebagai kelemahan.

5) **Penerapan Manajemen SPBE**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan telah dilaksanakannya Penerapan Manajemen resiko dengan pedoman Keputusan Bupati Nomor 110 Tahun 2023, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi dengan Keputusan Bupati Nomor 106 Tahun 2023, Penerapan Manajemen Data dengan Keputusan Bupati Nomor 105 Tahun 2023, Penerapan Manajemen Aset TIK dengan Keputusan Bupati Nomor 79 Tahun 2023, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dengan Keputusan Bupati Nomor 111 Tahun 2023, Penerapan Manajemen Pengetahuan dengan Keputusan Bupati Nomor 108 Tahun 2023, Penerapan Manajemen Perubahan dengan pedoman Keputusan Bupati Nomor 109 Tahun 2023, Penerapan Manajemen Layanan SPBE dengan pedoman Keputusan Bupati Nomor 107 Tahun 2023.

- **Kekuatan**

Terdapat pedoman dalam penerapan manajemen SPBE

- **Kelemahan**

Manajemen Perubahan, Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, dan Manajemen Data perlu perhatian lebih karena memiliki tingkat kematangan paling lemah

6) **Audit TIK**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan adanya Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE berdasarkan peta rencana SPBE 2023-2027 dan dilaksanakan oleh tim Auditor Internal yang ditetapkan pada Keputusan Bupati Nomor 23 tahun 2023.

- **Kekuatan**

Telah dibentuk auditor internal dan pedoman pelaksanaan audit.

- **Kelemahan**

Belum dilaksanakannya audit secara keseluruhan sesuai pedoman.

7) **Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan adanya pelaksanaan layanan perencanaan, penganggaran dan keuangan menggunakan SIPD yang telah terintegrasi satu sama lain, layanan pengadaan barang dan jasa yang telah menggunakan SPSE, layanan kepegawaian dengan menggunakan aplikasi kepegawaian yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIKAP untuk layanan kinerja pegawai, layanan kearsipan telah menggunakan aplikasi Srikandi, layanan pengelolaan barang milik daerah menggunakan SIMDA BMD, pengawasan internal dibantu dengan sistem elektronik *Whistle Blowing System (WBS)* dan layanan akuntabilitas kinerja organisasi menggunakan aplikasi SIMAK Kinerja.

- **Kekuatan**

Telah digunakan berbagai aplikasi untuk layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

- **Kelemahan**

Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Layanan Pengawasan Internal memiliki tingkat kematangan lebih rendah.

8) **Layanan Publik Berbasis Elektronik**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan adanya layanan pengaduan pelayanan publik menggunakan aplikasi SP4N Lapor, layanan data terbuka menggunakan portal satu data, layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menggunakan portal JDIH, layanan sektor publik 1 adalah aplikasi E_ BPHTB mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran dan memonitoring kewajiban pajak, layanan sektor publik2 yaitu e-Life Padang Pariaman adalah aplikasi yang bertujuan untuk pelaporan dan pencatatan proses kehidupan mulai dari lahir sampai meninggal, dalam implementasinya berkolaborasi dengan beberapa instansi, layanan sektor publik 3 adalah aplikasi “SIMPEL” (Sistem Informasi Perizinan Elektronik), merupakan aplikasi untuk memudahkan masyarakat mengurus perizinan secara online.

- **Kekuatan**

Telah digunakan berbagai aplikasi untuk peningkatan pelayanan publik.

- **Kelemahan**

Layanan Data Terbuka dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) memiliki tingkat kematangan lebih rendah.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pencapaian indikator ini, diperlukan upaya sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan baru yang mengatur secara rinci tentang layanan pusat data, pembangunan aplikasi, dan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.
2. Melakukan sosialisasi intensif terkait kebijakan yang telah disusun agar dapat diimplementasikan di semua OPD.
3. Menyusun dokumen rencana strategis SPBE yang terintegrasi dengan RPJMD dan visi pembangunan daerah.
4. Menyelaraskan kebijakan SPBE dengan kebijakan nasional untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas penerapannya.
5. Membentuk tim khusus untuk mengawasi implementasi rencana strategis SPBE.
6. Menyusun SOP yang mendukung implementasi kebijakan, manajemen perubahan, pelaksanaan audit keamanan SPBE dan pengelolaan dan pembaruan data.
7. Meningkatkan kapasitas server dan infrastruktur pendukung lainnya untuk memastikan layanan SPBE berjalan stabil dan aman.
8. Melakukan audit berkala terhadap sistem teknologi informasi untuk memastikan keandalan layanan.
9. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja tim koordinasi SPBE.
10. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan tentang manajemen risiko, keamanan informasi, dan manajemen data.
11. Mengintegrasikan sistem pengelolaan data berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan yang menunggang pencapaian indikator kinerja “Indeks SPBE” Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.60
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai Indeks SPBE Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks SPBE	112,50%	98,99%	13,51%

Jika disandingkan dengan persentase capaian kinerja yang diraih sebesar 112,50%, maka total efisiensi penggunaan sumber daya biaya serta efisiensi kinerja pada indikator kinerja ini adalah sebesar 13,51% dan memperlihatkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi kinerja IKU Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 sebesar 3,51.

h) Penghargaan Yang Diraih

Gambar 3.52
Penghargaan Kabupaten Terinformatif
pada Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik



Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 3.53
Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, SE. MM, Menerima Anugerah Sahabat Pers
Indonesia, Sebagai Penghargaan atas Bukti Harmonisasi
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Insan Pers



Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2024



SASARAN STRATEGIS 10

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Birokrasi merupakan suatu jalan bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang pada umumnya berkaitan dengan fungsi pelayanan publik. Misi Kabupaten Ke-5 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang efektif, Bersih Berkeadilan, Demokratis, Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif, Dan Transparan”. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman dilihat dari 2 indikator yaitu : Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik.

A. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan publik yang mencakup aspek kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi, pengaduan, dan inovasi. Indeks Pelayanan Publik merupakan hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) KemenPANRB.

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024, memperoleh nilai 4,29 kategori “A-” atau Sangat Baik, dengan rincian : Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak memperoleh nilai 4,23 kategori “A-” atau Sangat Baik, Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman memperoleh nilai 4,47 kategori “A-” atau Sangat Baik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh nilai 4,17 kategori “A-” atau kategori Sangat Baik.

a) Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024

Realisasi Indikator Kinerja Utama “Indeks Pelayanan Publik” tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.61
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,57	4,29	93,87	Berhasil

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Berdasarkan Tabel diatas, pada tahun 2024 nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Padang Pariaman sebesar 4,29 (Kategori Sangat Baik) belum terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 4,57 dan hanya mampu memperoleh capaian 93,87%. Hal ini memperlihatkan tingginya ekspektasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan masih diperlukan upaya peningkatan pada seluruh aspek pelayanan publik.

b) Perbandingan Capaian Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 dan Tahun 2024

Perbandingan realisasi IKU “Indeks Pelayanan Publik” tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.62
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,88	4,57	4,29	93,87	Berhasil

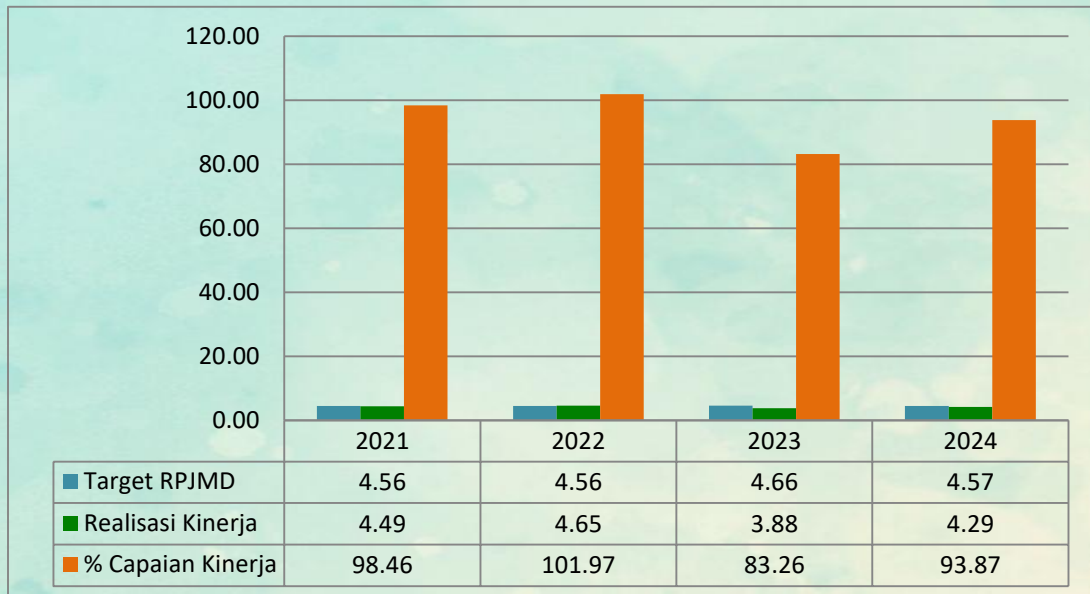
Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 sebesar 4,29 dan tahun 2023 sebesar 3,88. Jika dibandingkan, capaian kinerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan 0,41 poin. Hal ini memperlihatkan bahwa terdapat peningkatan pelayanan publik pada tahun 2024.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini perbandingan realisasi capaian indikator kinerja utama “Indeks Pelayanan Publik ” dengan Target pada RPJMD Tahun 2021-2024 :

Grafik 3.16
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021-2024



Realisasi Indikator Kinerja “Indeks Pelayanan Publik” tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian-capaian tahun sebelumnya relatif cukup baik dan meningkat dibanding tahun 2023. Realisasi terbaik dicapai pada tahun 2022 dengan realisasi kinerja 4,65 (predikat Pelayanan Prima) dan persentase capaian kinerjanya melebihi target yaitu sebesar 101,97%. Secara keseluruhan, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2024 rata-rata mencapai kinerja “Sangat Baik”.

d) Perbandingan Capaian Realisasi IKU Kabupaten dan Provinsi Tahun 2024

Adapun perbandingan capaian realisasi IKU “Indeks Pelayanan Publik” Kabupaten dan Provinsi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Kabupaten dan Provinsi Tahun 2024



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Tabel 3.63
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2024

NO	KAB/KOTA	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KAB/KOTA	KATEGORI
1	KOTA PAYAKUMBUH	4,51	4,48	4,48	4,5	A-
2	KABUPATEN PESISIR SELATAN	4,53	4,39	4,47	4,46	A-
3	KABUPATEN SOLOK	4,51	4,32	4,55	4,46	A-
4	KABUPATEN SIJUNJUNG	4,41	4,42	4,25	4,36	A-
5	KOTA PARIAMAN	4,22	4,21	4,21	4,32	A-
6	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	4,23	4,47	4,17	4,29	A-
7	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	4,52	4,32	3,96	4,27	A-
8	KABUPATEN TANAH DATAR	3,86	4,4	4,53	4,26	A-
9	KOTA PADANG PANJANG	3,51	4,45	4,45	4,17	A-
10	KABUPATEN PASAMAN	3,68	4,16	4,54	4,13	A-
11	KOTA BUKITTINGGI	3,62	4,44	4,44	4,13	A-
12	KOTA SOLOK	3,9	N/A	4,26	4,08	A-
13	KABUPATEN SOLOK SELATAN	3,52	4,22	3,77	3,84	B
14	KABUPATEN PASAMAN BARAT	3,57	3,16	3,77	3,5	B-
15	KOTA PADANG	2,98	3,52	3,68	3,44	B-
16	KAB.KEPULAUAN MENTAWAI	3,41	3,49	2,9	3,27	B-
17	KABUPATEN AGAM	3,26	3,82	2,66	3,25	B-
18	KABUPATEN DHARMASRAYA	4,2	2,41	3,03	3,21	B-
19	KOTA SAWAHLUNTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024

Capaian realisasi Indikator Kinerja “Indeks Pelayanan Publik” Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 sebesar 4,29 adalah lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Provinsi Sumatera Barat sebesar 3,64. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, capaian realisasi Kabupaten Padang Pariaman berada pada posisi 6 (enam) besar. Artinya, pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman relatif lebih baik dari rata-rata Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna layanan, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut terdapat beberapa faktor pendukung tercapainya target kinerja, antara lain sebagai berikut :

1. Koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKPP) dengan *stakeholders* dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Menjadikan hasil evaluasi dan rekomendasi KemenPANRB pada tahun sebelumnya sebagai salah satu patokan dalam perbaikan pelayanan.
3. Adanya monitoring, evaluasi dan pembinaan serta pendampingan terhadap

UKPP yang menjadi lokus evaluasi.

4. Respon yang maksimal dari UKPP yang di evaluasi/ yang dinilai, termasuk juga komitmen dari Kepala Dinas terkait/UKPP dalam mempersiapkan dokumen maupun sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan publik.

Dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan juga tidak terlepas dari hambatan dan masalah yang terjadi diantaranya adalah :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana layanan di UKPP.
2. Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan kompetensi jabatan pada UKPP.
3. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan pelayanan publik kedepan adalah :

1. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan publik.
3. Mengembangkan inovasi pelayanan publik dengan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
5. Meningkatkan pengelolaan pengaduan sebagai umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan pelayanan publik.
6. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pelayanan publik.

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Untuk mencapai Indikator kinerja Nilai Indeks Pelayanan Publik tersebut Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan tersebut diantaranya:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan anggaran sebesar Rp 800.715.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 713.056.354,00 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 89,05%. Program ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan.
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Anggaran pada Sub Kegiatan ini adalah Rp 80.512.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 78.106.500,00 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 97,01%. Sub Kegiatan ini digunakan untuk monitoring dan evaluasi persiapan penyelenggaraan PEKPPP. Disamping itu, juga dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dan hasilnya menjadi salah satu acuan untuk perbaikan

kualitas pelayanan publik yang tertuang sebagai janji perbaikan layanan pada UKPP.

Gambar 3.54
Pendampingan dan Evaluasi Internal PEKPPP



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 3.55
Sosialisasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 3.56
Publikasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Selaras dengan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah se Kabupaten Padang Pariaman bahwa Perangkat Daerah wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Perangkat Darah. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pelayanan publik semakin meningkat dan berkualitas sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pada tahun 2024 Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan (UKPP) yang dilakukan survei sebanyak 16 (enam belas) UKPP dengan landasan dasar pengukuran SKM sesuai PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks rata-rata SKM Padang Pariaman tahun 2024 adalah 85.31 dengan mutu pelayanan ‘B’ (baik).

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.64
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks Pelayanan Publik
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	93,87%	93,03%	6,97%

Pada capaian indikator ini, terdapat tingkat efisiensi sumber daya sebesar 6,97%. Angka ini hanya berasal dari efisiensi anggaran, tidak termasuk efisiensi kinerja karena realisasi kinerja tidak melampaui target.

B. Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan adanya penilaian dan sekaligus pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Indonesia dalam kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk melihat kemampuan, melihat keberhasilan dan melihat kekurangan dalam proses pengembangan lembaga pelayanan publik agar semakin efektif, akuntabel dan transparan. Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjadi tolok ukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik suatu Daerah. Sebagai Unit Kerja Penyelenggaraan Pelayanan berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 252 Tahun 2024 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Berdasarkan surat keputusan tersebut, Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan nilai 89.86 dengan Opini Kualitas Tertinggi kategori (A). Unit Kerja yang menjadi lokus penilaian dalam penyelenggaraan

Kepatuhan Pelayanan Publik adalah 7 (tujuh) Unit Kerja yaitu : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Puskesmas Sungai Limau dan Puskesmas Lubuk Alung. Masing-masing Unit Kerja Pelayanan mendapatkan Nilai Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik dengan Opini Kualitas Tertinggi dengan *range* nilai 88.00–100 sebanyak 5 (lima) Unit Kerja dan Opini Kualitas Tinggi dengan *range* nilai 78.00–87.99 sebanyak 2 (dua) Unit Kerja. Rata-rata Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 berada pada zona hijau.

a) Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKU Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024.

Realisasi Indikator Kinerja Utama “Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik” tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.65
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Indeks	82,83	89,86	108,48	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Sesuai dengan tabel diatas, realisasi Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik” sebesar 89,86 telah melampaui target 82,83 dengan capaian 108,48% kategori “Sangat Berhasil”.

b) Perbandingan Capaian Realisasi IKU Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dan Tahun 2024

Perbandingan realisasi IKU “Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik” tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.66
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kepatuhan
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Kategori
			Target	Realisasi	Selisih (%)	
Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Indeks	81,23	82,83	89,86	108,48	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 8,63 poin dimana realisasi 2024 dengan nilai 89,86 dan realisasi 2023 dengan nilai 81,23. Walaupun realisasi kinerja tahun 2023 dan 2024 berada pada zona hijau, namun

realisasi tahun 2024 merupakan opini kualitas tertinggi (A) berbeda dengan opini tahun 2023 yang masih berada pada kualitas tinggi kategori (B).

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.67
Perbandingan Realisasi Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2021-2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Indeks	N/A	N/A	N/A	82,83	75,31	78,2	81,23	89,86

Indikator kinerja Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan indikator baru yang digunakan dalam mengukur sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024. Oleh karena itu, tidak terdapat target kinerja Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang ditetapkan pada dokumen RPJMD untuk tahun 2021– 2023. Sehingga hanya dapat dianalisis berdasarkan realisasi kinerja dari tahun 2021-2024.

Dari tabel diatas, dapat dilihat Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik selalu meningkat dari tahun ke tahun, hal ini menggambarkan komitmen perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman.

d) Perbandingan Capaian Realisasi IKU Provinsi dan Kabupaten Tahun 2024

Grafik 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten dan Provinsi Tahun 2024



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Nilai Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 realisasi kinerjanya mencapai 91.65 dengan kategori (A) Opini Kualitas Tertinggi sementara nilai Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Padang Pariaman realisasi kinerja mencapai 89.86 dengan kategori (A) Opini Kualitas Tertinggi. Sama-sama berada pada zona hijau namun terpaut selisih nilai sebesar 1.79.

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Kepatuhan dalam penyelenggaraan pelayanan bagi pengguna layanan, dapat di tunjang oleh enam faktor yang sangat memengaruhi pelayanan, dan faktor pendukung dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pada dimensi input, kompetensi SDM menjadi faktor penunjang utama dalam penyelenggaraan pelayanan. Secara keseluruhan SDM pelaksana pelayanan sudah memahami tugas dan kewenangan. Semua UKPP telah mempunyai standar pelayanan.
2. Pada dimensi proses: semua UKPP telah berupaya maksimal menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
3. Pada Dimensi Output : dalam menyelenggarakan pelayanan, UKPP menyadari arti penting menghindari maladministrasi penyelenggaraan pelayanan.
4. Adanya monitoring dan evaluasi serta pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan dan persiapan evaluasi kepatuhan.

Dalam penyelenggaraan kepatuhan terhadap pelayanan publik juga tidak terlepas dari hambatan dan masalah diantaranya adalah :

1. Pada dimensi input, keterbatasan anggaran untuk peremajaan sarana dan prasarana pelayanan publik.
2. Pada dimensi proses: masih kurangnya partisipasi publik dalam proses penetapan dan pengawasan standar pelayanan.
3. Pada Dimensi Pengaduan: masih rendahnya kapasitas penyelenggara pelayanan dalam mengelola pengaduan sebagai bagian dari masukan pelanggan untuk perbaikan pelayanan publik.

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Penilaian sekaligus pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia menghasilkan Nilai Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan tersebut salah satunya:

- Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana

Pada Sub Kegiatan ini pada tahun 2024 di anggarkan sebesar Rp. 21.599.600 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 19.948.000 atau dengan persentase 92,35%. Anggaran digunakan untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik ke Unit Kerja Pelayanan. Unit Kerja yang menjadi prioritas pembinaan adalah Unit Kerja yang menjadi Lokus penilaian kepatuhan standar pelayanan oleh Ombudsman RI setiap tahunnya dan Lokus yang menjadi pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik oleh Kementerian PANRB Republik Indonesia . Tahun 2024 hasil penilaian Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan Padang Pariaman berada pada Zona Hijau dengan indeks kepatuhan rata-rata 89,86 dengan Opini Kepatuhan Kualitas Tertinggi.

Gambar 3.57
Monev dan Pembinaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 3.58
Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Nilai Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Padang Pariaman diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Pada Tahun 2024 Lokus Unit Kerja yang dinilai adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Puskesmas Sungai Limau dan Puskesmas Lubuk Alung. Dalam hal ini masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik tersebut harus menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Mempunyai Standar Pelayanan, Waktu pelayanan yang terukur, SOP yang jelas, tarif atau biaya yang jelas, keterbukaan informasi pelayanan serta sarana prasarana yang memadai adalah hal yang wajib dilakukan dan dimiliki oleh masing-masing Unit Kerja.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.68
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	108,48%	92,35%	16,13%

^{h)}
D

Pada capaian indikator ini, tingkat efisiensi sumber daya dicapai sebesar 16,13%. Angka ini berasal dari efisiensi anggaran sebesar 7,65% dan efisiensi kinerja sebesar 8,48%. Dapat dinyatakan bahwa tingkat efisiensi sumber daya untuk pencapaian indicator kinerja Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah sangat baik.

h) Penghargaan Yang Diperoleh

Gambar 3.59
Penganugrahan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik





SASARAN STRATEGIS 11

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran Strategis “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” merupakan penjabaran dari Misi Kabupaten Padang Pariaman yang Ke-6 yakni “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar Dengan Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Kearifan Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat”. Indikator Kinerja Utama dari sasaran ini adalah “Angka Usia Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting”.

Indeks kesehatan merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia. Ukuran yang digunakan sebagai bahan perhitungan Indeks Kesehatan yaitu Usia Harapan Hidup (UHH). Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata tambahan Usia seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah Usia Harapan Hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan UHH yang dimaksudkan adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

A. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Usia (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Usia Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program *Mortpak Lite*. Metode ini mengharuskan ketersediaan data jumlah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Metode *Trussel* selama ini dianggap cukup moderat untuk menghitung Usia Harapan Hidup dibandingkan dengan metode lainnya.

Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Berikut ini adalah perbandingan target dan capaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman :

a) Perbandingan Target dan Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Berdasarkan data dari BPS, capaian UHH Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 yaitu 70,10. Capaian ini dapat dibandingkan dengan target tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.69
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Usia Harapan Hidup	Tahun	69,90	70,10	100,29	Sangat Berhasil

Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Dari Tabel di atas dapat di lihat, Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 sebesar 70,10 tahun telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 69.90 tahun dengan kategori **“Sangat Berhasil”**, artinya angka usia harapan hidup ini adalah seorang bayi yang dilahirkan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 mempunyai harapan hidup selama 70,10 tahun ke depan atau rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seseorang akan mencapai Usia 70,10 tahun pada tahun kedepan.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi UHH pada tahun 2023 dengan Tahun 2024:

Tabel 3.70
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja UHH
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Usia Harapan Hidup	Tahun	68,99	69,70	101,03	69,90	70,10	100,29	Sangat Berhasil

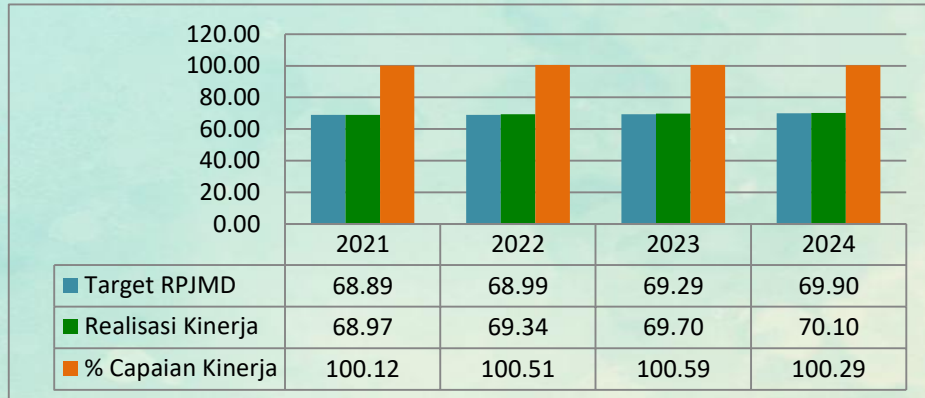
Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Usia Harapan Hidup tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi indikator UHH tahun 2023 yaitu sebesar 0,4 tahun. Artinya, harapan hidup penduduk Kabupaten Padang Pariaman bertambah 0,4 tahun dibandingkan dengan tahun 2023.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi UHH pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024:

Grafik 3.19
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja
Usia Harapan Hidup Tahun 2021-2024

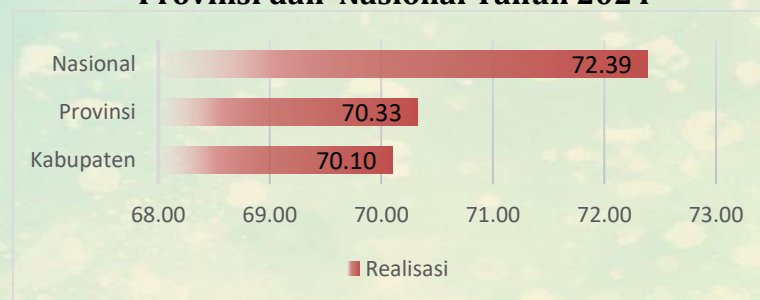


Realisasi Indikator Kinerja “Usia Harapan Hidup” jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sama-sama melebihi target. Namun, tahun 2024 mengalami sedikit penurunan capaian kinerja dari rata-rata capaian kinerja tahun 2021 sampai tahun 2023 sebesar 0,12%.

d) Perbandingan Realisasi IKU Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Tahun 2024

Adapun perbandingan terkait hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

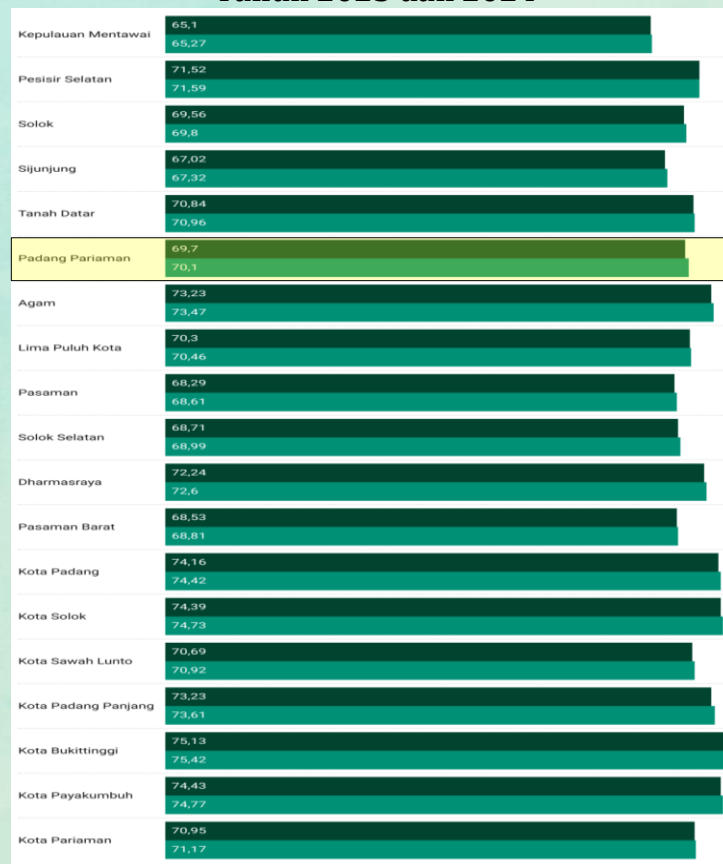
Grafik 3.20
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup Kabupaten,
Provinsi dan Nasional Tahun 2024



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat, dimana realisasi Kabupaten sebesar 70,10 tahun, sedangkan Provinsi Sumatera Barat yaitu 70,33 tahun dan realisasi Nasional sebesar 72,39 tahun. Hasil ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman masih perlu berbagai upaya untuk mencapai UHH setara dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Grafik 3.21
Perbandingan Capaian UHH Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023 dan 2024



Pada grafik diatas dapat dilihat secara keseluruhan UHH di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengalami peningkatan. UHH paling tinggi ada di Kota Bukittinggi dengan usia harapan hidup 75.42 tahun dan UHH terendah ada di Kepulauan Mentawai.

e) Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian IKU Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Angka usia harapan hidup dapat meningkat karena salah satu upaya yang dilakukan adalah pengendalian masalah kesehatan, sebagai berikut :

1. *Visite Rate*, adalah kunjungan rata-rata penduduk ke puskesmas dan wilayahnya dalam kurun waktu 1 tahun. Cara menghitung *visite rate* dengan rumus jumlah kunjungan sehat maupun sakit, dalam dan luar gedung dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk dalam 1 tahun. Pencapaian *Visite Rate* tahun 2024 adalah 1,23 dari target 2,6. Artinya dari seluruh penduduk Kabupaten Padang Pariaman, baru 47.31% yang memanfaatkan puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan *Visite Rate* tahun 2024, Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Kesehatan melakukan pengadaan, peningkatan sarana prasarana serta perbaikan sarana prasarana Puskesmas yaitu, diantaranya:

a. Pembangunan Pustu dan Rehabilitasi Puskesmas

Gambar 3.60

Pembangunan Pustu Batu Mangaum Sungai Garinggiang



Sumber : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 3.61

Pembangunan Pustu Durian Jantuang Batu Basa



Sumber : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2024

b. Penyediaan Vaccine Refrigerator

Vaccine Refrigerator agar vaksin tetap dijaga melalui ketersediaan peralatan penyimpan vaksin dan mekanisme rantai dingin yang baik. Hal ini bertujuan agar vaksin yang disimpan dapat terjaga dengan baik. Pada tahun 2024 ada pengadaan *vaccine refrigerator* untuk ke 25 Puskesmas yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 3.62

Uji Fungsi Vaccine Refrigerator



2. Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar.

Jumlah persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 mencapai 88%, Kabupaten Padang Pariaman memiliki 25 Puskesmas di wilayah kerjanya, dari 25 Puskesmas tersebut terdapat 22 Puskesmas yang sudah memiliki tenaga kesehatan sesuai standar dan 3 Puskesmas yang belum sesuai standar pada tahun 2024 yaitu Puskesmas Sungai Limau, Puskesmas Anduring dan Puskesmas Gasan Gadang.

Gambar 3.63

Penerimaan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Pada Penugasan Khusus Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024



Sumber : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2024

3. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas.

Untuk jumlah kasus kematian ibu selama kurun waktu tahun 2021-2023 cenderung menurun dan mengalami kenaikan di tahun 2024 seperti tampak pada grafik berikut:

Grafik 3.22
Angka Kematian Ibu Tahun 2021-2024



Sumber : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Jumlah kematian terbanyak pada tahun 2021, yaitu sebanyak 10 kasus kemudian kasus kematian menurun tahun 2022 menjadi 3 kasus dan 0 kasus di tahun 2023 dan meningkat kembali di tahun 2024 sebanyak 5 kasus kematian Ibu.

Gambar 3.64
Pemeriksaan USG di Puskesmas



Sumber : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 3.65
Kegiatan AMP



Sumber : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2024

4. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat mempunyai 12 indikator yang hasilnya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu :

- 1) Keluarga Sehat, bila $IKS > 0,800$;
- 2) Keluarga Pra Sehat, bila $IKS = 0,500$ s/d $0,800$;
- 3) Keluarga Tidak Sehat, bila $IKS < 0,500$.

Adapun indikator keluarga sehat saat ini ditetapkan sebanyak 12 indikator sebagai berikut:

- a. Keluarga Mengikuti Program KB
- b. Ibu Melakukan Persalinan di Fasilitas Kesehatan
- c. Bayi Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap
- d. Bayi Mendapat ASI Eksklusif
- e. Balita Mendapat Pemantauan Pertumbuhan
- f. Penderita Tuberculosis Paru Mendapatkan Pengobatan Sesuai Standar
- g. Penderita Hipertensi Melakukan Pengobatan Secara Teratur
- h. Penderita Gangguan Jiwa Mendapat Pengobatan dan Tidak Ditelantarkan
- i. Anggota Keluarga Tidak Ada Yang Merokok

- j. Keluarga Sudah Menjadi Anggota JKN
- k. Keluarga Mempunyai Akses Sarana Air Bersih
- l. Keluarga Memiliki Akses Atau Menggunakan Jamban Sehat

Berikut ini capaian Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2024:

Grafik 3.23
Indeks Keluarga Sehat Tahun 2021-2024



Sumber : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa, Indeks Keluarga Sehat tiap tahunnya mengalami peningkatan. Walaupun mengalami peningkatan tetapi masih masuk kategori Keluarga Tidak Sehat (< 0.5).

Gambar 3.66
Monitoring dan Evaluasi PIS-PK



Sumber : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2024

5. Nagari siaga aktif
Nagari siaga aktif adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan bencana dan kedaruratan kesehatan secara mandiri. Pengembangan Nagari Siaga Aktif dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dengan upaya fasilitasi proses belajar masyarakat Nagari dalam memecahkan masalah-masalah kesehatannya. Berikut adalah cakupan nagari siaga aktif pada tahun 2024:

Grafik 3.24
Nagari Siaga Aktif Tahun 2021-2024



Sumber : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian Nagari Siaga aktif sudah mencapai 100 %. Dari 103 Nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, 103 Nagari sudah sudah mencapai desa/nagari siaga aktif.

Gambar 3.67
Kegiatan Nagari Siaga Aktif



Sumber : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2024

f) Analisis Program dan Kegiatan Pencapaian IKU Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja. Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua Usia Harapan Hidup adalah sebanyak 4 (empat) program adapun pencapaian masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 31.629.259.965,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp 29.596.834.141,00 atau sekitar 93,57%, yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.776.495.600,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp 2.073.905.900,00 atau sekitar 74.70%, yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
- b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 551.831.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp 286.973.607,00 berarti realisasi keuangan 52%, yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- d. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 176.473.770,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp 157.147.767,00 atau sekitar 89.05%, yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut ini adalah analisis penggunaan sumber daya untuk kinerja Usia harapan Hidup :

Tabel 3.71
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Kinerja UHH
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	100,29%	80,97%	19,32%

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Padang Pariaman sudah melakukan efisiensi sumber daya untuk pencapaian indikator UHH. Persentase rata-rata capaian kinerja melebihi 100% dan penyerapan anggaran kurang dari 100%. Dapat dilihat tingkat efisiensi sebesar 19,32%, berasal dari efisiensi kinerja sebesar 0,29% dan efisiensi anggaran sebesar 19,03% dan dapat dikategorikan sangat baik.

h) Penghargaan yang Diraih

Gambar 3.68
Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Tahun 2024



Sumber : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2024

B. Prevalensi Stunting

Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan gizi serta kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020- 2024, menyatakan bahwa arah kebijakan pembangunan bidang Kesehatan adalah

meningkatkan pelayanan Kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotive dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, yang dicapai melalui 5 (lima) strategi, yaitu: Peningkatan Kesehatan ibu, anak, KB dan Kesehatan reproduksi, 2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat, 3) Peningkatan pengendalian penyakit, 4) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), dan 5) Penguatan system Kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Oleh karena itu, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat juga dilihat dari angka prevalensi stunting.

Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2023 secara Nasional, menunjukkan terjadi penurunan prevalensi balita berat badan kurang dari 17,1% menjadi 15,9%, penurunan prevalensi balita *stunted* dari 21,6% menjadi 21,5% dan peningkatan prevalensi balita gizi kurang (*Wasting*) dari 7,7% menjadi 7,8% Untuk hasil provinsi Sumatera Barat menunjukkan terjadi penurunan prevalensi balita berat badan kurang dari 19,4% menjadi 17,6%, penurunan prevalensi balita *stunted* dari 25,2% menjadi 23,6% dan peningkatan prevalensi balita gizi kurang (*Wasting*) dari 7,5% menjadi 9,3%. Sedangkan untuk Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan terjadi penurunan prevalensi balita berat badan kurang dari 20,4% menjadi 19,5%, penurunan prevalensi balita *stunted* dari 25% menjadi 19,4% dan peningkatan prevalensi balita gizi kurang (*Wasting*) dari 7,5% menjadi 12,4%.

Berikut ini adalah perbandingan target dan capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman :

a) Perbandingan Target dan Realisasi Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman :

Tabel 3.72
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Prevalensi Stunting
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Prevalensi Stunting	%	14	N/A	N/A	N/A

Sumber : E-PPGBM, Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pada tahun 2024, realisasi capaian prevalensi stunting masih menunggu hasil dari Survei Kesehatan Indonesia, namun berdasarkan e-PPGBM, prevalensi stunting di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 10,1% artinya dari 27.662 balita yang diukur, sebanyak 2.782 balita mengalami *stunted*.

Percepatan perbaikan gizi masyarakat diprioritaskan pada percepatan pencegahan stunting dengan target penurunan prevalensi stunting adalah 14% dan *wasting* 7% di tahun 2024. Dalam rangka upaya penurunan stunting dan wasting maka disusun

Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja 3 Kegiatan (IKK) dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020- 2024 yaitu: 1) Persentase Bumil KEK (target 10% tahun 2024), 2) Persentase kabupaten kota yang melaksanakan surveilans gizi (target 100% tahun 2024), 3) Persentase Puskesmas mampu Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita (target 60% tahun 2024), dan 4) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif (target 60% tahun 2024).

b) Perbandingan Target dan Realisasi Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Prevalensi Stunting pada tahun 2023 dengan Tahun 2024:

Tabel 3.73
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Prevalensi Stunting	%	21,5	19,4	109,77	14	N/A	N/A	N/A

*Sumber : SSGI, 2023
 E-PPGBM, Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2024**

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting tahun 2023 sebesar 19,4% dari target 21,5% dengan persentase capaian kinerja 109,77%. Sampai penyusunan laporan ini, Hasil Survei Kesehatan Indonesia untuk Prevalensi Stunting tahun 2024 belum dirilis sehingga capaian kinerjanya tidak dapat diperbandingkan.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Prevalensi Stunting pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024:

Tabel 3.74
Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Prevalensi Stunting Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting	%	N/A	N/A	N/A	14	28,3	25	19,4	N/A

**Sumber : e-PPGBM, Dinkes Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024*

Realisasi Indikator Kinerja “Prevalensi Stunting” pada tahun 2021 sampai dengan 2023 angka prevalensi stunting semakin menurun. Hal ini memperlihatkan bahwa kinerja untuk penurunan prevalensi stunting selalu meningkat.

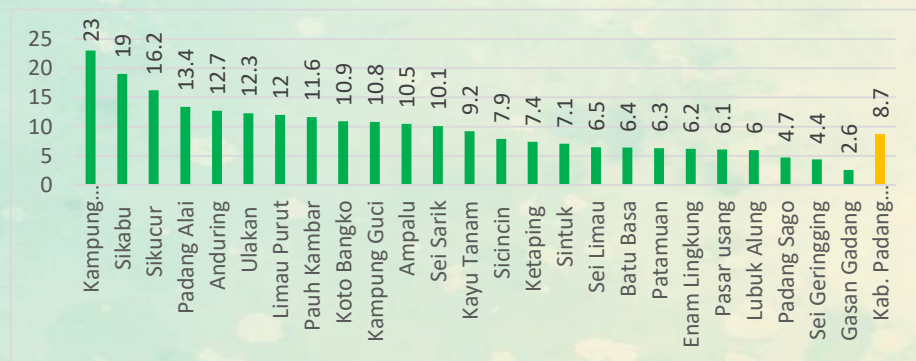
d) Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian IKU Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menurunkan angka prevalensi stunting dipengaruhi oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Penurunan Capaian Ibu Hamil Risiko Kekurangan Energi Kronik (KEK)

Kurang Energi Kronik adalah kurangnya asupan energi yang berlangsung relatif lama. Keadaan KEK pada ibu hamil jika tidak segera ditangani akan menyebabkan gangguan Kesehatan bagi ibu dan janin yang dilahirkan seperti keguguran, bayi BBLR bahkan kematian. Sehingga wajib dilakukan pengukuran status gizi pada ibu hamil untuk dapat menentukan tindakan segera. Berikut Persentase ibu hamil risiko Kurang Energi Kronik (KEK) Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 :

Grafik 3.25
Persentase Ibu Hamil KEK Tahun 2024



Sumber : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Dari grafik diatas dapat dilihat rata-rata Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 sebesar 8.7%. Angka ini sudah mencapai target indikator kinerja gizi sebesar 10% tahun 2024.

Gambar 3.69
Penurunan Bumil KEK



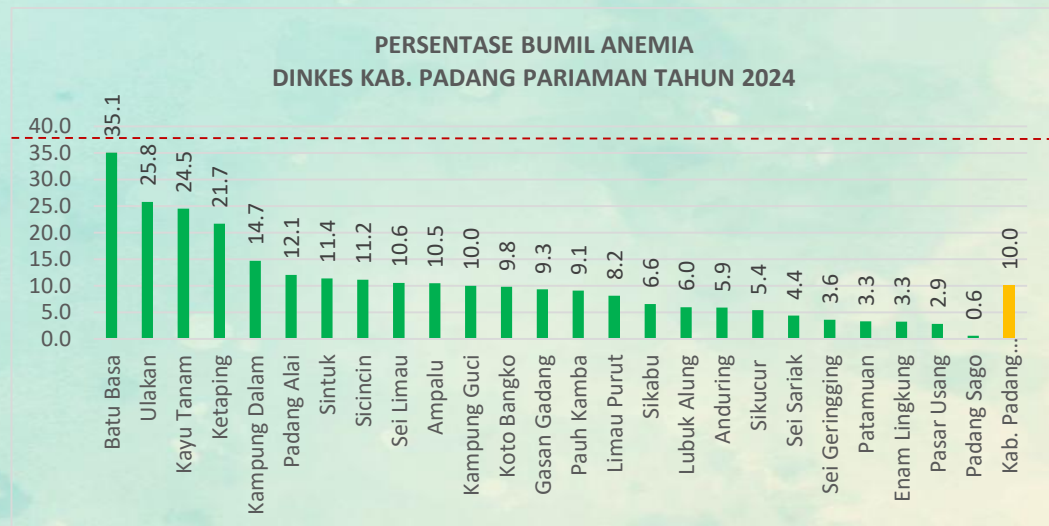
Sumber : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2024

b. Penurunan Capaian Ibu Hamil Anemia

Anemia pada ibu hamil menjadi salah satu penyebab terjadinya bayi BBLR dan pendarahan pada saat persalinan yang berujung pada kematian ibu. Anemia

sebagai indikator rendahnya kualitas kesehatan dan gizi. Ibu hamil anemia adalah ibu hamil dengan kadar Hb kurang dari 11,0 g/dl. Berikut Persentase ibu hamil Anemia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 sebagai berikut :

Grafik 3.26
Ibu Hamil Anemia Tahun 2024



Sumber : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Dari grafik diatas dapat dilihat rata-rata Persentase ibu hamil Anemia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 sebesar 10,0%, angka ini sudah mencapai target indikator kinerja gizi sebesar 33,0% tahun 2024. Dari 25 Puskesmas ada satu Puskesmas dikabupaten Padang Pariaman yang belum mencapai target ibu hamil anemia yaitu Puskesmas Batu Basa (35,1%).

Gambar 3.70
Pemberian Tablet MMS



Sumber : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2024

c. Tatalaksana Gizi Buruk Pada Balita

Bayi lahir dengan berat rendah yaitu bayi lahir hidup dengan berat badan <2500 gram. Persentase capaian bayi dengan BBLR (Berat Badan <2500 gram)

Kabupaten Padang Pariaman di tahun 2024 sudah mencapai target, dengan target indikator program gizi KIA tahun 2024 yaitu 2,5%. Rata-rata capaian BBLR Kab. Padang Pariaman sebesar 0,2%.

Gambar 3.71
Pemberian PMT Pada Balita

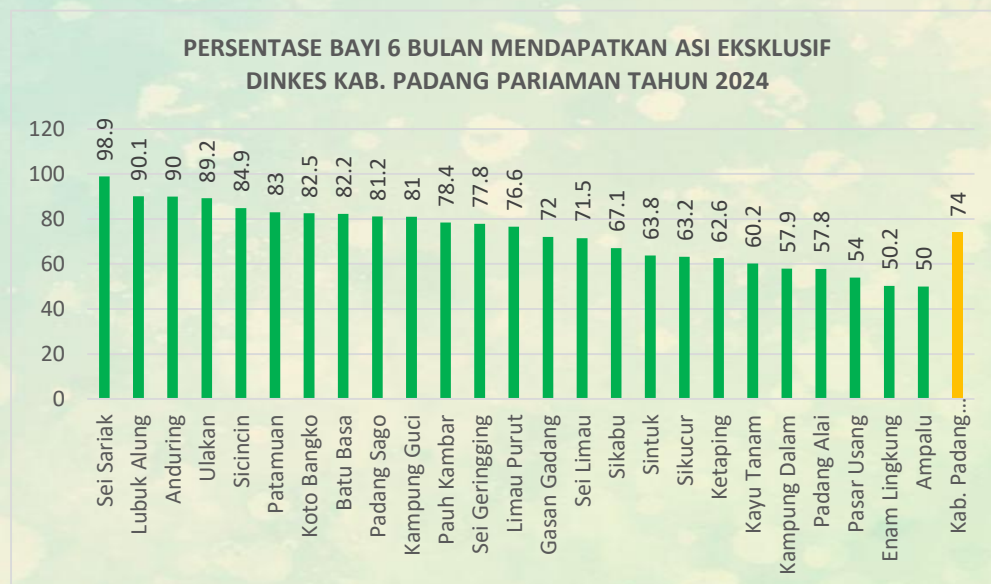


Sumber : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2024

d. Persentase ASI Eksklusif 6 bulan

ASI Eksklusif adalah memberikan hanya ASI tanpa memberikan makanan dan minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan, kecuali obat dan vitamin. Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan yang terbaik dan sempurna untuk bayi, karena mengandung semua gizi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bayi. Berikut adalah diagram persentase capaian bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Kab. Padang Pariaman Tahun 2024.

Grafik 3.27
ASI Eksklusif Tahun 2024



Sumber : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Kab. Padang Pariaman sudah mencapai target, dengan target indikator program gizi KIA tahun 2024 yaitu 55%. Pada

grafik cakupan ASI Eksklusif Tahun 2024 bisa dilihat rata-rata capaian kabupaten sebesar 74,0%, Dari 25 Puskesmas masih ada 3 Puskesmas yang belum mencapai target, yaitu Puskesmas Pasar Usang, Puskesmas Enam Lingkung dan Puskesmas Ampalu.

Gambar 3.72
Pelaksanaan Intervensi Serentak Bagi Petugas Gizi, Pengelola Anak, PJ Promkes dan Bidan Desa di Wilayah Kerja Puskesmas Ulakan



Sumber : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 3.73
Rakor Rencana Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Intervensi Serentak Stunting



Sumber : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 3.74
Pemberian PMT Berbahan Pangan Lokal Bagi Balita Yang Bermasalah Gizi



Pemberian secara langsung PMT pada Balita oleh Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Padang Pariaman sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PMT di wilayah kerja Puskesmas

Gambar 3.75
Pelaksanaan Pos Gizi dengan Dana Desa di Bawah Binaan Puskesmas



Sumber : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Dalam upaya menurunkan angka stunting, Kabupaten Padang Pariaman melakukan upaya langkah kedepan :

1. BAYI BALITA

- a) Pemantauan berkala pada balita dengan status T, *Underweight* dan *Wasting*
- b) Pemberian Makanan Tambahan terhadap balita T, *Underweight* dan *Wasting*.
- c) Pemantauan secara berkala dan berkelanjutan pada balita gizi buruk.
- d) Pemetaan ulang puskesmas mampu tata laksana gizi buruk
- e) Pelaksanaan KN sesuai jadwal dan berkualitas
- f) Persamaan persepsi Defenisi Operasional ASI Eksklusif dan Optimalisasi inputan ASI Eksklusif di aplikasi Sigizi Kesga (E-Ppgbm)
- g) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap balita stunting dengan BB/U Normal dan balita *wasting* dengan BB/U Normal, TB/U Normal.
- h) Optimalisasi inputan data sesuai dengan seluruh indikator gizi kia yang ada di e-ppgbm.
- i) Optimalisasi pelaksanaan kelas ibu balita sesuai dengan juknis/juklak.

2. BUMIL

- a. Penguatan pendampingan dan pemantauan ibu hamil anemia dan KEK serta Bumil Resti dan faktor resiko lainnya oleh tenaga kesehatan (pemantauan wilayah setempat)
- b. Optimalisasi pelaksanaan kelas ibu hamil sesuai dengan juknis/juklak.

3. REMAJA

- a. Melakukan skrining anemia pada remaja putri dengan melakukan pemeriksaan Hb
- b. Melakukan pemantauan terhadap konsumsi Tablet Tambah Darah (memastikan TTD dikonsumsi remaja putri)
- c. Melakukan tatalaksana anemia pada remaja putri
- d. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Remaja (PKPR) di sekolah dan puskesmas

e) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Capaian IKU Tahun 2024

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian Prevalensi Stunting adalah sebanyak 2 program yang tertuang dalam 2 sub kegiatan adapun pencapaian masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran untuk Sub Kegiatan sebesar Rp 191.960.700,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp 174.563.028,00 atau sekitar 90.94%, yang termasuk dalam program ini adalah Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran untuk Sub Kegiatan sebesar Rp 1.377.932.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp 1.211.289.400,00 atau sekitar 87.91%, yang termasuk dalam program ini adalah Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut ini adalah analisis sumber daya untuk indikator kinerja Prevalensi Stunting :

Tabel 3.75
Efisiensi Sumber Daya Indikator Kinerja Prevelensi Stunting

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	N/A	89.43%	N/A

Pada tabel diatas, total efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2024 belum dapat digambarkan, namun dapat dihitung efisiensi biayanya sebesar 10,57%.



SASARAN STRATEGIS 12

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran strategis “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat” merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi ke-6 yaitu “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat”. Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Tingkat Kemiskinan.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi : $\text{Jumlah Penduduk Miskin} / \text{Jumlah Penduduk Seluruhnya} \times 100\%$

Adapun realisasi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, berdasarkan buku Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2025 adalah 6,27%.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan target dan realisasi kinerja IKU “Tingkat kemiskinan” pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.76
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Tingkat Kemiskinan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			
		Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
Tingkat kemiskinan	%	5,80	6,27	91,90	Berhasil

Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat Tingkat Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 adalah 6,27%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 5,80%, maka capaian kinerja indikator ini adalah 91,90% dengan interpretasi “Berhasil”. Meskipun penurunan ini belum mencapai target pada tahun 2024, namun keberhasilan ini patut diapresiasi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah berupaya keras untuk mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti program bantuan sosial, pelatihan vokasional, dan pengembangan infrastruktur.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

Adapun perbandingan target dan realisasi kinerja IKU “Tingkat Kemiskinan” tahun 2023 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.77
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 dan Tahun 2024

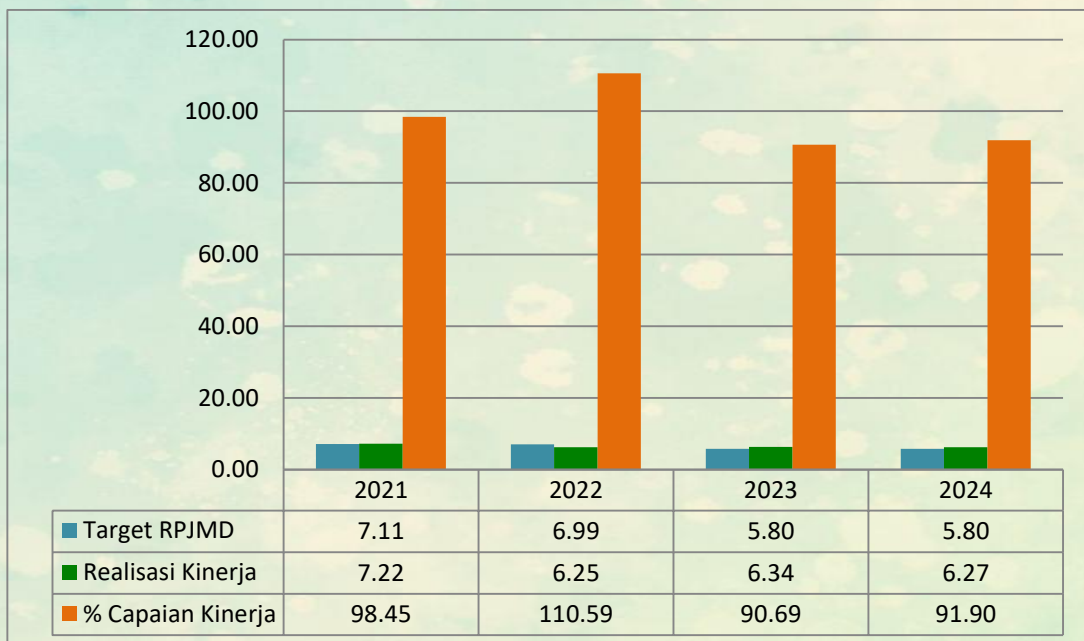
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Tingkat Kemiskinan	%	5,80	6,34	90,69	5,80	6,27	91,90	Berhasil

Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 Kabupaten Padang Pariaman memperoleh capaian IKU “Tingkat Kemiskinan” dengan realisasi sebesar 6,27% dari target 5,80%. Persentase capaian sebesar 91,90% dengan interpretasi “Berhasil”. Hasil ini lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 6,34% dari target 5,80% dengan persentase capaian 90,69%. Persentase peningkatan capaian kinerja dari tahun 2023 ke 2024 adalah sebesar 1,21%.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Grafik 3.28
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja
Tingkat Kemiskinan Tahun 2021-2024



Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Realisasi Indikator Kinerja “Tingkat Kemiskinan” pada tahun 2021 sampai tahun 2024 mengalami fluktuasi dengan kisaran diatas 6%. Dalam rentang RPJMD sampai dengan 2024, hanya pada tahun 2022 yang berhasil melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 110,59%, namun semuanya masih termasuk kategori “Berhasil” dengan capaian diatas 90%.

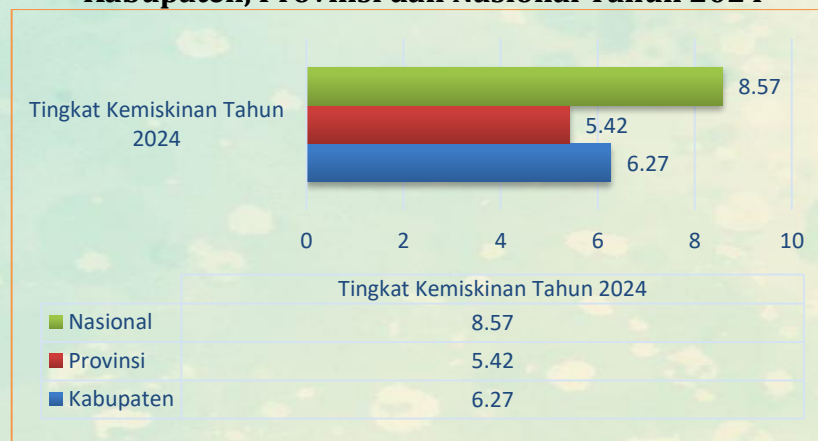
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan telah menunjukkan hasil yang positif. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh. Pemerintah dan masyarakat perlu terus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

Dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu terus meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan, seperti memperluas cakupan program bantuan sosial, meningkatkan bantuan usaha bagi masyarakat miskin, dan mempercepat pengembangan infrastruktur. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, diharapkan target penurunan tingkat kemiskinan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

d) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2024

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.29
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2024



Sumber : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Perbandingan realisasi tingkat kemiskinan Kab. Padang Pariaman pada tahun 2024 dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat lebih rendah dari tingkat kemiskinan Kab. Padang Pariaman dengan selisih 0,85%.

Sementara tingkat kemiskinan Kab. Padang Pariaman pada tahun 2024 berada di bawah angka kemiskinan nasional dengan selisih 2,3%. Tingkat kemiskinan nasional berdasarkan dari data bulan September 2024 sebesar 8,57%.

e) Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian IKU Tingkat Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Kemiskinan :

1. Adanya Komitmen dan dukungan dari pemerintah
2. Terjalannya kerjasama dengan organisasi non-pemerintah, perangkat daerah dan Kemensos-RI
3. Ada akses ke sumber daya seperti keuangan, teknologi, dan informasi
4. Pemberian pelatihan kepada UMKM Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi
5. Peningkatan pembiayaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat miskin

Disamping faktor-faktor pendukung tersebut, terdapat pula hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja Tingkat Kemiskinan :

1. Keterbatasan sistem dan mekanisme yang efektif untuk menangani kemiskinan.
2. Keterbatasan anggaran dan SDM untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Kabupaten Padang Pariaman pada tahun mendatang, terdapat beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain :

- 1) Meningkatkan upaya menurunkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui :
 - a. Pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PPKS lainnya dengan melakukan kegiatan fasilitasi manajemen usaha bagi masyarakat miskin, PKH, verifikasi dan validasi basis DTKS, serta penyaluran dan monitoring bantuan Rastra dan BPNT.
 - b. Pelaksanaan program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) dengan melakukan kegiatan rehabilitasi bagi eks pengguna NAPZA, dan pelayanan penyandang masalah sosial di masyarakat.
 - c. Pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan melakukan kegiatan pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana, pembinaan lanjut usia terlantar, dan pengadaan bahan logistik bagi korban bencana.
 - d. Pelaksanaan program pembinaan anak terlantar dengan melakukan kegiatan pemulangan dan penanganan anak, orang terlantar ke daerah asal dan pelayanan rehabilitasi bagi anak terlantar.
 - e. Pelaksanaan program pembinaan para penyandang cacat dan trauma dengan melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma, dan usaha ekonomi produktif bagi penyandang disabilitas
 - f. Pelaksanaan program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan melakukan kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, pemberdayaan 4 pilar sosial, pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial, pemeliharaan TMP kusuma bangsa dan tugu perjuangan lainnya, forum komunikasi eks pejuang dan bulan bakti karang taruna.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup korban bencana melalui penyaluran bantuan melalui pelaksanaan program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan kegiatan

Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di *Trauma Centre* Termasuk bagi korban bencana dan pengadaan bahan logistik bagi korban bencana.

- 3) Mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui melalui :
 - a. Pelaksanaan program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, kegiatan Penyuluhan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA) serta kegiatan Pemantauan dan Pelaporan Pangarusutamaan Gender Kabupaten Padang Pariaman.
 - b. Pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan melakukan kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan, dan Peningkatan Kapasitas SDM Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI).
 - c. Pelaksanaan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan melakukan kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usahanya.

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Untuk mewujudkan agar indikator ini tercapai, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan berbagai upaya. Adapun program yang dilakukan untuk mendukung sasaran ini adalah :

1. Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
Kegiatan ini dilaksanakan berupa :
 - Penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat miskin dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya sebanyak 309 orang dengan anggaran Rp. 140.035.700,- di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang langsung diserahkan oleh Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) yaitu Ibu Yusrita Suhatri Bur dan didampingi Dinas Sosial P3A.
 - Penyaluran bantuan sembako berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2024 diberikan kepada keluarga miskin berdasarkan data DTKS Kementerian Sosial RI, penyaluran bantuan melalui transfer kerekening KPM untuk pembelian kebutuhan sembako melalui PT POS Indonesia yang ditunjuk. Nilai bantuan yang disalurkan sebesar Rp. 200.000,00 per bulan. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 23.688 KPM dengan anggaran sebesar Rp. 4.737.600.000,-
2. Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 299.999.900,-. Kegiatan pada program ini diantaranya adalah :

- a. Kegiatan Penyediaan Permakanan
Kegiatan ini berupa pemberian bantuan sembako dengan rincian sebagai berikut :
 - Pemberian bantuan sembako kepada 30 orang disabilitas terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan 86 orang disabilitas terlantar dari APBN Kemensos RI;
 - Pemberian bantuan sembako kepada 40 Orang lansia terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan 191 orang lansia terlantar dari APBN Kemensos RI.
 - Pemberian bantuan sembako kepada 30 orang anak terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan 74 orang anak terlantar dari APBN Kemensos RI
- b. Kegiatan Penyediaan Sandang
Kegiatan ini berupa pemberian bantuan sandang dengan rincian sebagai berikut :
 - Pemberian bantuan sandang kepada 86 orang disabilitas terlantar dari APBN Kemensos RI
 - Pemberian bantuan sandang kepada 192 orang lansia terlantar dari APBN Kemensos RI.
 - Pemberian bantuan sandang kepada 80 orang anak terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan 74 orang anak terlantar dari APBN Kemensos RI.
- c. Kegiatan Pemberian Alat Bantu
Kegiatan ini berupa pemberian bantuan alat bantu. Kegiatan tersebut menggunakan anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya yaitu Pemberian alat bantu kepada 15 orang lansia terlantar
- d. Kegiatan Pemberian Alat Bantu
Kegiatan ini berupa pemberian bantuan alat bantu. Kegiatan tersebut menggunakan APBN Kemensos RI, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pemberian alat bantu kepada 3 orang Disabilitas terlantar.
 - Pemberian alat bantu kepada 6 orang lansia terlantar.
- e. Kegiatan pemberian bimbingan sosial keluarga penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar serta gelandangan
Kegiatan ini berupa pembinaan dan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga. Kegiatan tersebut menggunakan anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas sebanyak 30 orang
 - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lansia terlantar sebanyak 40 orang
 - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar sebanyak 30 orang

Gambar 3.76
Penyerahan Bantuan Permakanan untuk Lansia dan Disabilitas



Sumber : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2024

3. Program Perlindungan Jaminan Sosial
Telah dilakukan fasilitasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah Keluarga penerima PKH 18.154 KPM dengan anggaran Rp. 21.776.630.952,- yang bersumber dari APBN Kemensos RI.

Untuk mendukung penyelenggaraan program program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan, diluncurkan beberapa inovasi :

- 1) **DUYAN BASO** (PengaDUan dan PelaYANan BAntuan SOsial). Inovasi ini berupaya untuk mengakomodir semua pengaduan dan pelayanan kepada masyarakat terkait bantuan sosial.
- 2) **PALAK KERAMAT** (Pengawasan Verifikasi Data Kelayakan Keluarga Penerima Manfaat).
Melalui Inovasi ini, dibentuk sebuah wadah untuk membantu Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) dalam memverifikasi kelayakan keluarga penerima manfaat, dengan data real di lapangan. Inovasi ini berfungsi untuk melihat secara jelas rumah keluarga penerima manfaat yang diusulkan melalui upload foto yang ada titik geo-tagging nya langsung. Tujuan dari memakai geo-tagging ini adalah untuk mengetahui dengan jelas apakah rumah masyarakat calon/penerima manfaat tersebut memang layak atau tidak layak.
- 3) **GAPARI** (Gerakan Perempuan Ekonomi Mandiri).
Inovasi ini merupakan sebuah inovasi yang menjadikan perempuan sebagai kepala keluarga mampu mengembangkan usahanya yang telah ada atau menciptakan peluang - peluang usaha yang baru. Dalam wadah bernama PEKKA inovasi GAPARI akan menjadi kemitraan antara masyarakat dan pemerintah khususnya PEKKA dan Dinsos P3A.
- 4) **Please Care Papa** (Pusat Layanan Terpadu Penanganan Kemiskinan yang Cepat, Akurat, Responsif dan Efektif di Kabupaten Padang Pariaman).
Inovasi ini merupakan sebuah inovasi pelayanan publik untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terkait dengan urusan sosial seperti pelayanan terkait kemiskinan, pelayanan untuk kelompok rentan, pelayanan untuk korban bencana, dan sebagainya yang merupakan upaya Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadikan pelayanan publik lebih efektif dan efisien.

4. Program Penanganan Bencana

Program ini bertujuan untuk meringankan kebutuhan dasar korban bencana dengan anggaran DAU yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 749.974.000,-.

a. Penyediaan Permakanan dan Sandang

Telah disalurkan bantuan makanan dan sandang sebanyak 11.151 jiwa yang mengalami kejadian bencana alam dan bencana sosial.

b. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memberikan bantuan sembako kepada kelompok rentan sebanyak 28 orang.

c. TAGANA Masuk Sekolah

Pada tahun 2024 DinsosP3A telah melaksanakan TAGANA (Taruna Siaga Bencana) Masuk Sekolah sebanyak 8 Sekolah Dasar Negeri.

d. Program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara)

Diberikan bantuan usaha bagi PPKS sebanyak 54 KPM dengan anggaran Rp. 3.000.000 x 54 = Rp. 162.000.000,-

Gambar 3.77
PPKS yang Menerima Bantuan Usaha



Sumber : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Semua korban pasca bencana alam maupun sosial telah dibantu secara keseluruhan dengan berbagai program dan kegiatan yang telah diuraikan diatas. Keberhasilan pencapaian target kinerja 100 % tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan.

Gambar 3.78
Bantuan Sosial Korban Rumah Terbakar

(An. Ibu Nur Asni di Nagari Sikabu Bukik Kecamatan Lubuk Alung, Hadir Wali Nagari, Ketua Bamus, dan Tagana)



Gambar 3.79
Penyerahan Bantuan Bahan Makanan dan Logistik pada Korban Bencana Longsor



Sumber : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pencapaian target kinerja penyaluran bantuan bagi korban bencana tidak terlepas dari dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan tersebut. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai merupakan syarat mutlak dalam memobilisasi bantuan bagi korban bencana. Dengan demikian masyarakat yang terkena bencana dapat terbantu tepat waktu. Disamping itu kesiapan Tim TAGANA juga tidak bisa dikesampingkan pada tahun 2024 TAGANA bersama DINSOSP3A melakukan kegiatan Tagana Masuk Sekolah (TMS) dengan 4 SDN di 4 Kecamatan.

Gambar 3.80
TAGANA Masuk Sekolah (TMS) di SMP 2 Nan Sabaris



Sumber : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Dalam rangka perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial diluncurkan inovasi **DUL PKK** (Dapur Umum Lapangan PKK). Inovasi ini merupakan inovasi pelayanan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial dengan berbagai stakeholder terutama PKK baik itu tingkat Kecamatan maupun tingkat Nagari. Saat terjadi bencana dengan skala yang luas, posko yang ada di Nagari atau

Kecamatan bisa membantu para korban Bencana dengan berkolaborasi dengan PKK, sedangkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman akan memfasilitasi posko dengan supply bahan makanan agar bisa dimasak dan dikonsumsi oleh korban yang terdampak bencana.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan memperoleh pagu sebesar Rp. 1.710.977.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.492.661.719,-dengan persentase sebesar 87,24%. Adapun efisiensi anggaran yang diperoleh sebesar Rp. 218.315.381,- atau 12,75%.

Berikut ini adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja Tingkat Kemiskinan :

Tabel 3.78
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	91,90%	87,24%	4,66%

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil melakukan efisiensi anggaran. Dan jika di total dengan efisiensi kinerja maka diperoleh tingkat efisiensi sebesar 4,66%. Karena persentase rata-rata penyerapan anggaran kurang dari 100%. Meskipun efisiensi ini cukup kecil namun Kabupaten Padang Pariaman tetap berupaya dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan.



SASARAN STRATEGIS 13

Meningkatnya Investasi di Daerah

Sasaran Strategis “Meningkatnya Investasi di Daerah” berada pada Misi ke-7 RPJMD Kabupaten Padang 2021-2026 yaitu: Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Adapun Indikator Kinerja Utama pada sasaran ini adalah “Persentase Pertumbuhan Investasi”.

Adapun formulasi perhitungan untuk IKU ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Formulasi : } \frac{\text{Nilai Investasi Periode Sekarang} - \text{Nilai Investasi Periode Sebelumnya}}{\text{Nilai Investasi Periode Sebelumnya}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan formulasi pengukuran diatas dan berdasarkan nilai realisasi investasi yang dihimpun Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman, maka dapat diuraikan persentase pertumbuhan investasi di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\frac{3.434 \text{ Milyar} - 1.205 \text{ Milyar}}{1.205 \text{ Milyar}} \times 100\% = 185\%$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa, pada tahun 2024 capaian kinerja persentase pertumbuhan invetasi adalah sebesar 185%.

Peningkatan realisasi investasi Tahun 2024, tersebar pada berbagai sektor yaitu sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.79
Realisasi Investasi Menurut Sektor di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Realisasi Investasi per Sektor	TW I sd TW IV	Persentase Capaian
1	Sektor Pariwisata	Rp. 470.757.790	1,37%
2	Sektor Transportasi	Rp. 403.783.254.635	1175,80%
3	Sektor Pertambangan	Rp. 3.450.000.000	10,05%
4	Sektor Peternakan	Rp. 2.954.636.425	8,60%
5	Sektor Industri	Rp. 152.035.640.814	442,72%
6	Sektor Konstruksi	Rp. 2.839.504.867.320	8268,49%
7	Sektor Perdagangan	Rp. 12.549.843.757	36,54%
8	Sektor Instalasi Listrik	Rp. 1.945.775.268	5,67%
9	Sektor Pergudangan	Rp. 4.215.200.000	12,27%
10	Sektor Komunikasi	Rp. 13.217.446.212	38,49%
	JUMLAH	Rp 3.434.127.422.221	100

Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Berdasarkan tabel di atas, realisasi investasi terbesar Tahun 2024 yaitu di sektor konstruksi, dimana pada tahun 2024 dengan dilanjutkannya pengerjaan proyek strategis nasional jalan Tol Padang – Pekanbaru pada trase Padang - Sicincin sepanjang 36,6 km, disusul investasi pada sektor transportasi dan sektor industri. Perkembangan

investasi di sektor-sektor tersebut mencerminkan upaya Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung diversifikasi ekonomi. Peningkatan investasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja, pendapatan daerah, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Capaian indikator kinerja utama “Persentase Pertumbuhan Investasi” pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.80
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Pertumbuhan Investasi Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Persentase Pertumbuhan Investasi	%	10	185	1.850	Sangat Berhasil

Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Persentase pertumbuhan investasi Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan perkembangan yang meningkat dan telah mencapai realisasi yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Capaian nilai realisasi investasi tahun 2024 mencapai 1850%, hal ini karena dalam penetapan target digunakan prediksi menggunakan data investasi yang mengesampingkan investasi yang tidak terprediksi seperti pengerjaan proyek strategis nasional.

Selain karena investasi dari proyek strategis nasional, keberhasilan realisasi investasi yang melebihi target ini juga disebabkan faktor-faktor lain, diantaranya yaitu kesadaran pelaku usaha atas pelaporan dengan beberapa langkah pengawasan pelaporan pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), adanya kegiatan pembinaan mengenai pengawasan perizinan berbasis risiko kepada pelaku usaha yang ditunjang dengan pendanaan dari pemerintah pusat melalui alokasi DAK Non Fisik bidang penanaman modal.

b) Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tabel 3.81
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan Investasi
Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Persentase Pertumbuhan Investasi	%	N/A	159,92	10	185	1.850	Sangat Berhasil

Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pada tahun 2023, realisasi persentase pertumbuhan investasi berada pada angka 159,92%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 185% mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 25,08%. Hal ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan investasi di Padang Pariaman pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.82
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Investasi Tahun 2021-2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja				Capaian 2024 (%)
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Nilai Investasi	Milyar	403,3	470,4	491,9	463,6	997,6	463,6	1.205	3.434	740,72
Persentase Pertumbuhan Investasi di Daerah	%	N/A	N/A	N/A	10	-25	-53,53	159,92	185	1.850

Sumber: BKPM dan DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Persentase Pertumbuhan Investasi merupakan indikator kinerja utama untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Investasi di Daerah yang ditetapkan mulai Tahun 2024. Oleh karena itu penetapan targetnya selama rentang tahun RPJMD baru ada untuk Tahun 2024, dan untuk Tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak terdapat penetapan targetnya.

Namun demikian pada tabel 3.82 di atas, terlihat realisasi indikator kinerja ini sangat fluktuatif dikarenakan adanya pengerjaan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Padang Pekanbaru sejak tahun 2023, sehingga terjadi anomali data dan menyulitkan untuk dilakukan analisa perbandingan.

d) Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian IKU Persentase Pertumbuhan Investasi di Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Faktor Penyebab Keberhasilan tercapainya target indicator kinerja persentase pertumbuhan investasi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 antara lain :

1. Adanya kegiatan pembinaan mengenai pelaporan kegiatan penanaman modal kepada pelaku usaha.
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan mengenai perizinan berbasis risiko.
3. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan usahanya.
4. Karena adanya dukungan Dana Alokasi Khusus Fasilitas Penanaman Modal yang mendukung Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Langkah kedepan yang dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja antara lain :

1. Melakukan koordinasi dengan tim teknis PUPR dan ATR BPN mengenai pemetaan mengenai RDTR.
2. Meningkatkan transparansi informasi regulasi RDTR Kabupaten Padang Pariaman, sehingga dapat mempercepat proses rekomendasi tata ruang yang dibutuhkan dalam investasi .
3. Menyediakan peta potensi investasi dan dokumen perencanaan penanaman modal.
4. Memaksimalkan pencapaian realisasi investasi pada sektor lainnya diluar sektor Konstruksi.
5. Mempercepat penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten.

e) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Dengan Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah dengan target yang di tetapkan yaitu 1 dokumen sedangkan pagu Anggaran Rp. 29.980.000,- dan Terealisasi 1 dokumen dan realisasi anggaran Rp. 8.880.000,- atau 29,35 dalam Kegiatan Pembuatan Buku Potensi Investasi dengan sub kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah Kabupaten dengan target 1 dokumen.

Yang menjadi faktor pendukung dari pencapaian ini diantaranya adalah:

- Terlaksananya kegiatan Peta Potensi Investasi Daerah Kabupaten (Buku Peta Potensi Investasi Daerah Kabupaten)
- Peningkatan kegiatan usaha di sektor konstruksi.

Sedangkan yang menjadi hambatan diantaranya adalah:

- Permasalahan kesesuaian Tata Ruang untuk beberapa rencana investasi yang akan dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman.
- Belum adanya peta potensi investasi yang siap ditawarkan kepada investor.
- Minimnya ketersediaan anggaran untuk mengakomodir kebutuhan kegiatan pada program pengembangan iklim penanaman modal (Pembuatan Peta Potensi Digital)

2. Program Promosi Penanaman Modal

Target pelaksanaan kegiatan promosi sebanyak 6 (enam) kali event tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan oleh faktor penghambat sebagai berikut:

- Kurang tersedianya data peluang investasi yang sudah memiliki kajian ilmiah.
- Minimnya ketersediaan anggaran untuk mengakomodir kebutuhan kegiatan pada program promosi penanaman modal.
- Tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan promosi investasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Adanya beberapa sektor peluang investasi yang belum terekspose dalam pembuatan audio visual karena kecilnya anggaran kegiatan.

Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal disebabkan oleh faktor pendukung sebagai berikut:

- Keikutsertaan dalam kegiatan pameran expo dan forum investasi di Surabaya.
- Dukungan dari OPD teknis dalam memberikan informasi terkait dengan sektor potensi investasi. (DPUPR, DLHPKPP, ATR BPN, Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan, Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Parpora, Dis Dagnakerkop & UKM, Dinas Perhubungan)

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Untuk mewujudkan Pelaksanaan program ini ada 4 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.953.800,- dan realisasi anggaran Rp. 27.052.500,- atau 87,4%. Terlaksananya Program Pelayanan Penanaman Modal disebabkan oleh faktor pendukung sebagai berikut:

- Kemudahan bagi investor dalam berInvestasi di padang pariaman
- Sosialisasi yang selalu diberikan kepada para pelaku usaha Melalui Bimbingan teknis dan Penyelesaian Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha
- teknologi informasi dan aplikasi - aplikasi yang memudahkan untuk saling berkoordinasi antar tim teknis perizinan.

Faktor penghambat sebagai berikut:

- Keterbatasan lahan untuk Investor dalam berinvestasi (mengembangkan Usaha)
- Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus izin usaha
- Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan Program Pelayanan Penanaman Modal
- Keterbatasan sumber daya manusia untuk melaksanakan Program Pelayanan Penanaman Modal

4. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Terlaksananya Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.440.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.420.000,- atau 99,18%. Terlaksananya Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal disebabkan oleh faktor pendukung sebagai berikut:

- Kemudahan dalam pengeloaan data melalui aplikasi.
Dengan menggunakan aplikasi perizinan meminimalisir terjadinya *redudansi* data dan lebih efisien karena dapat menggunakan tanda tangan elektronik sehingga bisa *paperless*,
- Adanya Inovasi dan Aplikasi dalam Proses Perizinan yang bisa langsung di Akses oleh Pelaku usaha.

Faktor penghambat sebagai berikut:

- Banyaknya perubahan format izin karena disebabkan adanya regulasi-regulasi baru, Belum adanya aplikasi dalam penyajian dokumen perizinan, petugas arsiparis yang belum ada, Seringnya terjadi gangguan pada aplikasi OSS karena proses maintenance dari pusat yang tidak informasikan.
- Proses perizinan yang melibatkan beberapa OPD Teknis terkait sehingga membutuhkan waktu dalam proses pengeluaran/penerbitan Perizinan.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran DAK Non Fisik dan DAU sebesar Rp.556.700.000, - terealisasi sebesar Rp. 512.880.500, - atau 92,13%

Faktor Pendukung capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Sistem perizinan secara elektronik menggunakan aplikasi OSS/OSS RBA memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mengakses dan memproses izin secara mandiri/langsung.
- Telah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang sistem pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal/Investasi di daerah.
- Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan dilapangan kepada pelaku usaha.

Total anggaran program yang mendukung capaian IKU ini pada tahun 2024 sebesar Rp. 5.068.805.116,00 dan realisasi sebesar Rp. 4,431.004,475.00 atau terealisasi sebesar 94,38%.

Gambar 3.81

Bimbingan Teknis /Sosialisasi Perizinan Berusaha Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 3.82
Pendampingan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Pengimputan LKPM



Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 3.83
Pendampingan Terhadap Pelaku Usaha dalam Pengurusan Izin Menggunakan Aplikasi OSS (Online Single Submission)



Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2024

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut ini adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Investasi di Daerah Tahun 2024 :

Tabel 3.83
Efisiensi Sumberdaya Indikator Kinerja
Persentase Pertumbuhan Investasi Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Investasi di Daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi	1.850%	94,38%	1.755,62%

Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya sangat signifikan untuk capaian indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Investasi pada Tahun 2024, yaitu efisiensi sebesar 1.755,62%, yang berasal dari efisiensi kinerja sebesar 1750% ditambah efisiensi anggaran 5,62%.



SASARAN STRATEGIS 14

Meningkatnya Perekonomian Masyarakat

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi.

Dalam rangka melihat keberhasilan pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Perekonomian Masyarakat, digunakan indikator "Kontribusi Ekonomi Sektor Riil terhadap PDRB. Kontribusi Ekonomi Sektor Riil terhadap PDRB merupakan persentase nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor riil (seperti pertanian, industri manufaktur, perdagangan, konstruksi, dan jasa non-keuangan) terhadap total PDRB suatu wilayah dalam periode tertentu. Sektor riil mencerminkan aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang nyata digeluti oleh masyarakat suatu wilayah tersebut dan merupakan indikator penting untuk mengukur peran dan dampak sektor riil dalam pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran} = \frac{\text{Nilai Tambah Sektor Riil}}{\text{Total PDRB}}$$

Sektor riil Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan 8 sektor usaha yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*
2. Industri Pengolahan/*Manufacturing*
3. Konstruksi/*Construction*
4. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor /*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*
5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*
6. Real Estat/*Real Estate Activities*
7. Jasa Pendidikan/*Education*
8. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*

Berdasarkan data Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Padang Pariaman, 2020–2024 yang tersaji pada buku Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2025, dapat disajikan kontribusi ekonomi sektor riil terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.84
Persentase Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB
Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sektor Lapangan Usaha	Pesentase Kontribusi	
		Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	20,55%	20,20%
2	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	10,48%	10,31%
3	Konstruksi/ <i>Construction</i>	9,83%	10,15%
4	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	10,19%	10,19%
5	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1,27%	1,25%
6	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1,02%	1,02%
7	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,59%	5,45%
8	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,70%	0,70%
Jumlah		59,63%	59,27%

Sumber : data diolah dari Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka 2025

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Adapun perbandingan target dan realisasi capaian IKU “Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB” pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.85
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB Tahun 2024

IKU	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB	%	62	59,27	95,60	Berhasil

Sumber : BPS Padang Pariaman & DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Kontribusi Ekonomi Sektor Riil terhadap PDRB pada tahun 2024 mendapatkan realisasi sebesar 59,27% dari target sebesar 62% dengan capaian 95,60%. Capaian tersebut masuk ke dalam kategori “Berhasil”.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berikut akan disajikan perbandingan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama “Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB” tahun 2023 dengan tahun 2024.

Tabel 3.86
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB
Tahun 2023 dan Tahun 2024

IKU	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB	%	N/A	59,63	62	59,27	95,60	Berhasil

Sumber : BPS Padang Pariaman, 2024

Nilai Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB pada tahun 2023 adalah sebesar 59,63%. Sedangkan pada tahun 2024 capaiannya sebesar 59,27 dari target 62%. Hal ini memperlihatkan bahwa pada tahun 2024, Sektor Riil Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan kontribusi Terhadap PDRB dari tahun 2023.

Jika dilihat melalui tabel 3.83 terdapat 4 sektor lapangan usaha tahun 2024 yang mengalami penurunan kontribusi jika dibanding dengan tahun 2023 yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta sektor Jasa Pendidikan. Sedangkan 3 sektor lain memiliki kontribusi tetap dan hanya sektor Konstruksi yang mengalami kenaikan kontribusi. Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 sebesar 4,57, mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB tahun 2023 sebesar 5,46.

Persentase kontribusi ekonomi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan secara keseluruhan tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 hal ini terlihat dari produksi Pertanian, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan yang mengalami kenaikan dan penurunan.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki lahan sawah seluas 18.289,00 hektar di tahun 2024 dan sebanyak 15.250,00 hektar dari total luas lahan sawah atau 83,38% sudah menggunakan irigasi. Sedangkan sisanya 3.039,00 hektar atau 16,62% masih merupakan sawah non irigasi. Dengan total lahan panen padi sebesar 42.175,09 hektar, Kabupaten Padang Pariaman dapat memproduksi padi sebanyak 185.907,80 ton di tahun 2024. Produksi padi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 7,53% dikarenakan luas panen tahun 2024 juga mengalami penurunan sebesar 8,30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Luas panen jagung di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan total sebesar 8.434,24 hektar. Berbanding lurus dengan kenaikan luas panen, produksi jagung juga mengalami peningkatan sebesar 12,40% dibanding dengan tahun sebelumnya. Produksi tanaman sayur di Kabupaten Padang Pariaman menurun, dan produksi buah buahan jika dibandingkan dengan produksi tahun 2023 mengalami kenaikan produksi sebesar 7,03%.

Dari seluruh komoditi Perkebunan di Kabupaten Padang Pariaman, hanya komoditi kopi saja yang mengalami kenaikan jumlah produksi selama tahun 2024 sebesar 0,02%. Sedangkan Komoditi dengan hasil produksi terbesar pada tahun 2024 adalah kelapa dengan jumlah produksi sebanyak 39.020,91 ton.

Populasi sapi potong di Kabupaten Padang Pariaman juga mengalami kenaikan pada tahun 2024 berjumlah 43.512 ekor dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 42.689 ekor. Sedangkan untuk populasi jenis unggas, jumlah ayam ras petelur menurun pada tahun 2024 sebanyak 1,66%. Populasi ayam kampung juga menurun 4,61%.

Produksi ikan perikanan umum di Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 36,90 ton menjadi 7,27 ton pada tahun 2024 dengan nilai produksi Rp 23.757.800,00. Sedangkan kolam perikanan rakyat mengalami peningkatan produksi ikan sebesar 2,11% menjadi 57.914,62 ton dengan nilai produksi sebesar Rp1.685.331.380,00.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.87
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB	%	N/A	N/A	N/A	62%	65,33	61,52	59,63	59,27

Sumber : BPS Padang Pariaman, 2024

Pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa target jangka menengah dari Indikator Kinerja “Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB” tidak ada. Hal ini dikarenakan adanya perubahan indikator kinerja utama pada tahun 2024, sehingga target dan indikator tidak terdapat pada RPJMD.

Jika dilihat dari realisasi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB selalu mengalami penurunan kontribusi. Hal ini memperlihatkan bahwa perekonomian nyata yang melibatkan sebagian besar masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dari tahun ke tahun mengalami perlambatan. Hal ini tentu harus menjadi fokus perhatian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana kontribusi ekonomi sektor riil terhadap PDRB sebaiknya selalu meningkat.

Hal ini juga dapat dijelaskan dengan jika dilihat kontribusi sektor Pertanian Kehutanan, dan Perikanan, yang merupakan sektor dengan kontribusi ekonomi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman, selalu menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, sektor sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki kontribusi sebesar 22,65%, menurun menjadi 21,37% pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 kembali menurun kontribusinya menjadi sebesar 20,55% dan tahun 2024 kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kembali menurun menjadi sebesar 20,20%.

d) Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian IKU Kontribusi Ekonomi Sektor Riil terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Dari hasil capaian dan interpretasi kinerja seperti uraian sebelumnya, dapat diuraikan beberapa faktor pendukung capaian IKU antara lain :

1. Adanya Pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian;
2. Adanya Bantuan benih/bibit tanaman pangan;
3. Terintegrasinya program pusat dan daerah sehingga pencapaian produksi perikanan tangkap meningkat;
4. Adanya penumbuhan UPI (Unit Pengolahan Ikan) yang baru;
5. Adanya pemberian bantuan yang disalurkan oleh pemerintah, pembinaan terhadap kelompok sehingga produksi perikanan kelompok meningkat;
6. Adanya pendataan harga barang kebutuhan pokok;
7. Adanya pelaksanaan operasi pasar;
8. Kesadaran Industri Kecil dan Menengah/Pelaku Industri terhadap pentingnya sertifikasi produk.
9. Adanya *crosscutting* kegiatan dengan OPD teknis dan *stakeholders* lainnya sehingga terlaksananya sosialisasi kepada sektor industri yang potensial.

Selain faktor pendukung diatas, terdapat pula faktor-faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2024 antara lain :

1. Menurunnya luas tanam dan luas panen tanaman tahun 2024 dibandingkan tahun 2023;
2. Serangan hama penyakit (OPT);
3. Terjadinya gagal panen akibat bencana alam;
4. Belum adanya peraturan daerah yang mempertegas larangan dan sanksi atas penangkapan ikan di perairan umum dengan menggunakan bahan kimia dan beracun serta alat listrik dan setrum;
5. Belum adanya kelembagaan koperasi nelayan yang akan memfasilitasi permodalan, sarana prasarana dan pemasaran hasil perikanan;
6. Biaya produksi budidaya cukup tinggi terutama pakan ikan;
7. Minimnya anggaran promosi produk-produk daerah untuk peningkatan investasi.
8. Kenaikan harga bahan baku mempengaruhi jumlah produksi pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah yang cenderung menurun;
9. Keterbatasan Modal yang dimiliki Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah/Pelaku Industri untuk mengembangkan usaha.

Adapun upaya-upaya perbaikan atau langkah kedepan yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan kinerja antara lain :

1. Pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), baik terhadap tanaman pangan maupun tanaman perkebunan;
2. Perlunya bantuan sarana produksi terutama penyediaan benih/bibit unggul bersertifikat/berlabel kepada masyarakat tani;
3. Pembangunan atau perbaikan infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi sebagai nadi dalam menjalankan usaha tani tanaman pangan;
4. Peningkatan kolaborasi dengan *stakeholders* dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan nilai tukar nelayan;

5. Memfasilitasi bantuan permodalan dari lembaga keuangan atau CSR;
6. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga dari komoditi yang merupakan faktor produksi terutama pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
7. Meningkatkan promosi daerah baik berupa peluang investasi, produk daerah maupun promosi bahan komoditi yang ada di Kabupaten Padang Pariaman;
8. Pengembangan sentra-sentra industri baru di Kabupaten Padang Pariaman;
9. Memberikan panduan standarisasi produk bagi Industri Kecil Dan Menengah/ Pelaku Industri untuk meningkatkan daya saing produk.

e) Program-Program Pendukung Capaian IKU

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Kontribusi Ekonomi Sektor Riil terhadap PDRB ini tidak terlepas dari adanya dukungan berbagai program yang telah dilaksanakan, diantaranya :

- **Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**
Pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran tahun 2024 sebesar Rp.119.999.900,00.
Adapun kegiatan yang terdapat dalam program ini, antara lain:
 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian; dan
 2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.
- **Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**
Pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran tahun 2024 sebesar Rp7.802.057.900,00.
Adapun kegiatan yang terdapat dalam program ini, antara lain:
 1. Pengembangan Prasarana Pertanian; dan
 2. Pembangunan Prasarana Pertanian
- **Program Penyuluhan Pertanian**
Pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran tahun 2024 sebesar Rp827.590.000,00.
Adapun kegiatan yang terdapat dalam program ini yaitu Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**
Pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran tahun 2024 sebesar Rp560.000.000,00. Dengan realisasi sebesar Rp548.954.054,00 atau sebesar 98,03%.
Adapun kegiatan yang terdapat dalam program ini yaitu Perberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota
- **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**
Pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran tahun 2024 sebesar Rp1.217.977.359,00. Dengan realisasi sebesar Rp1.185.032.604,00 atau sebesar 97,30%. Adapun kegiatan yang terdapat dalam program ini yaitu Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
- **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**
Pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran tahun 2024 sebesar Rp13.879.600,00. Dengan realisasi sebesar Rp13.750.000,00 atau sebesar 99,07%.

Adapun kegiatan yang terdapat dalam program ini yaitu Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil

- **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

Pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran tahun 2024 sebesar Rp.37.999.650,00. Dengan realisasi sebesar Rp31.539,402,00 atau sebesar 83%. Adapun kegiatan yang terdapat dalam program ini yaitu Pembangunan dan Pengelola sarana distribusi perdagangan.

- **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**

Anggaran program pada tahun 2024 sebesar Rp. 9.000.953.00 dari kegiatan tersebut realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 8.470.000,00 atau sebesar 94,10%. Kegiatan yang terdapat dalam program ini yaitu Operasi Pasar.

- **Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Anggaran program pada tahun 2024 sebesar Rp. 161.936.900,00 dari kegiatan tersebut realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 155.144.800,00 atau sebesar 95,81%

- **Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.**

Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 39.000.000,00 .

Adapun kegiatan yang terdapat dalam program ini, antara lain:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

- **Program Pengendalian Izin Usaha Industri.**

Adapun kegiatan yang terdapat dalam program ini, antara lain:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
2. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).

- **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.**

Pelaksanaan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional ini dialokasikan anggaran tahun 2024 sebesar Rp.1.000.000,00 .

Adapun kegiatan yang terdapat dalam program ini, antara lain:

1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);

2. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas;
3. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.

Gambar 3.84
Penyaluran Bantuan Bibit Tanaman Dan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan



Sumber DistanKP Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 3.85
Kegiatan Pemberian Bantuan Mesin Tempel dan Perahu



Sumber Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 3.86
Kegiatan Pendataan dan fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang



3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan & pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang di telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024, pagu dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

Tabel 3.88
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024			
Uraian	Pagu	Realisasi	Capaian
Pendapatan Daerah	Rp. 1.475.952.189.612,00	Rp. 1.427.456.037.285,43	96,71 %
Belanja Daerah	Rp. 1.539.649.300.981,79	Rp. 1.450.692.272.382,68	94,22 %

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.475.952.189.612,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.427.456.037.285,43 (96,71%). Sedangkan dilihat dari aspek belanja daerah di targetkan sebesar Rp. 1.539.649.300.981,79 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.450.692.272.382,68 dengan persentase capaian realisasi sebesar 94,22%. Adapun perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.89
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

NO	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 158.737.933.129,00	Rp. 144.739.185.746,43	91,18%
2	Pendapatan Transfer	Rp. 1.317.214.256.483,00	Rp. 1.282.716.851.539,00	97,38%
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 00,00	Rp. 00,00	0,00%

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2025

3.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk

mendanaai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2024 yang ditargetkan sebesar Rp. 158.737.933.129,00 dan terealisasi sebesar Rp. 144.739.185.746,43 (91,18%). Adapun perbandingan antara target dan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.90
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 67.260.000.000,00	Rp. 61.253.259.287,5	91,07%
2	Pendapatan Restribusi Daerah	Rp. 72.924.616.090,00	Rp. 66.154.972.984,00	90,72%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 8.728.317.039,00	Rp. 8.728.317.039,00	100,00%
4	Lain-lain PAD yang Sah	Rp. 9.825.000.000,00	Rp. 8.602.636.435,93	87,56%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		Rp. 158.737.933.129,00	Rp. 144.739.185.746,43	91,18%

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2025

3.3.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang terdiri dari :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID) Dan Dana Desa
2. Pendapatan Transfer antar daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Pendapatan Transfer pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.317.214.256.483,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.282.716.851.539,00 (97,38%). Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.91
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 1.205.672.208.400,00	Rp. 1.205.591.057.388,00	99,99%
2	Pendapatan Transfer antar daerah	Rp. 111.542.048.083,00	Rp. 77.125.794.151,00	69,15 %
Jumlah Pendapatan Transfer		Rp. 1.317.214.256.483,00	Rp. 1.282.716.851.539,00	97,38%

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2024

3.3.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan. Tidak ada dana lain-lain pendapatan yang sah yang ditargetkan pada tahun 2024

Adapun pagu dan Realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target, sasaran strategis, dan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.445.807.498.167,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.363.799.952.802,00 atau 94,33%. Pagu dan realisasi anggaran per sasaran strategis tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja ini.

3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Tabel 3.92
Prestasi dan Penghargaan Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023-2024

No	Tahun	Nama Penghargaan	Tingkat	Instansi/Lembaga Penyelenggara
1	2023	Penghargaan <i>Innovative Government Award</i> (IGA) Tahun 2023, dengan kategori "Kabupaten Terinovatif"	Nasional	Kementerian Dalam Negeri
2	2023	Penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Koperasi Madya Pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Tingkat Nasional Ke 76 Tahun 2023	Nasional	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
3	2023	Penghargaan sebagai pembina BPR Pembangunan Padang Pariaman Tahun 2023 kepada Bupati Padang Pariaman Suhatri bur	Nasional	Majalah Top Business, bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (I-Otda)
4	2023	Penghargaan Top Pengelolaan BPR dengan peringkat bintang 4 Tahun 2023	Nasional	Majalah Top Business, bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (I-Otda)
5	2023	Penghargaan Top CEO BUMD Tahun 2023	Nasional	Majalah Top Business, bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (I-Otda)
6	2023	Penghargaan Penganugerahan Parahita Ekapraya Tahun 2023	Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
7	2023	Penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 Juara Harapan Kategori Daya Tarik Pengunjung "Desa Wisata Nyarai"	Nasional	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8	2023	Penghargaan Pemerintah Daerah Pengelola Dana Desa Terbaik Semester I Tahun 2023	Provinsi	Kantor Pelayanan Perbendaharaan

		Lingkup KPPN Padang		Negara (KPPN) Padang
9	2023	Penghargaan Ayah Bunda GenRe Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 untuk Bapak Bupati dan Ibu Ketua TP PKK	Provinsi	Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat
10	2023	Penghargaan Kabupaten Terinformatif pada Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik	Provinsi	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
11	2024	Penghargaan keterbukaan informasi badan publik kategori Pemerintah Daerah tahun 2024	Provinsi	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
12	2024	Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award tahun 2024	Nasional	Kementerian PEMBERDAYAAN Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
13	2024	Penghargaan Proklamasi Lestari dan Apresiasi Pembina Proklamasi tahun 2024	Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14	2024	Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai Kabupaten Pengendali Inflasi Terbaik Tingkat Nasional	Nasional	Kementerian Dalam Negeri
15	2024	Anugerah Pandu Negeri 2024 Kategori Platinum sebagai pemerintah daerah dengan kinerja dan governansi kategori teristimewa	Nasional	Indonesian Institut for Publik Governance (IIPG)
16	2024	Penghargaan Peringkat Ke – 2 Pemerintah Desa dengan Kinerja Pengelolaan Dana Desa terbaik.	Provinsi	Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Padang
17	2024	Penghargaan Juara 3 Pengelolaan DAK Subbidang Keluarga Berencana Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kategori Pagu Sedang tahun 2024	Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
18	2024	Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Provinsi	Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat
19	2024	Penghargaan terbaik III Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal TA 2024	Provinsi	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
20	2024	Penghargaan TOP BUMD Awards tahun 2024 Bintang IV Sebagai Pembina BPR	Nasional	Majalah Top dan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA)
21	2024	Penghargaan Harapan III Dasawisma Terbaik Tingkat Sumbar	Provinsi	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
22	2024	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan penyelenggaraan Pelayanan Publik Opini Pengawasan Penyelenggaraan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

		Pelayanan Publik Tahun 2024		
23	2024	Penghargaan Terbaik IV dalam Ketepatan Penyetoran Iuran Wajib Pegawai (IWP 8%), Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Iuran program Jaminan Kematian (JKM) Tahun 2024	Provinsi	PT. Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Padang
24	2024	Anugerah Sahabat Pers Indonesia, sebagai penghargaan atas bukti harmonisasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan insan Pers Tahun 2024	Nasional	Dewan Pers Indonesia
25	2024	Penghargaan Innovative Government Award (IGA) sebagai Kabupaten Terinovatif Tahun 2024	Nasional	Kementerian Dalam Negeri

Gambar 3.87
Penghargaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan 2024

**PENGHARGAAN INNOVATIVE GOVERNMENT
 AWARD (IGA) DENGAN KATEGORI
 "KABUPATEN TERINOVATIF" TAHUN 2023**



**PENGHARGAAN SEBAGAI TOKOH PENGGERAK
 KOPERASI MADYA PADA PUNCAK
 PERINGATAN HARI KOPERASI TINGKAT
 NASIONAL KE-76 TAHUN 2023**



**PENGHARGAAN TOP BUMD AWARD
 TAHUN 2023**



**PENGHARGAAN PENGANUGERAHAN PARAHITA
 EKAPRAYA TAHUN 2023**



**PENGHARGAAN ANUGERAH DESA WISATA
 INDONESIA (ADWI) JUARA HARAPAN
 KATEGORI DAYA TARIK PENGUNJUNG "DESA
 WISATA NYARAI" TAHUN 2023**



**PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH
 PENGELOLA DANA DESA TERBAIK SEMESTER I
 TAHUN 2023 LINGKUP KPPN PADANG**



PENGHARGAAN AYAH BUNDA GENRE TERBAIK TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023



PENGHARGAAN KABUPATEN TERINFORMATIF PADA AJANG ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2023



PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK KATEGORI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024



PENGHARGAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) AWARD TAHUN 2024



PENGHARGAAN PROKLIM LESTARI DAN APRESIASI PEMBINA PROKLIM TAHUN 2024



PENGHARGAAN DARI MENTERI DALAM NEGERI SEBAGAI KABUPATEN PENGENDALI INFLASI TERBAIK TINGKAT NASIONAL



ANUGRAH PANDU NEGERI 2024 KATEGORI PLATINUM SEBAGAI PEMERINTAH DAERAH DENGAN KINERJA DAN GOVERNANSI KATEGORI TERISTIMEWA



PENGHARGAAN PERINGKAT KE – 2 PEMERINTAH DESA DENGAN KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA TERBAIK TAHUN 2024



PENGHARGAAN JUARA 3 PENGELOLAAN DAK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KATEGORI PAGU SEDANG TAHUN 2024



HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN NILAI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) TAHUN 2024



ANUGRAH PANDU NEGERI 2024 KATEGORI PLATINUM SEBAGAI PEMERINTAH DAERAH DENGAN KINERJA DAN GOVERNANSI KATEGORI TERISTIMEWA



PENGHARGAAN PERINGKAT KE – 2 PEMERINTAH DESA DENGAN KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA TERBAIK TAHUN 2024



PENGHARGAAN TERBAIK III DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TA 2023



PENGHARGAAN TOP BUMD AWARDS BINTANG IV SEBAGAI PEMBINA BPR TAHUN 2024



PENGHARGAAN HARAPAN III DASAWISMA TERBAIK TINGKAT SUMBAR TAHUN 2024



ANUGERAH SAHABAT PERS INDONESIA, SEBAGAI PENGHARGAAN ATAS BUKTI HARMONISASI PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN DENGAN INSAN PERS TAHUN 2024



PENGHARGAAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) SEBAGAI KABUPATEN TERINOVATIF TAHUN 2024



PENGANUGERAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024





BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara garis besar telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategis sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Berdasarkan analisis pencapaian indikator sasaran terhadap capaian kinerja (*Performance Results*) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 menggambarkan bahwa hampir semua dapat dipenuhi dan secara umum mencerminkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan dari 14 (empat belas) Sasaran Strategis, 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran seluruh sasaran tersebut telah dapat direalisasikan dengan sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja yakni sebesar 174,69% dengan 2 (dua) indikator belum/tidak memiliki data realisasi kinerja pada tahun 2024 ini.

Pencapaian indikator kinerja utama dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat 15 (Lima Belas) indikator (68,18%) dengan Kategori sangat berhasil, antara lain :
 - Indikator Kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah dengan realisasi 72% dari target 45%;
 - Indikator Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dengan realisasi 71,81 dari target 65;
 - Indikator Kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%;
 - Indikator Kinerja Persentase Warisan Cagar Budaya yang dilestarikan dengan realisasi 100% dari target 85%;
 - Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan dengan realisasi 100% dari target 100%;
 - Indikator Kinerja Persentase Ketaatan Terhadap RTRW dengan realisasi 82,10% dari target 75%;
 - Indikator Kinerja PDRB Per Kapita dengan realisasi 58,38 (Rp. Juta) dari target 57,25 (Rp. Juta);
 - Indikator Kinerja Pengeluaran Per Kapita dengan realisasi 11,756 (Rp. Juta) dari target 11,653 (Rp. Juta);
 - Indikator Kinerja Rata - Rata Lama Sekolah dengan realisasi 8,42 Tahun dari target 8,29%.
 - Indikator Kinerja Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten realisasi 71 (BB) dari target 71,05 (BB);
 - Indikator Kinerja Opini BPK RI terhadap LKPD Atas Laporan Keuangan Daerah dengan realisasi WTP dari target WTP;
 - Indikator Kinerja Indeks SPBE dengan realisasi 3,51 dari target 3,12;
 - Indikator Kinerja Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik dengan realisasi 89,86 dari target 65;
 - Indikator Kinerja Angka Usia Harapan Hidup dengan realisasi 69,89 Tahun dari target 70,10 Tahun;

- Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Investasi dengan realisasi 185% dari target 10%.
- 2. Terdapat 5 (Lima) indikator (22,72%) dengan Kategori berhasil, antara lain :
 - Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang dengan realisasi 66,56% dari target 71% ;
 - Indikator Kinerja Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik dengan realisasi 66,77% dari target 70,00%;
 - Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik dengan realisasi sebesar 4,29 dari target sebesar 4,57;
 - Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan dengan realisasi sebesar 6,27% dari target sebesar 5,80%;
 - Indikator Kinerja Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB dengan realisasi 59,27% dari target 62%.
- 3. Terdapat 2 (dua) indikator (9,1%) tidak/belum ada data realisasi tersedia (N/A), antara lain :
 - Indikator Kinerja Indeks Merit System dengan target 250.
 - Indikator Kinerja Prevalensi Stunting dengan target 14%.

Pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman didukung dengan adanya alokasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2024 sebesar Rp. 1.539.649.300.981,79 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.450.692.272.382,68 dengan persentase capaian realisasi sebesar 94,22% dan Anggaran Pendapatan Daerah tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.475.952.189.612,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.427.456.037.285,43 dengan persentase capaian realisasi sebesar 96,71%.

4.2 RENCANA PERBAIKAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat capaian realisasi untuk beberapa indikator yang belum memenuhi terget kinerja, hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa hambatan dan kendala. Untuk itu sebagai upaya perbaikan kedepan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan langkah konkrit melalui analisis dan evaluasi baik internal dan eksternal agar dapat dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan upaya akselerasi untuk pencapaian tahun berikutnya, dan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan, sehingga resiko kegagalan dapat ditekan dan dicarikan solusi untuk mengatasinya.

Langkah-langkah kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengevaluasi perencanaan kinerja agar lebih berkualitas dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) serta berupaya menggunakan indikator kinerja yang *SMART* yang mampu

menggambarkan lebih spesifik dari kinerja yang ingin dicapai. Hal ini sejalan dengan jadwal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode yang baru pada tahun 2025.

2. Terus menjaga semangat untuk berinovasi terutama dalam peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat.
3. Melaksanakan program-program dan kegiatan prioritas dalam pencapaian sasaran strategis daerah;
4. Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pelaporan data kinerja yang terintegrasi (SIMAK Kinerja) yang selaras dengan target-target daerah dalam dokumen perencanaan daerah dan di manfaatkan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif membangun Kabupaten Padang Pariaman. Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini, secara garis besar disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dimasa akan datang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



LAMPIRAN



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 38 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2024-2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

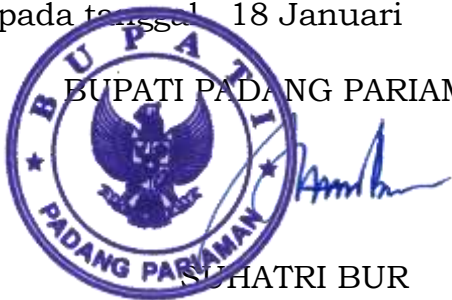
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- b. bahwa perubahan Indikator Kinerja Utama dapat terjadi jika terdapat perubahan dalam strategi atau prioritas pembangunan pemerintah yang harus tercermin dalam kinerja instansi yang didasarkan pada evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kinerja tetap relevan dengan sasaran yang ingin dicapai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6041);
- 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk:
- a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. penyusunan Indikator Kinerja Individu;
 - d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - e. pengukuran kinerja;
 - f. penyusunan laporan kinerja;
 - g. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - h. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 18 Januari 2024



SEHATRI BUR

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
- 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
 - 2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 38/KEP/BPP/2024
TANGGAL 18 Januari 2024
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN
2024-2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Ajaran Agama yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Pendidikan Al Qur'an yang menghasilkan Hafizh dan Hafizhah}}{\text{Jumlah Lembaga Pendidikan Al Qur'an Keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah (Bagian Kesra), Kecamatan
2.	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	$\frac{\text{Skor Toleransi} + \text{Skor Kesetaraan} + \text{Skor Kerjasama Sosial}}{3}$	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)
3.	Meningkatnya Ketertiban Umum/Stabilitas	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah	$\frac{\text{Jumlah Konflik Sosial yang Ditangani}}{\text{Jumlah Konflik Sosial yang Terlaporkan}} \times 100\%$	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
4.	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Persentase Warisan Cagar Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang telah dilestarikan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya yang Terdata}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Warisan Cagar Budaya Tak Benda yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Warisan Budaya tak benda yang terdata}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang (%)	$\frac{\text{Panjang Jalan memenuhi kondisi jaringan jalan baik dan sedang}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	$\frac{\text{Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas Irigasi Kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah/ Jiwa)	$\frac{\text{Nilai PDRB ADHB (Juta)}}{\text{Jumlah Penduduk (Jiwa)}}$ Keterangan: $\text{PDRB}_{\text{ADHB}} = \text{PDRB Atas Dasar Harga Berlaku}$	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
		Pengeluaran Per Kapita (Rupiah)	$\frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun}}{\text{banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan prioritas daya beli}}$	
7.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)	$\text{Rata - rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i	
8.	Meningkatnya Penyelenggaraan	Opini BPK RI terhadap LKPD	Hasil Opini BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Seluruh Perangkat Daerah

	Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	$\text{Nilai Evaluasi AKIP} = \sum_{k=0}^n \text{nilai komponen}$ Keterangan: Komponen 1: Perencanaan Kinerja Komponen 2: Pengukuran Kinerja Komponen 3: Pelaporan Kinerja Komponen 4: Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Seluruh Perangkat Daerah
9.	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Merit Sistem	Hasil Penilaian Indeks Merit System dari BKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Indeks SPBE	Indeks SPBE Hasil Penilaian Kemenpan RB	Dinas Komunikasi dan Informatia
10.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks Pelayanan Publik/ Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
11.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah mencapai umur x, pada tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting	Hasil SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Misikin}}{\text{Jumlah Penduduk Seluruhnya}} \times 100\%$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

12.	Meningkatnya Investasi di Daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi	$\frac{\text{Nilai investasi periode sekarang} - \text{nilai investasi periode sebelumnya}}{\text{Nilai investasi periode sebelumnya}} \times 100\%$	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian,
13.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB	$\frac{\text{PDRB Sektor Riil}}{\text{PDRB Total}} \times 100\%$ Keterangan: • PDRB Sektor Riil adalah total nilai tambah dari sektor riil dalam ekonomi regional. • PDRB Total adalah total nilai tambah seluruh sektor dalam PDRB.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHARTI BUR



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHATRI BUR

Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Parit Malintang, 5 Juli 2024
BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	45%
2	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	65
3	Meningkatnya Ketertiban Umum/Stabilitas	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah	100%
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	69,90 Tahun
		Prevalensi Stunting	14%
5	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata - Rata Lama Sekolah	8,29 Tahun
6	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi	PDRB Per Kapita	57,25 (Rp. Juta)
		Pengeluaran Per Kapita	11,653 (Rp. Juta)
7	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	5,80%
8	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	71%
		Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	70%
		Persentase ketaatan terhadap RTRW	75%
9	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Persentase Warisan Cagar Budaya yang dilestarikan	85,44%
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	71,43%
10	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	71
		Opini BPK RI terhadap LKPD	WTP
11	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Merit System	250
		Indeks SPBE	3,12
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,57
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	82,83
13	Meningkatnya Investasi di Daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi	10%
14	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB	62%

No	Program	Anggaran
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 8.101.096.500
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 264.765.000
3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp 332.425.000
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 55.799.311.117
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 2.747.555.900
6	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Rp 553.631.000
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 361.542.770
8	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 95.087.454.116
9	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 713.104.300
10	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 19.999.750
11	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 14.000.837
12	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 40.297.800
13	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 179.945.900
14	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 11.295.000
15	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Rp 20.784.000
16	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp 308.792.199
17	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp 15.534.800
18	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 283.015.799
19	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 113.985.000
20	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 299.999.900

21	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	2.051.610.000
22	Program Penanganan Bencana	Rp	499.974.200
23	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	1.239.898.400
24	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	94.692.439.617
25	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp	13.695.339.466
26	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	15.004.505.000
27	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	1.805.995.598
28	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	3.438.065.815
29	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	213.600.000
30	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	1.743.862.778
31	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	867.638.714.570
32	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	698.072.900
33	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	290.110.000
34	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	3.000.000.000
35	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	512.314.481
36	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	62.850.000
37	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	197.811.800.000
38	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	3.473.287.000
39	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	960.944.800
40	Program Kepegawaian Daerah	Rp	777.049.000
41	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	74.001.500

42	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	879.500.000
43	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	20.000.000
44	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	10.000.000
45	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	2.707.750.350
46	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	767.836.500
JUMLAH		Rp	1.379.338.058.663



Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2024
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran Kinerja	Kinerja		Program	Anggaran		Keterangan	
						Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang menghasilkan Hafizh / Hafizah	45%	$\frac{(\text{Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran yang menghasilkan hafiz dan hafizah})}{(\text{Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran} \times \text{keseluruhan})} \times 100\%$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	72%	160%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	8.255.767.450,00	7.747.248.604,00	93,84%	
2	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	65	$\frac{\text{Skor Toleransi} + \text{Skor Kesetaraan} + \text{Skor Kerjasama Sosial}}{3}$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	71,81	110,48%					
3	Meningkatnya Ketertiban Umum/Stabilitas	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah	100 %	Jumlah konflik sosial yang tertangani / Jumlah konflik sosial yang dilaporkan keseluruhan dikali 100%	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	100%	100%	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	77.503.800,00	46.179.700,00	59,58%	
								Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	315.631.000,00	305.901.700,00	96,91%	
4	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Persentase Warisan Cagar Budaya yang dilestarikan	85%	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang telah dilestarikan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya yang Terdata}} \times 100\%$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	100%	117,65%	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	223.600.000,00	220.948.065 ,00	98,81%	
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	100%	$\frac{\text{Jumlah Warisan Cagar Budaya Tak Benda yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Warisan Budaya tak benda yang terdata}} \times 100\%$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	100%	100%	Program Pengembangan Kebudayaan	1.985.462.778,00	1.974.235.531,00	99,43%	
5	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	71%	Panjang jalan memenuhi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang / Panjang jaringan jalan Kabupaten X 100%	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	68%	95,77%	Program Penyelenggaraan Jalan	95.324.686.939,00	89.276.329.479,00	93,65%	
		Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	70%	Luas irigasi dalam kondisi baik / Luas irigasi Kabupaten X 100%	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	66,77%	95,39%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	14.493.210.393,00	12.094.781.568,00	83,54%	
		Persentase Ketaatan terhadap RTRW	75%	(Realisasi RTRW/(Rencana Pembentukan) x 100%	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	82,10%	109,47%	Program Penataan Bangunan Gedung	16.199.269.850,00	14.596.994.159,00	90,11%	
6	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi	PDRB Per Kapita	57,25 Juta	$\frac{\text{Nilai PDRB ADHB (Juta)}}{\text{Jumlah Penduduk (Jiwa)}}$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	58,38 Juta	101,97%	Program Perekonomian dan Pembangunan	573.107.300,00	546.460.899,00	95,35%	
		Pengeluaran Per Kapita	11,653 Juta	$\frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun}}{\text{banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan prioritas daya beli}}$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	11,756 Juta	100,88%					
7	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata - Rata Lama Sekolah	8,29 Tahun	$\text{Rata} - \text{rata Lama Sekolah} 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	8,42 Tahun	101,57%	Program Pengelolaan Pendidikan	96.617.789.876,00	92.726.582.322,00	95,97%	
8	Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK RI terhadap LKPD	WTP	Hasil Opini BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	WTP	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	202.383.877.818,00	197.831.513.529,00	97,75%	
								Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.419.287.000,00	2.913.078.486,00	85,19%	
								Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.020.944.800,00	912.822.104,00	89,40%	
		Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	71 (BB)	$\text{Nilai Evaluasi AKIP} = \sum_{k=0}^n \text{nilai komponen}$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	71,05 (BB)	100,07%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	820.033.913.908,00	775.792.530.792,00	94,60%	
								Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	694.679.300,00	605.595.219,00	87,17%	
								Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	245.865.000,00	164.919.026,00	67,07%	
								Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.906.884.500,00	2.646.255.966,00	91,03%	
								Program Penyelenggaraan Pengawasan	406.946.078,00	404.262.401,00	99,34%	
								Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	65.430.000,00	57.047.700,00	88,54%	

9	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Merit System	250	Hasil Penilaian Indeks Merit System dari BKN	$\frac{realisasi}{target} \times 100$	N/A	N/A	Program Kepegawaian Daerah	1.438.461.959,00	1.124.215.065,00	78.15%	
		Indeks SPBE	3,12	Indeks SPBE Hasil Penilaian Kemenpan RB	$\frac{realisasi}{target} \times 100$	3,51	112,50%	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	68.374.000,00	66.660.700,00	97.49%	
								Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.169.230.000,00	1.167.445.738,00	99.84%	
								Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	18.050.000,00	17.932.400,00	99.34%	
								Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	9.240.000,00	9.168.700,00	99.25%	
								Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.685.612.750,00	2.619.694.785,00	97.54%	
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,57	Nilai Indeks Pelayanan Publik/ Hasil Evaluasi Kemenpan RB	$\frac{realisasi}{target} \times 100$	4,29	93,87%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	800.715.500,00	713.056.354,00	89.05%	
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	82,83	Hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	$\frac{realisasi}{target} \times 100$	89,86	108,49%					
11	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	69,89 Tahun	Jumlah usia orang yang meninggal satu tahun / Jumlah orang yang meninggal satu tahun	$\frac{realisasi}{target} \times 100$	70,10 Tahun	100,30%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	31.629.259.965,00	29.596.834.141,00	93.57%	
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.776.495.600,00	2.073.905.900,00	74,70%	
								Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	551.831.000,00	286.933.107,00	52%	
								Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	354.442.770,00	273.562.067,00	77.18%	
		Prevalensi Stunting	14%	Hasil SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) Kementerian Kesehatan	$\frac{(2 \times target) - realisasi}{target} \times 100$	N/A	N/A	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	101.945.199.994,00	90.361.156.027,00	88.64%	
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.776.495.600,00	2.073.905.900,00	74.69%	
12	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	5,80%	(Jumlah Penduduk Miskin)/(Jumlah Penduduk Seluruhnya) x 100%	$\frac{(2 \times target) - realisasi}{target} \times 100$	6,27%	91,90%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	21.776.630.952,00	20.931.697.670,00	96.12%	
								Program Rehabilitasi Sosial	299.999.900,00	286.833.375,00	95.61%	
								Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.037.310.000,00	2.013.396.400,00	98.82%	
								Program Penanganan Bencana	749.974.000,00	595.817.182,00	79.44%	
13	Meningkatnya Investasi di Daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi	10%	Nilai investasi periode sekarang – nilai investasi periode sebelumnya Nilai investasi periode sebelumnya x 100%	$\frac{realisasi}{target} \times 100$	185%	1.850%	Program Pelayanan Penanaman Modal	30.953.800,00	27.052.500,00	87.39%	
								Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2.440.000,00	2.420.000,00	99.18%	
14	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB	62%	PDRB Sektor Riil PDRB Total x 100%	$\frac{realisasi}{target} \times 100$	59,27%	95,60%	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	354.599.900,00	336.097.100,00	94.78%	
								Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.862.105.900,00	7.441.440.016,00	94.65%	
								Program Penyuluhan Pertanian	834.790.200,00	798.838.900,00	95.69%	
								Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	37.999.650,00	31.539.402,00	83%	
								Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	14.000.837,00	13.369.950,00	95.49%	
								Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	39.000.000,00	38.074.630,00	97.62%	
								TOTAL	1.445.807.498.167,00	1.363.799.952.802,00	94,33%	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

20
24

